

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KOTA TOMOHON TAHUN 2025



TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Tomohon dapat disusun tepat waktu.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dengan penyertaan Tuhan Pemerintah Kota Tomohon dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2024. Hal ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah/SAKIP, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari SAKIP yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2021-2026 dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025-2029 . Pada dasarnya laporan kinerja ini menyajikan tentang gambaran kinerja Pemerintah Kota Tomohon di tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dan tahun pertama RPJMD 2025-2029 Kota Tomohon, capaian-capaian target kinerja yang telah ditetapkan baik yang terealisasi 100% maupun yang belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun yang menghambat pencapaian target-target kinerja yang diukur berdasarkan indikator *input*, *output* serta *outcomes* dari setiap sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon telah disusun dan semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tomohon di tahun yang akan datang.

Terima kasih.

Pakatuan wo Pakalawiren

Tomohon, 30 Maret 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 merupakan hasil kinerja Tahun 2025 atau tahun terakhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan tahun pertama dalam pencapaian dan tujuan RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029 disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal. Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2025 yang berdasarkan RPJMD 2021-2026 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran yaitu: 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 83,69 predikat "**tinggi**". 2. Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran 76,79 predikat **"tinggi"**. 3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 101,51 predikat **"sangat tinggi"**. 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 107,91 predikat **"sangat tinggi"**. 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 96,76 predikat **"sangat tinggi"**. 6. Meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 36,06 predikat **"sangat rendah"**. 7. Meningkatkan produksi komoditas pertanian, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 92,31 predikat **"sangat tinggi"**. 8. Meningkatkan ketahanan pangan, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 78,31 predikat **"tinggi"**. 9. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 87,60 predikat **"tinggi"**. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja perubahan 2025 yang berdasarkan RPJMD 2025-2029 ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi, pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 99,31 Predikat **"sangat tinggi"**
2. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 95,16 predikat **"sangat tinggi"**
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 120,11 predikat **"sangat tinggi"**.
4. Meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan, pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100,96 predikat **"sangat tinggi"**.
5. Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan, pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 109,52 predikat **"sangat tinggi"**.
6. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata, pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100,81 predikat **"sangat tinggi"**.
7. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat, pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 104,23 predikat **"sangat tinggi"**.
8. Meningkatkan integritas dan

profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan, , pencapaian indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100,86 predikat **"sangat tinggi"**.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kota Tomohon mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 127.842.491 dengan realisasi sebesar Rp. 102.840.982.825 tercapai sebesar (80,44%). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh Perangkat Daerah berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui pelaksanaan seluruh program dan indikator kinerja yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendata

Tabel i.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasi	1 Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6,5	5,440*	83,69*
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1 Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	7,11-7,61	5,41	76,09
		2 Indeks Gini	Poin	0,32	0,359	87,81
		3 Angka	Persentase	3,64	4,86	66,48

			kemiskinan				
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1	Indeks Pembangunan manusia	Angka	77	80,65	104,74
		2	Tingkat Pengangguran terbuka	Persentase	5,55 – 6,05	7,8	71,07
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	77,35	99,56	128,71
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Prevelensi stunting	Persentase	12	10,8*	110,00
		2	Umur harapan hidup	Tahun	72,25	75,99	105,18
5	Meningkatkan dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	88,2	80,65	91,44
		2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85	81,64	96,04
		3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persentase	99	95,82	96,79
		4	Akses air minum layak	Persentase	95	97,65	102,79
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	1397	658,36	47,13
		2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	4	1	25
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	65	60	92,31
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	Ton	37	18,4	49,73
		2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	88,6	94,7	106,29

9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71 – 75	72,22	101,72
		2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100
		3	Indeks SPBE	Nilai	3,5	3,12	89,14
		4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	4,1	2,6144*	63,77
		5	Nilai SAKIP Kota	nilai	77	64,21	83,39

Tabel i.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	1 Indeks kerukunan umat beragama	indeks	77	76,47*	99,31
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks ketahanan Pangan	Indeks	84,15	80,08	95,16

3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	67,97	81,64	120,11
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	78	78,75	100,96
5	Mewujudkan Tomohon sebagai Daerah Pariwisata maju dan berkelanjutan	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase	2.1	2,30	109,52
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80 - 80,5	80,65	100,81
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,00 – 5,50	5,41	108,20

		2	Indeks Daya saing Daerah		3.67	3,71	100,20
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71	72,22	101,72
		2	Opini BPK terhadap layanan keuangan	WTP	WTP	WTP	100

Namun sangat disadari capaian-capaian tersebut bukan tanpa halangan yang dihadapi dan masih diperlukan banyak pembenahan permasalahan yang membentang dan harus dikerjakan ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Tomohon kedepan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Kota Tomohon	3
1. Letak dan Kondisi Geografis	3
2. Geologi	4
3. Pemerintahan.....	5
C. Kelembagaan	6
1. Tugas dan Fungsi Walikota	6
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah.....	7
3. Tugas dan Fungsi Sekretaris DPRD	8
4. Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas	8
5. Tugas dan Fungsi Badan	9
6. Tugas Kecamatan.....	9
7. Struktur Organisasi.....	10
8. Sumberdaya Apratur Pemerintah Kota Tomohon	13
D. Analisis Perkembangan Stratejik.....	14

E. Isu Strategis	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategik	23
B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
1. Perencanaan Kinerja Tahun 2024	29
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	32
3. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	44
B. Realisasi Anggaran	202
C. Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Tomohon	224
BAB IV PENUTUP	230
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table i.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024	v
Table i.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2024	vii
Tabel 1.1 Kecamatan di Kota Tomohon	5
Table 1.2 Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Tomohon	10
Table 1.3 Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Berdasarkan Golongan/Ruang	12
Table 2.1 Perencanaan Kinerja dari Misi I	32
Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja dari Misi 2.....	33
Tabel 2.3 Perencanaan Kinerja dari Misi 3.....	33
Tabel 2.4 Perencanaan Kinerja dari Misi 4.....	34
Tabel 2.5 Perencanaan Kinerja dari Misi 5.....	35
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Induk Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025	36
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025 .	38
Tabel 2.8 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 202	39
Tabel 2.9 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Perubahah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025.....	41
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	45
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Sesuai PK Induk tahun 2025	46
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Sesua PK Perubahantahun 2025	48

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025	49
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Toleransi antar Umat Beragama dan Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat serta Terlaksananya Kehidupan Berdemokrasi” PK Induk Tahun 2025.....	51
Tabel 3.6 Skor Lengkap 30 Kota pada Indeks Kota Toleran 2024.....	54
Tabel 3.7 Program yang Mendukung Sasaran Srategis 1 (PK Induk Tahun 2025)..	54
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon” PK Induk Tahun 2025	57
Tabel 3.9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut lapangan usaha di Kota Tomohon (miliar rupiah), tahun 2021-2025	59
Tabel 3.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon 2021 – 2025.....	61
Tabel 3.11 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2025	65
Tabel 3.12 Persentasi Penduduk Miskin/Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2021 – 2025.....	69
Tabel 3.13 Program yang mendukung sasaran strategis 2 (PK Induk 2025).....	70
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM” PK Induk Tahun 2025	72
Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentukan Dan Kabupaten 2022-2025.....	74
Tabel 3.16 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis Kegiatan selama seminggu terakhir dan jenis kelamin.....	79
Tabel 3.17 Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten/Kota.....	80
Tabel 3.18 IPM Kabupaten/Kota Berdasarkan jenis Kelamin.....	84
Tabel 3.19 Indeks Pembangunan Gender Kota Tomohon.....	85
Tabel 3.20 Program Yang menunjang sasaran strategis 3 (PK Induk tahun 2025)	87

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat "PK Induk Tahun 2025.....	85
Tabel 3.22 Umur Harapan Hidup Kota Tomohon.....	95
Tabel 3.23 Program Yang menunjang sasaran strategis 4 (PK Induk tahun 2025)	97
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya infrastruktur dan Pembangunan kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan" PK Induk Tahun 2025.....	99
Tabel 3.25 Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tomohon.....	107
Tabel 3.26 Realisasi Akses Air Minum layak Kota Tomohon Tahun 2021-2023.....	112
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Program Yang menunjang sasaran strategis 5 (PK Induk tahun 2025)	115
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya kunjungan wisatawan Dan pemajuan budaya lokal "PK Induk Tahun 2025.....	117
Tabel 3.29 Program Yang menunjang sasaran strategis 6 (PK Induk tahun 2025)	123
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Produksi Komoditi Pertanian "PK Induk Tahun 2025.....	125
Tabel 3.31 Jumlah Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bahan pangan Jenis padi sampai tahun 2025.....	126
Tabel 3.32 Program Yang menunjang sasaran strategis 7 (PK Induk tahun 2025)	128
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Ketahanan pangan" PK Induk Tahun 2025.....	130
Tabel 3.34 Realisasi anggaran atas program yang mendukung Sasaran 8 Meningkatkan Ketahanan pangan.....	135
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dan mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baru PK Induk Tahun 2025.....	137
Tabel 3.36 Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara nasional tahun 2024 beberapa kota.....	146

Tabel 3.37 Program Yang menunjang sasaran strategis 9 (PK Induk tahun 2025)	153
Tabel 3.38 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tiap Sasaran Strategis.....	155
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya kehidupan masyarakat Yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demikrasi PK Perubahan tahun 2025.....	156
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya ketersediaan pangan Yang berkualitas dan terjangkau " (PK Perubahan tahun 2025.....	158
Tabel 3.41 Bobot Indikator Kota Berdasarkan Excpert Judgement	159
Tabel 3.42 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tomohon tahun 2021-2024...	161
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup (PK perubahan Tahun 2025)....	164
Tabel 3.44 Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tomohon tahun 2021-2024.....	166
Tabel 3.45 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya infrastruktur kota Terpadu dan berkelanjutan(PK Perubahan Tahun 2025).....	168
Tabel 3.46 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Tomohon sebagai Daerah Pariwisata maju dan berkelanjutan (PK Perubahan Tahun 2025).....	175
Tabel 3.47 PDRB atas Dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha Di Kota Tomohon tahun 2021-2025).....	177
Tabel 3.48 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya pendidikan yang berkualitas(PK Perubahan Tahun 2025).....	180
Tabel 3.49 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentukan Dan Kabupaten 2022-2025.....	181
Tabel 3.50 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya produktivitas ekonomi Dan daya saing daerah serta kesejahteraan (PK Perubahan Tahun 2025).....	184
Tabel 3.51 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut lapangan usaha di Kota Tomohon (miliar rupiah), tahun 2021-2025	186
Tabel 3.52 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon 2021 – 2025.....	188

Tabel 3.53 Indeks Daya Saing Daerah Kab/Kota tahun 2024-2025).....	191
Tabel 3.54 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya integritas dan Profesionalisme aparatur, inovasi dan digitalisasi (PK Perubahan Tahun 2025).....	195
Tabel 3.55 Efisiensi Penggunaan Sumber Data Tiap Sasaran Strategis (PK Perubahan Tahun 2025).....	200
Tabel 3.56 Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strageis PK Induk 2025).....	202
Tabel 3.57 Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strageis PK Perubahan 2025).....	216

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Kerukunan Umat Tomohon Beragama Kota Tahun 2021 - 2025	54
Gambar 3.2 Trend Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	59
Gambar 3.3 Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Gini Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	65
Gambar 3.4 Trend Target dan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	68
Gambar 3.5 Trend Target dan Realisasi Indikator IPM Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	76
Gambar 3.6 Trend Target dan Realisasi Indikator TPT Tahun 2021 – 2025.....	79
Gambar 3.7 Trend Target dan Realisasi Indikator IPG Tahun 2021 – 2025.....	83
Gambar 3.8 Trend Target dan Realisasi Indikator Prevelensi Stunting Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	91
Gambar 3.9 Trend Target dan Realisasi Indikator Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	94
Gambar 3.10 Program Penyelenggara Jalan.....	101
Gambar 3.11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....	102
Gambar 3.12 Peningkatan Jaringan Irigasi.....	103
Gambar 3.13 Trend Target dan Realisasi Indikator Infrastruktur Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	104
Gambar 3.14 Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	107

Gambar 3.15 Pembangunan IPAL Skala Pemukiman.....	110
Gambar 3.16 Trend Target dan Realisasi Indikator Presentase Rumah Tinggal Barsanitasi Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	110
Gambar 3.17 Trend Target dan Realisasi Indikator Presentase Rumah Tinggal Barsanitasi layak Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	112
Gambar 3.18 Trend Target dan Realisasi Indikator Peningkatan PAD dari Dari sektor Pariwisata 2021 – 2025.....	119
Gambar 3.19 Pelaksanaan TIFF 2025.....	120
Gambar 3.20 Trend Target dan Realisasi Indikator Lama Tinggal Wisatawan Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	122
Gambar 3.21 Penanaman dan pemanenan Padi di Kota Tomohon.....	127
Gambar 3.22 Trend Target dan Realisasi Indikator cadangan beras Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	132
Gambar 3.23 Trend Target dan Realisasi Indikator Skor Pola Harapan Ketersediaan Tahun 2021 – 2025.....	134
Gambar 3.24 Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	139
Gambar 3.25 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun.....2025.....	139
Gambar 3.26 Trend Target dan Realisasi Indikator SPBE Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	144
Gambar 3.27 Hasil Evaluasi SPBE tahun 2025.....	144
Gambar 3.28 Trend Target dan Realisasi Indikator skor kinerja penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021 – 2025.....	147
Gambar 3.29 Trend Target dan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	150
Gambar 3.30 Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025.....	150
Gambar 3.31 Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan	

Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	166
Gambar 3.32 Program Penyelenggaraan Jalan.....	170
Gambar 3.33 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....	171
Gambar 3.34 Peningkatan Jaringan Irigasi.....	172
Gambar 3.35 Trend Target dan Realisasi Indikator Infrastruktur Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	173
Gambar 3.36 Trend Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025.....	186
Gambar 3.37 Kerangka Pengukuran IDSD Tahun 2025.....	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan umum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam menjalankan kinerja Pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas, sudah dimulai sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1999 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah mulai mendorong setiap instansi pemerintah untuk mengubah orientasi kinerja output ke orientasi outcome (hasil) atau lebih sering disebut dengan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*), dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah Kota Tomohon dalam menegakkan prinsip-prinsip *good governance*, telah berupaya melaksanakan aspek-aspek reformasi birokrasi dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek manajemen perubahan, penataan perundang-undangan sebagai produk hukum daerah, kelembagaan, sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, dan pelaporan akuntabilitas.

Pelaksanaan tugas - tugas untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tomohon didukung oleh Perangkat Daerah sebagai penyelenggara administrasi, penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

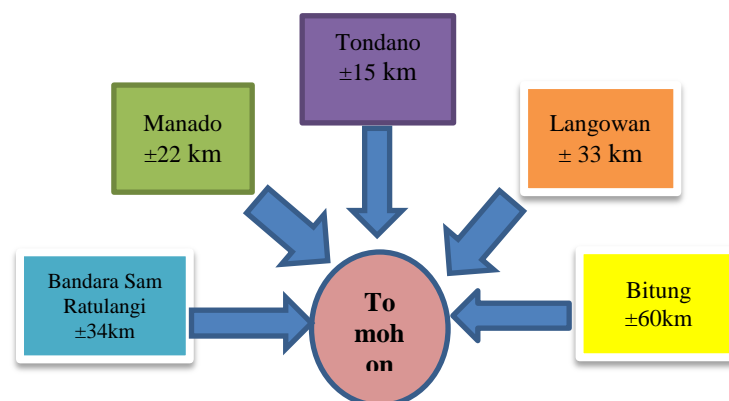
B. Kondisi Kota Tomohon

1. Letak Dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kota Tomohon berada pada 01° 18' 51" Lintang Utara dan 124° 49' 40" Bujur Timur. Kota Tomohon memiliki suhu udara sejuk sebab berada pada kawasan pegunungan dan diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon dan Mahawu.

Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Jarak Kota Tomohon dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara



Posisi kota Tomohon sangat strategis dalam konteks regional Sulawesi dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado

sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi bangkitan perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan International Bitung dan Jalan Tol Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulawesi Utara akan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.

2. Geologi

Secara geologis, Kota Tomohon memiliki kawasan cagar alam geologi yang terdapat di Kelurahan Lahendong sebagaimana dalam Perda Sulut Nomor 1 Tahun 2004 tentang RTRW Tahun 2014-2034, bahwa lokasi dimaksud memiliki keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan solfatara dan fumarola, air atau uap panas (fluida). Fenomena ini merupakan alami dari daerah yang berada pada kawasan vulkanis. Kenampakan vulkanis tersebut secara langsung adalah terdapatnya Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Lahendong yang menghasilkan panas bumi sebagai sumber energi listrik berupa Energi Baru Terbarukan (EBT).

Selain Kawasan Lahendong yang merupakan penghasil panas bumi untuk sumber energi listrik. Pada lokasi dimaksud telah menjadi tempat wisata dengan aktivitas lainnya baik bagi penduduk lokal maupun luar daerah, dimana hampir setiap harinya dijadikan lokasi pemandian air panas.

3. Pemerintahan

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003. Kegiatan pemerintahan Kota Tomohon telah dimulai tahun 2005, sebelumnya Tomohon merupakan ibu Kota kecamatan dan bagian dari Wilayah Kabupaten Minahasa. Pada tahun 2008 pemerintah Kota Tomohon meliputi 5 Kecamatan dan 40 Desa/Kelurahan kemudian pemekaran wilayah

pada tahun 2009 menjadi 44 desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 104.260 jiwa serta memiliki luas wilayah 147,21 km².

Tabel 1.1
Kecamatan di Kota Tomohon

Kecamatan	Letak Kantor Pemerintahan	Kelurahan	Lingkungan	Luas	
				Km ²	%
Tomohon Utara	Kel. Kakaskasen Tiga	10	67	42,28	28,72
Tomohon Selatan	Kel. Walian	12	84	32,95	22,38
Tomohon Tengah	Kel. Talete Dua	9	51	9,41	6,39
Tomohon Barat	Kel. Woloan Satu	8	65	40,69	27,64
Tomohon Timur	Kel. Paslaten Satu	5	32	21,88	14,86

Sumber: Kota Tomohon dalam Angka Tahun 2026

Batas-batas wilayah Kota Tomohon secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
- b. Sebelah Timur: Wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
- c. Sebelah Selatan: wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan
- d. Sebelah Barat: Wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

C. Kelembagaan

Menyadari betapa pentingnya pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon yang beragam tersebut maka Kepala Daerah dalam hal ini Walikota memegang amanat yang sangat penting dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Dalam menjabarkan tugas dan fungsinya Walikota Tomohon selaku Kepala Daerah mempunyai tugas sebagaimana Paragraf kedua pasal 25 dan pasal 27, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Tugas Dan Fungsi Walikota

a. Tugas :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah.
- 3) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, maka Walikota Tomohon selaku Kepala Daerah memiliki fungsi antara lain :

1. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon.
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon.

2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah

a. Tugas

Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan badan penunjang.

b. Fungsi

- a) penyusunan kebijakan daerah;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Badan penunjang;
- c) pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Tugas

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

- a) menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b) menyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d) menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4. Tugas Dan Fungsi Dinas-Dinas

a. Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Fungsi

- a) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Dan Fungsi Badan

a. Tugas

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

b. Fungsi

- a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tugas Kecamatan

- a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di kecamatan;
- i) Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

7. Struktur Organisasi

Bentuk dan susunan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut walikota dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan PP. No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdiri dari :

- Walikota dan Wakil Walikota
- 1 Sekretaris Daerah
- 3 Asisten
- 3 Staff Ahli
- 1 Sekretariat Dewan
- 21 Dinas
- 6 Badan
- 5 Kecamatan
- 44 Kelurahan
- 2 Perusahaan Daerah

Dalam implementasi otonomi daerah, salah satu aspek yang cukup strategis adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pasal 120 dan 128 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menyebutkan perangkat daerah Kabupaten Kota adalah sebagai pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel 1.2
Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Tomohon

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2025
1.	Sekretariat Daerah Kota	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Dinas-dinas Daerah	21
4.	Badan-badan	6
5.	Kecamatan	5
6.	Perusahaan Daerah	2

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon

Adapun perangkat daerah tersebut adalah

1. Dinas-dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
 - 2) Dinas Kesehatan Daerah.
 - 3) Dinas PU dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5) Dinas sosial
 - 6) Dinas Tenaga Kerja
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 8) Dinas Pangan
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 12) Dinas Perhubungan
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 14) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - 18) Dinas Pariwisata
 - 19) Dinas pertanian Dan Perikanan
 - 20) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 21) Satuan Polisi Pamong Praja

2. Badan-badan daerah terdiri dari :
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 3) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perusahaan Daerah, terdiri dari :
- 1) PD. Pasar Tomohon;
 - 2) PDAM Tomohon.

8. Sumberdaya Aparat Pemerintah Kota Tomohon

Sumberdaya aparatur pemerintah kota tomohon untuk Tahun 2025 sebagaimana berikut ini:

1. Jumlah ASN (PNS dan PPPK) : 2.690 orang
2. Keadaan PNS menurut Golongan :
 - Gol IV : 538 orang
 - Gol III : 1497 orang
 - Gol II : 215 orang
 - Gol I : 1 orang
3. Keadaan PPPK menurut Golongan :
 - Gol X : 21 orang
 - Gol IX : 301 orang
 - Gol VIII : 64 orang
 - Gol V : 54 Orang

Tabel 1.3
Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
Berdasarkan Golongan/Ruang

GOLONGAN PNS		RUANG				JUMLAH
		D	C	B	A	
1.	IV	1	55	228	283	567
2.	III	711	315	339	347	1712

3.	II	105	147	15	24	291
4.	I	1	0	0	0	1
GOLONGAN PNS		RUANG				
		V	VII	IX	X	JUMLAH
1.	I	54	64	301	21	440
J U M L A H PNS + PPPK						2690

Sumber: BKPSDM Daerah Kota Tomohon Tahun 2025

D. Analisis Perkembangan Strategik

Sebagai suatu organisasi yang dinamis, Pemerintah Kota Tomohon dituntut untuk mampu mengikuti perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat serta perubahan lingkungan, maupun kebijakan strategik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mampu menjadi suatu kebutuhan ketika organisasi sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Pemerintah Kota Tomohon sebagai organisasi publik harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Pemerintah Kota Tomohon diperhadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain:

1. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mempengaruhi bidang sosial budaya, kehidupan beragama
3. Pertumbuhan penduduk yang signifikan, peluang tenaga kerja dari luar yang terbuka,
4. Tantangan dalam bidang ekonomi yaitu terbukanya peluang perdagangan bebas, masuknya barang impor pertanian, perkebunan,

kehutanan, peternakan, perikanan dan bahan industry, serta rendahnya kualitas pariwisata serta perdagangan.

5. Aspek partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi terwujudnya pencapaian pelayanan prima, dimana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kontrol masyarakat dalam ragam pelayanan baik dari segi biaya, waktu, maupun persyaratan penyelenggaraan pelayanan, tanggung jawab terhadap produk layanan, sehingga praktek pelayanan diluar sistem masih sulit dikendalikan.

Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang sekaligus mempengaruhi perilaku administrasi dalam kerangka upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon yang dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Peranan kepemimpinan yang tangguh yang berfokus kepada peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia Pemerintah Kota Tomohon.
2. Perubahan perilaku dan budaya kerja baru, melalui komunikasi yang profesional, hubungan kerja yang sinergis serta pemanfaatan teknologi
3. informasi (e-government) yang dimotivasi oleh komitmen yang tinggi kepada keberhasilan pelaksanaan tugas.
4. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan yang harus tetap ditingkatkan dan dipertahankan dan telah menempatkan Pemerintah Kota Tomohondalam release BPK mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025.
5. Adanya pemetaan permasalahan kendala dan tantangan yang dihadapi serta disain metodologi yang cermat dan rencana kerja yang terinci untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

6. Penghayatan yang kuat terhadap visi, sebagai yang membangkitkan semangat dan menumbuhkan komitmen yang kuat.
7. Adanya pelatihan teknis dan fungsional, yang berorientasi kepada adanya kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama.
8. Keseimbangan yang harmonis dalam upaya memberikan penghargaan kepada perbaikan pemberian kesejahteraan bagi pegawai.

Dari faktor-faktor di atas yang mempengaruhi kondisi Rencana Strategis Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis manajemen SWOT yang uraiannya sebagai berikut:

a. Analisa Lingkungan Internal

1. Strengths (S)

- Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon
- Cakupan tupoksi yang dapat mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Dukungan kesejahteraan PNS cukup memadai.
- Memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Memiliki RPJPD, RPJMD sebagai acuan sasaran prioritas.
- Memiliki dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- Memiliki dukungan dana yang memadai.
- Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Weaknesses (W)

- Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum memenuhi kebutuhan organisasi serta penyebarannya yang belum merata.
- Belum optimalnya kualitas pelayanan administratif dan publik
- Belum optimalnya penggunaan sistim data base berbasis teknologi
- Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan dan kinerja PD

b. Analisa Lingkungan Eksternal

3. Opportunities (O)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon tahun 2021-2026
- Terbukanya Peluang investasi yang luas di Kota Tomohon seiring keberhasilan pelaksanaan event Tomohon Internasional Flower Festival.
- Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah kota dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan)
- Adanya stabilitas keamanan yang dapat menjamin stabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah
- Visi "Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera."

4. Threats (T)

- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang professional
- Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Tuntutan reformasi birokrasi dan *good governance*
- Kecenderungan egosektoral PD dibawah kementerian pembina teknis
- Eforia reformasi yang berlebihan serta interpretasi yang sempit dalam menyikapi otonomi daerah

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi dalam pencapaian indikator kinerja yang dijabarkan dalam Program sebagai berikut:

NO	PROGRAM
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
19	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
20	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
21	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
22	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
24	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
25	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
27	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
28	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN

- KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
- 30 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
- 31 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 32 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- 33 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
- 34 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- 35 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- 36 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
- 37 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
- 38 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- 39 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- 40 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- 41 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- 42 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 43 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
- 44 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- 45 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- 46 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
- 47 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
- 48 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 49 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
- 50 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
- 51 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- 52 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
- 53 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
- 54 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- 55 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
- 56 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 57 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- 58 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- 59 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
- 60 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
- 61 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
- 62 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
- 63 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- 64 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
- 65 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 66 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
- 67 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- 68 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN
- 69 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- 70 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- 71 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- 72 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- 73 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
- 74 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI
- 75 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
- 76 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
- 77 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT
- 78 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
- 79 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
- 80 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- 81 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- 82 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
- 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- KABUPATEN/KOTA
- 84 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN
- 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
- 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
- 88 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- 89 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
- 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
- 91 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- 92 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- 93 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- 94 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- 95 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
- 96 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
- 97 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- 98 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
- 99 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- 101 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- 102 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
- 103 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- 104 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- 105 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
- 106 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
- 107 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING
- 108 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

E. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tomohon di tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
2. Kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, terlindungi, dan berkarakter.
3. Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
4. Pemenuhan dan pemerataan layanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan sistem inovasi daerah.
7. Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.
8. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan smart city.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Perencanaan Kinerja merupakan janji rencana kerja Pemerintah Kota Tomohon. Perjanjian Kinerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025 adalah sasaran dan target kinerja yang mengacu pada Perda tentang RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan Perda tentang RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2025-2029 Yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada RPJMD tersebut serta hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan tersebut memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak di capai.

Rincian RPJMD tahun 2021-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

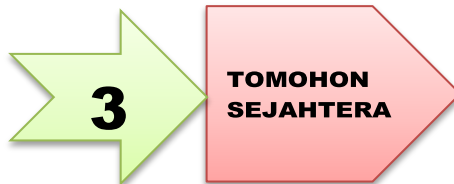
Pernyataan VISI

**“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA”**

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi dia atas memiliki makna filosofi yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.





Makna sejahtera visi pembangunan Kota Tomohon ini yakni menjadikan masyarakat kota Tomohon memiliki tata kehidupan dan penghidupan dengan penuh rasa aman, damai dan tenteram secara lahir dan batin, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Untuk merealisasikan Visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk memberikan gambaran strategis Pemerintah Kota Tomohon, ditetapkan misi sebagai berikut :

Pernyataan MISI

Guna mewujudkan Visi masa depan masyarakat Kota Tomohon, maka misi yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah :

- 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius.**
- 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.**
- 3 Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia.**
- 4 Memajukan Sistem Pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.**
- 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas.**

Pernyataan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan :

Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata

Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata yang produktif dan professional

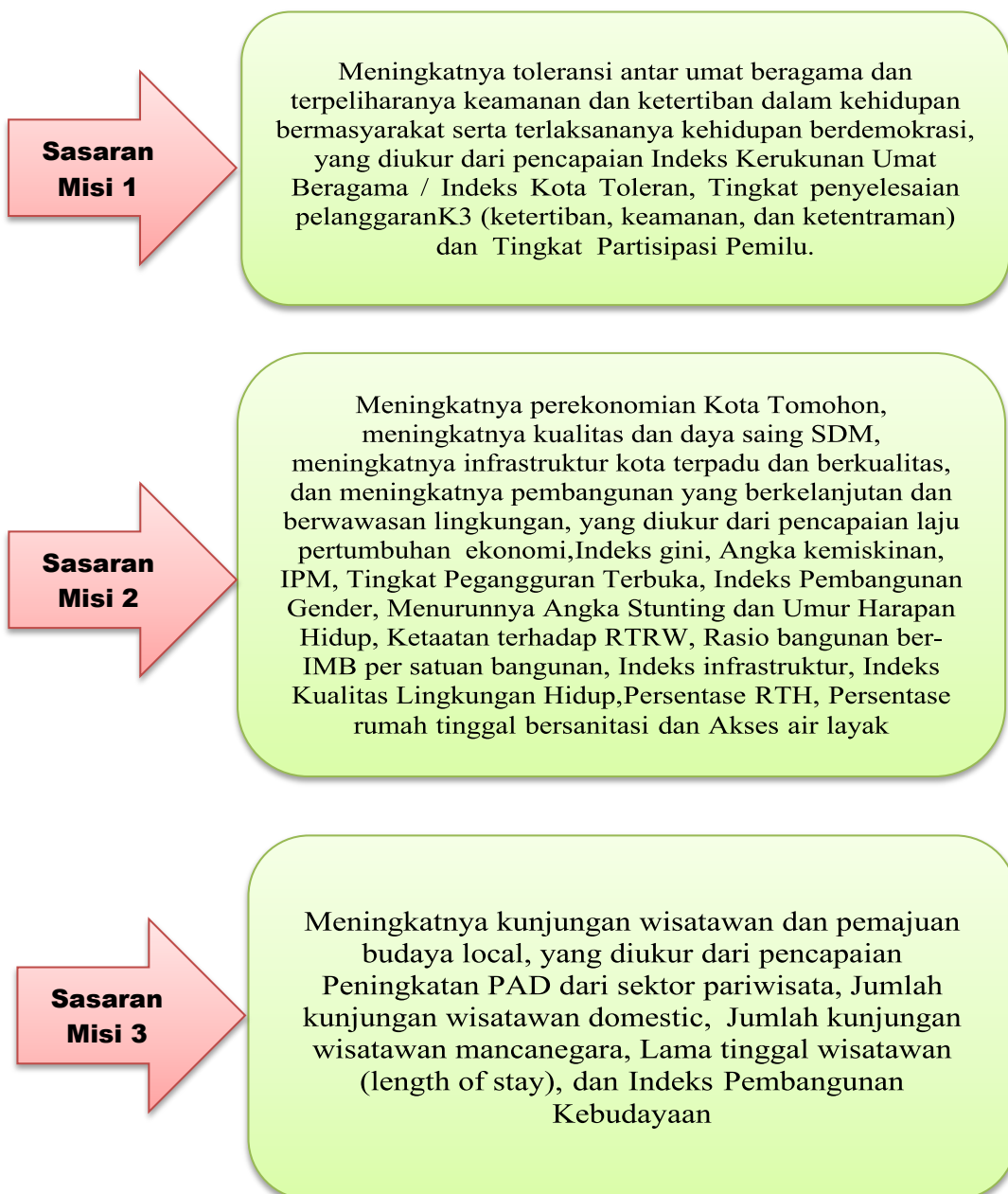
Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan

Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

Pernyataan Sasaran

Sasaran Pemerintah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 periode secara bulanan, semesteran atau tahunan melalui serangkaian program . Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Sasaran Pemerintah Kota Tomohon terdiri dari :



**Sasaran
Misi 4**

Meningkatnya produksi komoditas pertanian dan **Meningkatnya ketahanan pangan**, yang diukur dari pencapaian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Nilai Tukar Petani, Produktivitas padi per hektar, Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) dan Cadangan Beras Pemerintah Kota dan Pola Pangan Harapan.

**Sasaran
Misi 5**

melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Indeks SPBE, Persentase perangkat daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik, dan Nilai SAKIP Kota.

PERNYATAAN VISI SESUAI RPJMD TAHUN 2025-2029

“TOMOHON KOTA WISATA DUNIA, MAJU, SEJAHTERA

PENJELASAN VISI

Pernyataan Visi di atas memiliki makna filosofi yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.



MAJU

Menjadikan Tomohon sebagai kota yang maju dalam kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan kesehatan berkualitas, maju dalam pertumbuhan ekonomi, maju dalam tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Maju berarti juga untuk menjadikan masyarakat kota Tomohon memiliki tata kehidupan yang aman, damai, dan tenteram secara lahir batin dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kota Tomohon diharapkan menjadi kota yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.



**BERDAYA
SAING**

Tomohon memiliki nilai tambah dan nilai jual secara kompetitif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat dengan memperhatikan standar minimal kesejahteraan yang berkelanjutan, transparan, sehingga mampu kompetitif dengan pada persaingan antar daerah, nasional dan regional. Sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Sulawesi Utara, diperlukan optimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah potensi kepariwisataan yang ditunjang oleh penguatan sarana dan prasarana kepariwisataan. Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemanfaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar



Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan PDRB per kapita, terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berdemokrasi, serta terwujudnya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan mengurangi kesenjangan. Perlunya peningkatan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM dan peningkatan ekonomi sektor pertanian. Perlunya pengembangan pengelolaan hasil produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian di Tomohon sehingga mampu menghasilkan varietas lokal yang unggul dan berdaya saing.

PERNYATAAN MISI KOTA TOMOHON

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya. Memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan kebudayaan bangsa, serta membangun karakter kepribadian masyarakat Kota Tomohon disertai cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang beriman dan harmonis.
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.
Menjamin ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta adanya stabilisasi harga pangan. Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan lewat penerapan ekonomi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia.
Memantapkan pembangunan pariwisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, berkualitas, serta mendunia.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan tata kehidupan dan penghidupan Masyarakat Kota Tomohon untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar / pokok dengan sebaik-baiknya lewat SDM yang unggul dan berkualitas sehingga tercapai kesejahteraan.

5. Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif.

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis ilmu pengetahuan/riset dan inovatif serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

PERNYATAAN TUJUAN

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.
2. Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu
3. Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan
4. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing
5. Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel

PERNYATAAN SASARAN

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.
2. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau
3. Meningkatnya produktivitas pertanian
4. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim
7. Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan

8. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
9. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kesempatan kerja
12. Meningkatnya kualitas keluarga pemuda, dan kelompok rentan (perempuan anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender
13. Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan.
14. Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025-2029, selengkapnya diurai dalam tabel sebagai berikut :

Misi I :

Menjaga dan Melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius dan berbudaya

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja dari Misi I

TUJUAN		SASARAN	
1.1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya dan berdemokrasi	1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029

Misi 2:

Mewujudkan Ketahanan pangan dan Pembangunan Yang berwawasan Lingkungan

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja dari Misi 2

TUJUAN		SASARAN	
2.1	Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu	1.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		2.	Meningkatnya produktivitas pertanian
		3	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan
		4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		5	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029

Misi 3 :

Menjadikan Tomohon sebagai kotawisata dunia

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja dari Misi 3

TUJUAN		SASARAN	
3.1	Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	1	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029

Misi 4 :

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.4
Perencanaan Kinerja dari Misi 4

TUJUAN		SASARAN	
4.1	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan berkualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	1	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
		2	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata
		3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		4	Meningkatnya kesempatan kerja
		5	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029

Misi 5 :

Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon

Tabel 2.5
Perencanaan Kinerja dari Misi 5

TUJUAN		SASARAN	
5.1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan, efisiensi, adaptif dan akuntabel	1.	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan
		2.	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sumber: RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2025, IKU dan APBD. Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Induk Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	1 Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6,5
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1 Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	7,11 – 7,61
		2 Indeks Gini	Poin	0,32
		3 Angka kemiskinan	Persentase	3,64
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1 Indeks Pembangunan manusia	Angak	77
		2 Tingkat Pengangguran terbuka	Persentase	5,55 – 6,05
		3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angak	77,35
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1 Prevelensi stunting	Persentase	12
		2 Umur harapan hidup	Tahun	72,25
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1 Indeks infrastruktur	Indeks	88,2
		2 Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85
		3 Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persentase	99

		4	Akses air minum layak	Persentase	95
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta rupiah	1397
		2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	4
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	65
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	Ton	37
		2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	88,6
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71-75
		2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
		3	Indeks SPBE	Nilai	3,5
		4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	4,1
		5	Nilai SAKIP Kota	nilai	77

Sumber: Perjanjian Kinerja Induk Perangkat Daerah Kota Tomohon tahun 2025

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	77
2	Meningkatnya ketersediaan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,15
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,97
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	Indeks infrastruktur	Indeks	78
5	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase	2.1
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80 - 80,5
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	5,00 – 5,50
		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.67
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71
		Opini BPK terhadap Laporan keuangan	Predikat	WTP

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.8
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasi	1 Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6,5	5,440*	83,69*
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1 Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	7,11-7,61	5,41	76,09
		2 Indeks Gini	Poin	0,32	0,359	87,81
		3 Angka kemiskinan	Persentase	3,64	4,86	66,48
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1 Indeks Pembangunan manusia	Angka	77	80,65	104,74
		2 Tingkat Pengangguran terbuka	Persentase	5,55 – 6,05	7,8	71,07
		3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	77,35	99,56	128,71

4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Prevelensi stunting	Persentase	12	10,8*	110,00
		2	Umur harapan hidup	Tahun	72,25	75,99	105,18
5	Meningkatkan dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	88,2	80,65	91,44
		2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85	81,64	96,04
		3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persentase	99	95,82	96,79
		4	Akses air minum layak	Persentase	95	97,65	102,79
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	1397	658,36	47,13
		2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	4	1	25
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	65	60	92,31
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	Ton	37	18,4	49,73
		2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	88,6	94,7	106,29
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71 – 75	72,22	101,72
		2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100
		3	Indeks SPBE	Nilai	3,5	3,12	89,14

		4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	4,1	2,6144*	63,77
		5	Nilai SAKIP Kota	nilai	77	64,21	83,39

Sumber : LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025
*Memakai Realisasi Tahun 2024

Tabel 2.9
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 - 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	1 Indeks kerukunan umat beragama	indeks	77	76,47*	99,31
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks ketahanan Pangan	Indeks	84,15	80,08	95,16

3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	67,97	81,64	120,11
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	78	78,75	100,96
5	Mewujudkan Tomohon sebagai Daerah Pariwisata maju dan berkelanjutan	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase	2.1	2,30	109,52
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80 - 80,5	80,65	100,81

7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,00 – 5,50	5,41	108,20
		2	Indeks Daya saing Daerah		3.67	3,71	100,20
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparat, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71	72,22	101,72
		2	Opini BPK terhadap layanan keuangan	WTP	WTP	WTP	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Tomohon kepada masyarakat selama satu tahun. Akuntabilitas Kinerja juga merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kota Tomohon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja Utama Pemerintah sesuai Perjanjian Kerja (PK) induk dan perubahan tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja mengacu pada Tabel T-E.1 sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi

1. Jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah/ jelek adalah:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian sasaran kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik menggunakan perumusan:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Tomohon. Pada tahun 2025 merupakan masa transisi dimana Pemerintah Kota Tomohon mengakhiri pelaksanaan RPJMD Periode Tahun 2021 – 2026 dan melaksanakan RPJMD Periode Tahun 2025 – 2029, sehingga di Pemerintah Kota Tomohon terdapat dua Perjanjian Kinerja, yaitu PK Induk yang mengikuti RPJMD tahun 2021-2026 dan PK Perubahan yang mengikuti RPJMD tahun 2025 - 2029. IKU Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025 telah tercantum dalam PK Induk maupun PK Perubahan Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon sesuai PK Induk Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	1 Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6,5 ¹⁾	5,440 ¹⁾	83,69 (Tinggi)
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1 Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	7,11-7,61	5,41	76,09 (tinggi)
		2 Indeks Gini	Poin	0,32	0,359	87,81 (Tinggi)
		3 Angka kemiskinan	Persentase	3,64	4,86	66,48 (Sedang)
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1 Indeks Pembangunan manusia	Angka	77	80,65	104,74 (Sangat Tinggi)
		2 Tingkat	Persentase	5,55-	7,8	71,07

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

			Pengangguran terbuka		6,05		(Sedang)
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	77,35	100,76	130,27 (Sangat Tinggi)
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Prevalensi Stunting	Persentase	12	0,43	196,42 (Sangat Tinggi)
		2	Umur harapan hidup	Tahun	72,25	75,99	105,18 (Sangat Tinggi)
5	Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	88,2	80,65	91,44 (Sangat Tinggi)
		2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85	81,64	96,04 (Sangat Tinggi)
		3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persentase	99	95,82	96,79 (Sangat Tinggi)
		4	Akses air minum layak	Persentase	95	97,65 ²⁾	102,79 (Sangat Tinggi)
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	1.397	658,36	47,13 (Sangat Rendah)
		2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	4	1	25 (Sangat Rendah)
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	64	60	92,31 (Sangat Tinggi)
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	Ton	37	18,4	49,73 (Sangat Rendah)
		2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	88,6	94,7	106,29 (Sangat Tinggi)
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71-75	72,22	101,72 (Sangat Tinggi)
		2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100 (Sangat Tinggi)
		3	Indeks SPBE	Nilai	3,5	3,12	89,14 (Tinggi)
		4	Skor Kinerja penyelenggaraan	Skor	4,1	2,6144 ¹⁾	63,77 (Rendah)

			Pemerintah Daerah				
		5	Nilai SAKIP Kota	nilai	77	64,21	83,39 (Tinggi)

Sumber: Dari berbagai sumber

¹⁾Memakai realisasi tahun 2024.

²⁾Memakai realisasi tahun 2023

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon sesuai PK Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	1 Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks	77	76,47 ¹⁾	99,31 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,15	80,08	95,16 (Sangat Tinggi)
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,97	81,64	120,11 (Sangat Tinggi)
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	1 Indeks Infrastruktur	Indeks	78	78,75	100,96 (Sangat Tinggi)
5	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persentase	2,1	2,30	109,52% (Sangat Tinggi)
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80 – 80,5	80,65	100,81 (Sangat Tinggi)
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,00 – 5,50	5,41	108,20 (Sangat Tinggi)

	daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat	2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67	3,71	100,27 (Sangat Tinggi)
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71	72,22	101,72 (Sangat Tinggi)
		2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100 (Sangat Tinggi)

Sumber: Dari berbagai sumber
¹⁾baseline tahun 2024.

Tabel 3.4
 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumah Indikator	
			PK Induk	PK Perubahan
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	12	10
2	Tinggi	76% ≤ 90%	5	0
3	Sedang	66% ≤ 75%	2	0
4	Rendah	51% ≤ 65%	1	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	3	0
Jumlah			23	10

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025 dibahas dalam dua bagian utama yaitu, IKU Induk Tahun 2025 dan IKU Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

a. PK Induk Tahun 2025

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi”
PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target (T)	Realisasi (R)	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	6,183	6,2	6,183	99,73	6,3	6,133	97,35	6,3	5,45	86,51	6,5	5,44	83,69	6,5	5,44	83,69	6,6	82,42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																		83,69		

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi sebesar 83,69% atau kategori **“tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 1 ini sebanyak 1 indikator yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama/ Indeks Kota Toleran.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) menggabungkan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Pengukuran Indeks Kota Toleran dengan menggunakan formula perhitungan:

$$\text{Indeks Umat Beragama/ Indeks Kota Toleran} = \frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$$

Variabel 1: Hubungan Sosial
 Variabel 2: Agama dan Konflik
 Variabel 3: Kebijakan Pemerintah
 Variabel 4: Peran Organisasi Kemasyarakatan

Empat variabel pengukuran tersebut disesuaikan dengan pengukuran setara institute, yang mana:

Variabel 1: Hubungan Sosial menjadi Regulasi Pemerintah Kota

Variabel 2: Agama dan Konflik menjadi Regulasi Sosial

Variabel 3: Kebijakan Pemerintah menjadi Tindakan Pemerintah

Variabel 4: Peran Organisasi Kemasyarakatan menjadi Demografi Sosial Keagamaan

Menurut Lembaga SETARA Institusi ditetapkan 4 variabel dengan 8 indikator yang menjadi penilaian, yaitu:

1. Regulasi Pemerintah Kota

Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.

Indikator 2: Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.

2. Regulasi Sosial

Indikator 3: Peristiwa intoleransi.

Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

3. Tindakan Pemerintah

Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.

Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi.

4. Demografi Sosio-Keagamaan

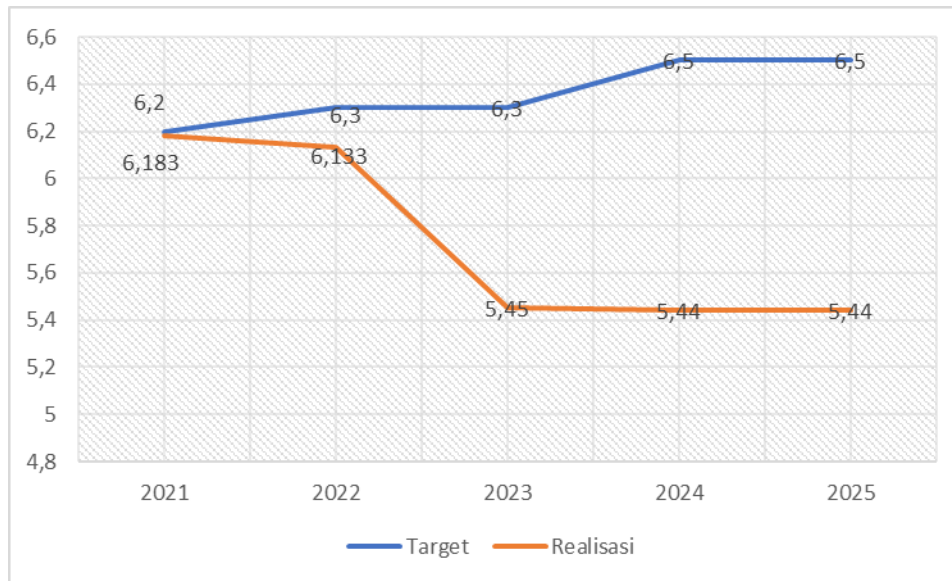
Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk.

Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.

Hasil pengukuran IKT dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. IKT Kota Tomohon tahun 2025 masih mengambil hasil publikasi SETARA Institute tahun 2024 atau menunggu publikasi pada tahun 2026. IKT Tomohon pada tahun 2025 sebesar 5,44 masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 6,5, dengan capaian 83,69 kategori “**tinggi**”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, IKT Tomohon mengalami penurunan sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, dimana pada tahun 2021 sebesar 6,183, tahun 2022 sebesar 6,133, tahun 2023 sebesar 5,45, tahun 2024 sebesar 5,44 dan tahun 2025 masih menunggu publikasi dari SETARA Institute.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 6,6, realisasi IKT Tomohon pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 82,42% dari target akhir yang ditetapkan. Pada tahun 2023, pemerintah Kota Tomohon menjadi urutan ke-17 secara nasional, tetapi pada tahun 2024 terjadi perbaikan dengan menempati urutan ke-16 secara nasional.

Gambar 3.1
Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.6
Skor Lengkap 30 Kota pada Indeks Kota Toleran 2024

No	KOTA	Regulasi Pemerintah				Regulasi Sosial				Tindakan Pemerintah				Demokrasi Agama				SKOR AKHIR
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
1	Salatiga	6,50	0,650	6,22	1,244	7,00	1,400	6,00	0,600	7,00	0,700	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,544
2	Singhawang	6,50	0,650	6,10	1,220	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	7,00	0,350	7,00	0,700	6,420
3	Semarang	6,00	0,600	6,03	1,206	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,356
4	Megalang	6,00	0,600	5,74	1,148	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	7,00	0,700	6,248
5	Pematang Siantar	5,17	0,517	5,74	1,148	7,00	1,400	4,00	0,400	7,00	0,700	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,115
6	Sukabumi	5,50	0,550	5,59	1,118	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,968
7	Bekasi	6,17	0,617	6,11	1,222	4,00	0,800	6,00	0,600	7,00	0,700	7,00	1,050	7,00	0,350	6,00	0,600	5,939
8	Kediri	5,83	0,583	5,71	1,142	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	5,00	0,500	5,925
9	Manado	6,00	0,600	5,56	1,112	6,00	1,200	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,912
10	Kupang	5,33	0,533	5,35	1,070	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,853
11	Ambon	5,00	0,500	5,20	1,040	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,840
12	Surakarta	5,83	0,583	5,80	1,160	5,00	1,000	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,743
13	Depasar	4,50	0,450	5,38	1,076	7,00	1,400	6,00	0,600	4,00	0,400	5,00	0,750	6,00	0,300	7,00	0,700	5,676
14	Bandung	5,17	0,517	4,68	0,936	5,50	1,100	7,00	0,700	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,653
15	Barjarmasin	4,83	0,483	5,57	1,114	5,50	1,100	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	4,00	0,200	5,00	0,500	5,647
16	Tomohon	5,00	0,500	5,20	1,040	7,00	1,400	4,00	0,400	6,00	0,600	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,440
17	Yogyakarta	5,00	0,500	5,44	1,088	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	0,500	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,438
18	Mojokerto	4,67	0,467	6,32	1,264	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	6,00	0,900	3,00	0,150	4,00	0,400	5,381
19	Bogor	5,33	0,533	5,17	1,034	5,00	1,000	6,00	0,600	5,00	0,500	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,317
20	Surabaya	5,33	0,533	5,05	1,010	5,00	1,000	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,293
21	Batu	5,50	0,550	5,39	1,078	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,278
22	Pangkalank	4,33	0,433	5,09	1,018	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	5,251
23	Palengkaraya	4,50	0,450	5,11	1,022	6,00	1,200	4,00	0,400	5,00	0,500	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,222
24	Madun	4,33	0,433	5,89	1,178	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,211
25	Tidore Kepulauan	4,17	0,417	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	6,00	0,900	3,00	0,150	5,00	0,500	5,207
26	Cirahi	4,67	0,467	5,89	1,178	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,195
27	Malang	4,83	0,483	4,97	0,994	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	5,00	0,500	5,177
28	Bitung	4,50	0,450	5,92	1,184	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	5,134
29	Pekalongan	4,00	0,400	5,44	1,088	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	5,038
30	Paku	4,33	0,433	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	4,973

Sumber: Indeks Kota Toleran Tahun 2024, www.setara-institute.org

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks kerukunan beragama/indeks kota toleran, yaitu:

1. Terselenggaranya kegiatan dan pembentukan kerjasama dengan mitra kerja / Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan insentif kepada para rohaniawan setiap bulannya.
3. Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan rumah ibadah.
4. Pemerintah Kota Tomohon telah menyediakan dukungan layanan keagamaan.

➤ Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks kerukunan beragama/indeks kota toleran, yaitu:

Dalam pelaksanaan indikator Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran masih terdapat politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran.

➤ Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks kerukunan beragama/indeks kota toleran, yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama dalam rangka meningkatkan sinergitas kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerima perbedaan di Kota Tomohon.
3. Menumbuhkan sifat saling percaya dan saling memahami antar masyarakat
4. Memberikan pemahaman bahwa realitas keberagaman dalam kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan sosial.
5. Memberikan bantuan bagi pembangunan/renovasi rumah ibadah dan insentif bagi para rohaniawan.

- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 1: Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi (PK Induk 2025), yaitu:

Tabel. 3.7
Program yang Mendukung Sasaran Srategis 1 (PK Induk Tahun 2025)

No.	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatPolPP

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 6 program yang mendukung sasaran strategis 1 (PK Induk Tahun 2025), 5 program dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sedangkan 1 program oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Semua program dilaksanakan pada tahun 2025 seperti juga pada tahun 2024.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon”
PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target (T)	Realisasi (R)	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	-0,41	4,8-5	1,95	40,63	5,61-6,61	5,17	92,16	6,11-6,18	5,32	87,07	6,8-7,11	4,74	69,71	7,11-7,61	5,41	76,09	7,61-8,11	71,09
2	Indeks Gini	Poin	0,360	0,35	0,354	98,86	0,34	0,374	90,00	0,33	0,339	97,27	0,31	0,336	91,61	0,32	0,359	87,81	0,295	78,31
3	Angka kemiskinan	%	5,6	5,4	5,69	94,63	5,46-4,86	5,26	103,66	4,2	5,60	66,67	3,92	5,38	62,76	3,64	4,86	66,48	3,36	55,36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																		76,79		

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya perekonomian Kota Tomohon sebesar 76,79% atau kategori **“tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 2 ini sebanyak 3 indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan angka kemiskinan.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Indikator laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan formula:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_{rt} - PDRB_{rt-1}}{PDRB_{rt-1}} \times 100\%$$

dimana:

rt = tahun pengamatan PDRB

rt - 1 = tahun pengamatan PDRB sebelumnya.

Sesuai data, maka dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025, yaitu:

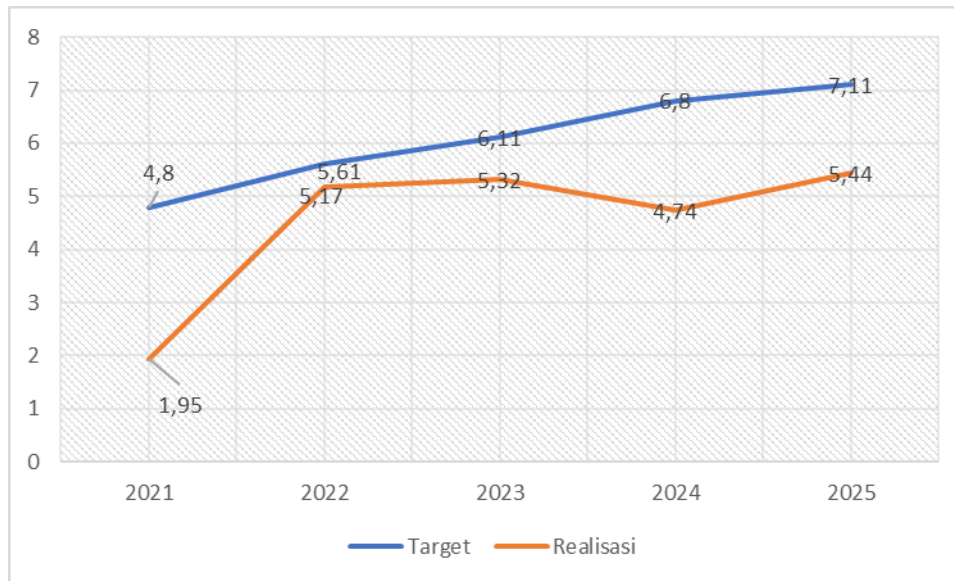
PDRB tahun 2025 = 3.927,94 (miliar rupiah)

PDRB tahun 2023 = 3.726,48 (miliar rupiah)

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025} = \frac{3.927,94 - 3.726,48}{3.726,48} \times 100\% = 5,41\%$$

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 5,41% masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 7,11% – 7,61%, dengan capaian 76,09% kategori **“tinggi”**. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon berfluktuatif sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, dimana pada tahun 2021 sebesar 1,95%, tahun 2022 sebesar 5,17%, tahun 2023 sebesar 5,32%, tahun 2024 sebesar 4,71% dan tahun 2025 sebesar 5,41%.

Gambar 3.2
Trend Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota
Tomohon (miliar rupiah), Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024**	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	420,8	452,8	481,5	508,95	541,87
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	300,3	314,6	326,8	331,79	358,17
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	204,4	216,6	228,4	239,11	259,66
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	9,9	10,8	11,3	11,78	12,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	15,7	16,0	16,0	16,46	17,52
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	726,8	738,3	768,1	775,80	775,96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	348,5	375,8	406,3	431,26	451,45
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	134,5	42,9	153,2	165,15	173,62
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	59,2	65,5	72,9	78,82	94,25
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	141,5	153,7	162,3	173,60	187,48

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	71,4	67,5	65,8	68,49	71,06
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	133,6	138,2	141,7	149,41	158,76
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,4	1,5	1,6	1,76	1,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	183,1	186,9	192,4	211,40	219,93
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	85,6	93,0	100,3	109,37	115,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	302,6	323,5	339,3	353,09	381,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	72,3	80,5	90,0	100,25	107,88
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		3.211,9	3.378,0	3.557,7	3.726,48	3.927,94

Sumber: Tomohon dalam Angka 2026, BPS Kota Tomohon

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 didorong oleh semua sektor yang bertumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya. Sektor yang paling pesat pertumbuhannya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,58%. Sedangkan sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar Kota Tomohon hanya bertumbuh sebesar 0,02%. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum didorong oleh pelaksanaan TIFF (*Tournament International Festival Flower*) yang diadakan Pemerintah Kota setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2025, pelaksanaannya berhasil dan mampu menggerakkan atau mendongkrak pertumbuhan PDRB dengan signifikan. Secara lebih rinci, pertumbuhan dari berbagai sektor PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kota Tomohon 2021 - 2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,35	7,60	6,35	5,70	6,47	L Real Estat/Real Estate Activities	-2,35	3,50	2,48	5,48	6,25
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,98	4,75	3,88	1,53	7,95	M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,26	4,60	7,71	7,93	4,35
C Industri Pengolahan/Manufacturing	4,93	5,94	5,46	4,69	8,60	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,16	2,06	2,92	9,90	4,03
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,43	9,39	4,05	4,63	1,90	F Jasa Pendidikan/Education	4,00	8,70	7,82	9,06	5,58
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,10	2,10	-0,37	3,19	6,43	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	9,30	6,90	4,87	4,07	7,91
F Konstruksi/Construction	2,14	1,57	4,04	1,01	0,02	R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	3,30	11,30	11,88	11,36	7,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,96	7,81	8,13	6,14	4,68	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	1,95	5,17	5,32	4,74	5,41
H Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	1,63	6,16	7,25	7,77	5,13						
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,37	10,65	11,25	8,18	19,58						
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,35	8,60	5,56	6,99	8,00						
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,27	-5,47	-2,51	4,02	3,76						

Sumber: Tomohon dalam Angka 2026, BPS Kota Tomohon

Sesuai target akhir tahun RPJMD 2021 – 2026 sebesar 7,61%-8,11%, realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 71,09% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2025, masih lebih kecil dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Utara yang sebesar 5,66% tetapi lebih besar dari nasional yang sebesar 5,11%.

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pelaksanaan TIFF 2025 yang mampu mendongkrak sektor – sektor seperti akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan sebesar 19,58% dan sektor jasa lainnya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,62%;
2. Intervensi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam pemberdayaan UMKM;
3. Kemudahan perijinan dalam investasi di Kota Tomohon;

4. Perkembangan informasi dan teknologi yang memungkinkan pengusaha terutama UMKM memasarkan hasil produksinya melalui media online;
 5. Terpeliharanya suasana kondusif di Kota Tomohon yang menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha;
 6. Adanya program kegiatan dari pemerintah pusat seperti makanan bergizi gratis yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dari warga masyarakat, dari sisi harga bahan pokok tertentu yang stabil, atau dari penyerapan tenaga kerja.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Melonjaknya harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama beberapa jenis bahan pokok terutama saat hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, Paskah, Idul Fitri;
 2. Pilihan lapangan pekerjaan yang relatif terbatas di Kota Tomohon;
 3. Perkembangan sektor konstruksi yang relatif sama seperti tahun 2024;
 4. Pilihan profesi berusaha dari kaum muda yang lebih fokus kepada pekerjaan – pekerjaan yang mudah, langsung berdampak, dan keuntungannya besar. Beberapa daerah di Kota Tomohon, telah kekurangan petani usia muda dikarenakan kaum mudanya lebih memilih berprofesi sebagai kurir makanan, sopir, tukang, pegawai, atau pekerjaan di media sosial.
- Strategi/solusi pemecahan masalah yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Melaksanakan TIFF secara berkala setiap tahunnya sambil terus melakukan peningkatan dari segi promosi, keterlibatan masyarakat, dampak terhadap ekonomi masyarakat, dan kualitas event;
 2. Mendorong pertumbuhan UMKM dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan membuka lokasi usaha strategis, seperti kawasan pusat kota;

3. Mempermudah perijinan dalam investasi di Kota Tomohon;
4. Tetap menjaga suasana kota yang kondusif dengan meningkatkan keamanan di lingkungan masing – masing, melakukan penataan kota untuk mejamin keasrian kota, serta mempererat keharmonisan antar umat beragama;
5. Mengefektifkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di Kota Tomohon;
6. Melakukan upaya – upaya mendapatkan tambahan dana pembangunan melalui usulan dan proposal ke Kementrian/Lembaga.
7. Bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menunjang program strategis nasional, seperti makanan bergizi gratis dan koperasi merah putih;
8. Menurunkan angka kemiskinan secara signifikan;
9. Mengadakan operasi pasar terutama harga bahan pokok untuk menstabilkan harga;
10. Meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dengan berbagai intervensi pemerintah menyangkut kebijakan dan implementasinya;
11. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.

2. Indeks Gini

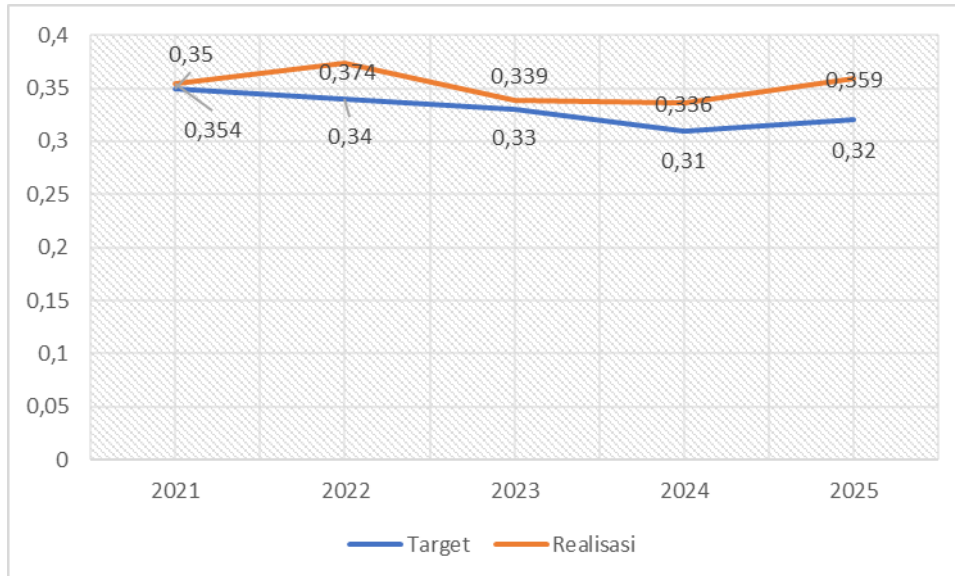
Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Ini merupakan ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip indenpendensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu daerah yang diukur), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk) dan prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan lainnya konstan). Indeks Gini sama dengan 0 menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna) sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Tafsiran dari nilai Indeks Gini sebagai berikut:

1. terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang,
2. terletak antar 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang,
3. terletak antara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Realisasi indeks gini untuk Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 0,359 masih di atas target yang ditetapkan sebesar 0,32 dengan capaian 87,81 kategori “tinggi”. Ini merupakan batas atas dari penilaian pendapatan yang merata. Oleh karena itu harus ada upaya – upaya untuk menurunkan indeks gini minimal dikisaran 0,3. Pertumbuhan kota memang menyediakan kemudahan berusaha, sarana fasilitas dan pelayanan yang lebih bermutu, dan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Tetapi, harus disadari bahwa dampak negatif yang ditimbulkan harus segera diatasi seperti bertambahnya kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah faktor utama meningkatnya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,8% tetapi untuk tingkat pengangguran terbuka masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sampai tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka 7,8%. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, realisasi di tahun 2025 paling tinggi, dimana pada tahun 2021 sebesar 0,354, tahun 2022 sebesar 0,374, tahun 2023 sebesar 0,339, tahun 2024 sebesar 0,336, dan tahun 2025 sebesar 0,359.

Sesuai target akhir RPMJD tahun 2021- 2026, sebesar 0,295, realisasi pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 78,31% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi indeks gini pada tahun 2025 menjadi terbesar kedua setelah Kota Bitung dan melebihi Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 0,343 tetapi masih lebih rendah dari nasional yang sebesar 0,363.

Gambar 3.3
Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Gini Kota Tomohon
Tahun 2021 – 2025



Tabel 3.11
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023 - 2025

Nama Daerah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Sulawesi Utara	0.37	0,360	0,343
Bolaang Mongondow	0.311	0,320	0,354
Minahasa	0.327	0,341	0,308
Kepulauan Sangihe	0.356	0,321	0,312
Kepulauan Talaud	0.339	0,289	0,315
Minahasa Selatan	0.35	0,324	0,299
Minahasa Utara	0.408	0,338	0,359
Bolaang Mongondow Utara	0.38	0,374	0,338
Kepulauan Sitaro	0.366	0,354	0,307
Minahasa Tenggara	0.32	0,302	0,323
Bolaang Mongondow Selatan	0.31	0,296	0,305
Bolaang Mongondow Timur	0.324	0,335	0,321
Kota Manado	0.406	0,382	0,342
Kota Bitung	0.371	0,374	0,364
Kota Tomohon	0.339	0,336	0,359
Kota Kotamobagu	0.375	0,357	0,305

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks gini, yaitu:
 1. Akses pendidikan yang layak bagi semua masyarakat memberikan peluang yang relatif sama bagi semua lapisan masyarakat terhadap pekerjaan layak dengan pendapatan yang baik;
 2. IPM Kota Tomohon yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya mengartikan fokus pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota menempatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif sehingga memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan;
 3. Upah yang relatif setara bagi semua lapisan masyarakat;
 4. Turunnya angka kemiskinan.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks gini, yaitu:
 1. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih cukup tinggi berpengaruh kepada perbedaan pendapatan di masyarakat terutama pada golongan usia kerja antara yang bekerja dan tidak bekerja;
 2. Masih terbatasnya pekerjaan di daerah yang menuntut pendidikan yang tinggi seperti sarjana;
 3. Masih kurangnya investasi mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Harapannya dengan adanya peningkatan investasi di sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks gini, yaitu:
 1. Mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran;
 2. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar, pendidikan dasar dan kesehatan dan perluasan akses ke fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan
 3. Menekan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan bantuan untuk masyarakat miskin termasuk perhatian khusus bagi anggota masyarakat yang termasuk miskin ekstrim;

4. Membuka kerjasama dengan pihak swasta terutama untuk usaha – usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal seperti minimarket, rumah makan restoran dan hotel.
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan angkatan kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja;
6. Menyelenggarakan bantuan sosial, terutama kepada lansia dan penyandang disabilitas untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan meringankan biaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

3. Angka Kemiskinan

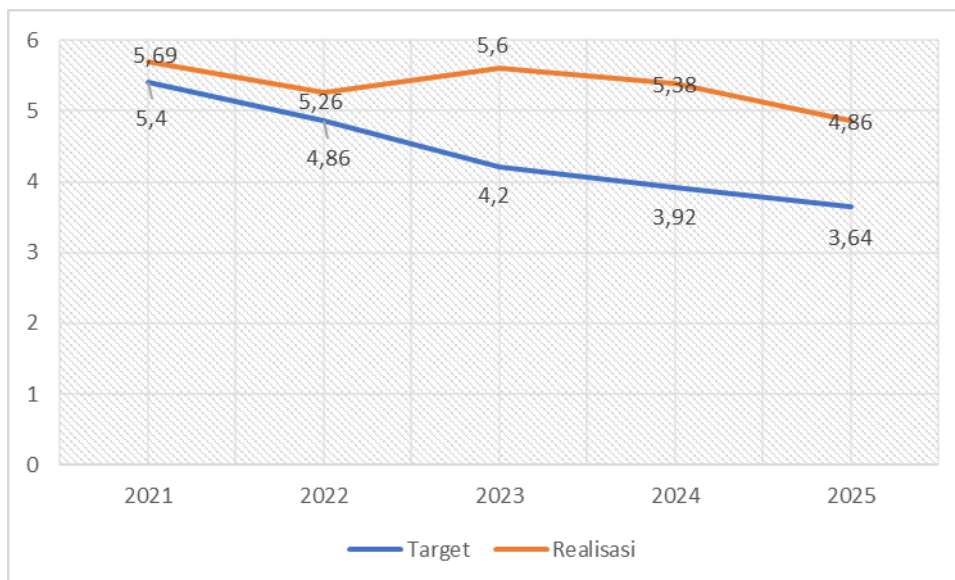
Sebagaimana amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi urusan prioritas. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Realisasi angka kemiskinan untuk Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 4,86% masih di atas target yang ditetapkan sebesar 3,64% dengan capaian 66,48% kategori “sedang”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, angka kemiskinan pada tahun 2025 merupakan yang terendah sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, dimana untuk tahun 2021 sebesar 5,69%, tahun 2022 sebesar 5,26%, tahun 2023 sebesar 5,60%, tahun 2024 sebesar 5,38% dan tahun 2025 sebesar 4,86%.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 3,36%, realisasi angka kemiskinan Tomohon pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 55,36% dari target akhir yang ditetapkan.

Walaupun demikian, realisasi pada tahun 2025 menjadikan Tomohon sebagai daerah yang paling rendah angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini juga jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 6,62% dan nasional yang sebesar 8,25%. Penurunan angka kemiskinan di Kota Tomohon tidak dikarenakan menurunnya jumlah penduduk tetapi memang terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 6.070 jiwa di tahun 2024 menjadi 5.550 jiwa di tahun 2025. Selain itu, penurunan angka kemiskinan di Kota Tomohon merupakan prestasi yang luar biasa mengingat garis kemiskinan di Kota Tomohon merupakan tertinggi kedua setelah Manado di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar Rp.573.165. Dengan tingginya garis kemiskinan, maka kemungkinan akan lebih banyak orang digolongkan miskin. Ini berarti masyarakat di Kota Tomohon secara umum mempunyai pendapatan per bulan lebih dari garis kemiskinan.

Gambar 3.4
Trend Target dan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2024



Tabel 3.12
 Persentasi Penduduk Miskin/Angka Kemiskinan Menurut
 Kabupaten/Kota (%) Tahun 2021 – 2025

Kab/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Bolaang Mongondow	7.58	7.04	7.37	7.74	6,98
Kab. Minahasa	7.67	7.05	6.87	6.53	5,88
Kab. Kepulauan Sangihe Talaud	11.02	10.50	11.01	10.8	10,91
Kab. Kepulauan Talaud	9.00	8.25	8.46	8.17	8,34
Kab. Minahasa Selatan	9.37	9.00	8.89	8.97	8,26
Kab. Minahasa Utara	7.11	6.60	6.65	6.95	6,05
Kab. Bolaang Mongondow Utara	8.03	7.31	7.90	7.88	7,15
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	8.94	8.20	8.76	8.32	8,32
Kab. Minahasa Tenggara	12.47	11.78	11.84	11.7	10,31
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12.85	11.92	12.04	11.3	10,52
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.10	5.85	5.80	5.87	5,32
Kota Manado	6.19	5.85	5.79	5.43	4,99
Kota Bitung	6.43	6.20	6.56	6.27	5,81
Kota Tomohon	5.69	5.26	5.60	5.38	4,86
Kota Kotamobago	5.74	5.19	5.03	5.12	5,14
Sulawesi Utara	7.77	7.28	7.38	7.25	6,71

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator angka kemiskinan, yaitu:
 1. Komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program – program pengentasan kemiskinan yang juga menunjang program strategis nasional;
 2. Kenaikan rata – rata upah buruh per hari;
 3. Peningkatan infrastruktur dan sistem pelayanan yang menjamin hak masyarakat mendapat layanan pendidikan dan kesehatan bermutu;
 4. Terjadi peningkatan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator angka kemiskinan, yaitu:
 1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
 2. Lingkungan perumahan yang padat dan berdesakan di beberapa tempat di Kota Tomohon menciptakan kondisi kumuh yang sangat erat dengan persepsi kemiskinan.

- Strategi/solusi pemecahan masalah atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator angka kemiskinan, yaitu:
 1. Pelaksanaan program – program pengentasan kemiskinan seperti pemberian bantuan sosial, bantuan renovasi untuk rumah layak huni, pendataan potensi – potensi daerah rawan kemiskinan, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jaminan sosial.
 2. Peningkatan anggaran perlindungan dan jaminan sosial;
 3. Peningkatan rehabilitasi sosial;
 4. Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan;
 5. Melakukan pemberdayaan sosial dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan; dan
 6. Pemerintah Kota Tomohon harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan program lainnya, menjaga upah minimum untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat, menjaga perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, dan melakukan banyak pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan keterampilan.

- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 2: Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon (PK Induk 2025)

Tabel 3.13
Program yang Mendukung Sasaran Strategis 2 (PK Induk 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

6	Program Pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
11	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
13	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
14	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 19 program yang mendukung sasaran strategis 2 (PK Induk Tahun 2025) tetapi dalam pelaksanaan tahun 2025 hanya 14 program yang tertata di APBD. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2024, hanya dilaksanakan 12 program. Pelaksanaan program tersebut oleh 3 PD, yaitu: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Tabel 3.14
 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM”
 PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target (T)	Realisasi (R)	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Indeks Pembangunan manusia	Angka	76,69	77	78,09	101,42	76,72	78,65	102,52	76,81	79,29	103,23	76,93	80,06	104,07	77	80,65	104,74	77,14	104,55
2	Tingkat Pengangguran terbuka	%	8,99	7,5	8,84	82,13	7,02 - 7,73	8,11	95,08	6,55 - 7,05	8,52	79,15	6,05 - 6,55	7,79	81,07	5,55 - 6,05	7,8	71,07	5,05-5,55	59,46
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	76,69	77	98,95	128,51	77,1	99,00	128,40	77,25	99,32	128,57	77,3	99,56	128,80	77,35	100,76	130,27	77,8	129,51
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																		102,03		

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas dan daya saing SDM sebesar 102,03% atau kategori **“sangat tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 3 ini sebanyak 3 indikator yaitu indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan gender. Ketiga indikator ini mempunyai realisasi yang baik di tahun 2025. IPM Kota Tomohon semakin naik setiap tahunnya bahkan melampaui target. Tingkat pengangguran menurun menembus nilai 7 yang pada tahun – tahun sebelumnya pada nilai 8, walaupun memang masih tergolong tinggi dan perlu mendapat perhatian serius. Nilai IPG sepanjang tahun 2021 sampai 2025 berada pada nilai 90 lebih.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dipakai ukuran Umur Harapan Hidup, untuk dimensi pengetahuan dipakai ukuran Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah, sedangkan untuk dimensi standar hidup layak dipakai ukuran Rata – Rata Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun.

Umur harapan hidup di Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 75,99 tahun, naik setiap tahunnya dan merupakan tertinggi di Propinsi Sulawesi Utara. Hasil ini lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Utara yang sebesar 74,44 tahun dan nasional yang sebesar 74,47 tahun.

Begitu juga dengan harapan lama sekolah di Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 14,39 tahun, naik setiap tahunnya dan merupakan tertinggi di Propinsi Sulawesi Utara. Hasil ini lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Utara yang sebesar 12,98 tahun dan nasional yang sebesar 13,30 tahun

Tabel 3.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentuk dan
Kabupaten Kota, 2022 - 2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir ¹ (tahun)				Harapan Lama Sekolah (tahun)				Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bolaang Mongondow	71,68	71,94	72,16	72,48	11,61	11,63	11,65	11,82	8,17	8,36	8,38	8,49
Minahasa	74,68	74,96	75,22	75,60	14,17	14,18	14,19	14,20	9,82	10,11	10,23	10,25
Kepulauan Sangihe	74,24	74,49	74,70	75,02	12,59	12,60	12,61	12,80	8,49	8,64	8,65	8,70
Kepulauan Talaud	72,96	73,25	73,51	73,92	12,65	12,66	12,67	12,84	9,73	9,91	9,96	9,97
Minahasa Selatan	73,76	74,07	74,35	74,74	12,98	12,99	13,02	13,03	9,19	9,41	9,43	9,53
Minahasa Utara	74,26	74,50	74,70	75,02	13,06	13,07	13,08	13,27	10,18	10,30	10,35	10,36
Bolaang Mongondow Utara	73,15	73,41	73,63	73,93	12,34	12,38	12,39	12,58	8,57	8,58	8,61	8,63
Siau Tagulandang Biaro	74,08	74,40	74,67	75,10	12,02	12,03	12,04	12,05	9,21	9,25	9,43	9,51
Minahasa Tenggara	72,84	73,11	73,36	73,71	12,44	12,45	12,60	12,61	9,12	9,13	9,14	9,16
Bolaang Mongondow Selatan	70,61	70,80	70,94	71,14	12,31	12,33	12,34	12,35	8,16	8,17	8,28	8,38
Bolaang Mongondow Timur	73,00	73,25	73,45	73,73	11,88	11,90	11,91	12,11	8,09	8,27	8,29	8,30
Kota Manado	74,78	75,02	75,24	75,58	14,17	14,19	14,20	14,21	11,43	11,44	11,46	11,52
Kota Bitung	73,98	74,22	74,43	74,76	12,65	12,66	12,67	12,88	9,91	9,94	9,96	10,05
Kota Tomohon	74,93	75,28	75,57	75,99	14,23	14,24	14,38	14,39	10,75	10,99	11,03	11,04
Kota Kotamobagu	74,37	74,70	74,97	75,37	12,89	12,90	13,05	13,25	10,32	10,33	10,35	10,36
SULAWESI UTARA	73,59	73,85	74,08	74,44	12,95	12,96	12,97	12,98	9,68	9,77	9,84	9,91

Provinsi	Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)				IPM			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Bolaang Mongondow	10.614	10.915	11.507	11.756	69,82	70,48	71,14	71,83
Minahasa	12.690	13.027	13.681	14.035	77,72	78,48	79,26	79,73
Kepulauan Sangihe	11.631	11.946	12.409	12.839	73,35	73,94	74,43	75,18
Kepulauan Talaud	8.869	9.146	9.512	9.953	71,53	72,22	72,83	73,68
Minahasa Selatan	11.717	12.090	12.529	12.986	74,5	75,25	75,79	76,47
Minahasa Utara	11.593	11.958	12.412	12.846	75,92	76,5	77,05	77,76
Bolaang Mongondow Utara	9.285	9.652	10.170	10.434	70,39	70,97	71,66	72,28
Siau Tagulandang Biaro	8.401	8.742	9.062	9.335	70,18	70,81	71,55	72,17
Minahasa Tenggara	10.753	11.034	11.511	11.981	72,56	72,97	73,68	74,28
Bolaang Mongondow Selatan	9.238	9.593	10.114	10.519	68,66	69,17	69,92	70,54
Bolaang Mongondow Timur	9.390	9.741	10.191	10.600	69,35	70,09	70,68	71,43
Kota Manado	14.399	14.822	15.301	15.755	80,96	81,4	81,86	82,40
Kota Bitung	12.665	12.954	13.539	13.804	75,94	76,33	76,9	77,57
Kota Tomohon	12.268	12.488	13.045	13.503	78,65	79,29	80,06	80,65
Kota Kotamobagu	11.151	11.452	12.074	12.337	75,56	76,01	76,86	77,49
SULAWESI UTARA	11.179	11.497	11.998	12.450	74,52	75,04	75,68	76,32

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

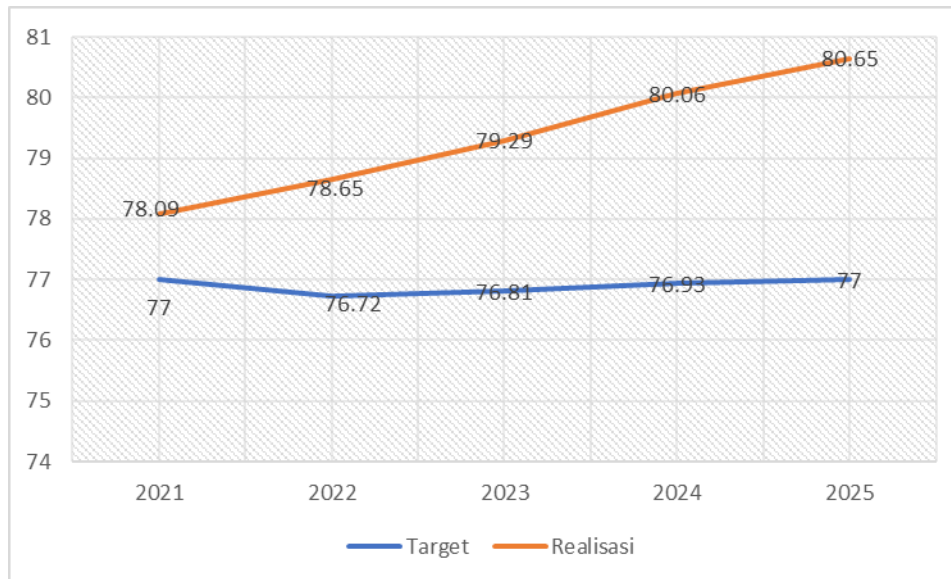
Pada komponen rata – rata lama sekolah, Kota Tomohon pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,04 tahun. Ini menjadikan Tomohon sebagai tertinggi kedua setelah Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini juga lebih tinggi dari pada Sulawesi Utara yang sebesar 9,91 tahun dan nasional yang sebesar 9,07 tahun.

Pada komponen Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun, Kota Tomohon pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp.13,50 juta dan merupakan tertinggi keempat di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar Rp.12,45 juta dan nasional yang sebesar Rp.12,8 juta.

Secara umum, IPM Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 80,65 melampaui target yang ditetapkan sebesar 77 dengan capaian 104,74% kategori “sangat tinggi”. IPM Kota Tomohon naik secara signifikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 sebesar 78,09, tahun 2022 sebesar 78,65, tahun 2023 sebesar 79,29, tahun 2024 sebesar 80,06, dan tahun 2025 sebesar 80,65.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 77,14 realiasi IPM Kota Tomohon tahun 2025 lebih dari target akhir yang ditetapkan dengan capaian 104,55%. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025 IPM Kota Tomohon berada pada urutan kedua tertinggi setelah Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini jauh lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 76,32 dan nasional yang sebesar 75,90.

Gambar 3.5
Trend Target dan Realisasi Indikator IPM Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator IPM, yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi, dan renovasi ruang kelas; serta peningkatan kualitas tenaga pengajar di Kota Tomohon;
2. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang memiliki latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, pemberian bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu, pemberian bantuan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi;
3. Penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi dan renovasi ruang kelas;
4. Kemitraan dengan lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta;
5. Peningkatan tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat di setiap pusat-pusat layanan kesehatan;
6. Peningkatan sarana prasarana dan layanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kelurahan;
7. Adanya dua Rumah Sakit Swasta dan satu Rumah Sakit Pemerintah di Kota Tomohon;

8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon yang meningkatkan daya beli masyarakat
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator IPM, yaitu:
 1. Kebutuhan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan jumlah siswa;
 2. Kebiasaan yang kurang sehat di beberapa tempat dalam masyarakat yang berdampak pada resiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes yang menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan umur harapan hidup.
 3. Kenaikan harga bahan pokok yang cenderung melemahkan daya beli masyarakat terutama pada hari raya seperti Natal, Tahun Baru, Paskah dan Idul Fitri.
 - Strategi/solusi diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator IPM, yaitu
 1. Peningkatkan kuantitas tenaga pendidik dengan mengangkat tenaga pendidik honorer menjadi PNS ataupun P3K;
 2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang kebiasaan hidup sehat baik secara langsung maupun dengan himbauan melalui media massa seperti radio dan pamflet;
 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi PNS dan masyarakat serta mendorong kampanye perilaku hidup sehat melalui puskesmas di setiap kecamatan;
 4. Melakukan pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis pada puskesmas di setiap kecamatan;
 5. Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara rutin untuk memantau dan menyeimbangkan harga bahan pokok terutama menjelang hari raya.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang termasuk dalam kategori mereka yang tidak memiliki

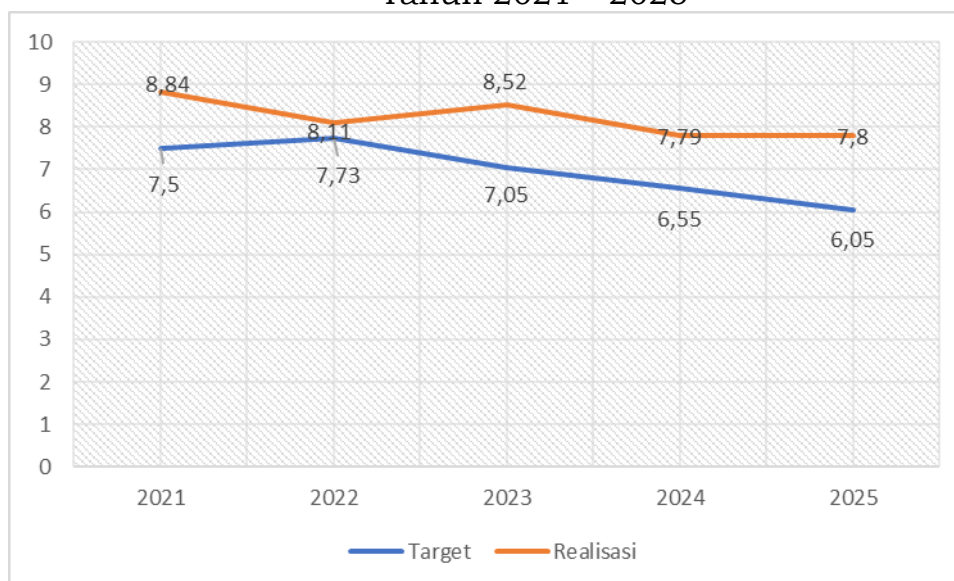
pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. TPT dihitung dengan formula (sesuai Permendagri 54 tahun 2010), yaitu:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$$

Sesuai data, maka diketahui jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja pada tahun 2025 sebanyak 4.120 dan jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2025 sebanyak 52.833, sehingga TPT pada tahun 2025, yaitu $\frac{4.120}{52.833} \times 100\% = 7,80\%$. Realisasi ini masih di atas target yang ditetapkan sebesar 5,55% - 6,05% dengan capaian 71,07% kategori “sedang”.

Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, TPT Kota Tomohon cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun memang ada kenaikan sebesar 0,01 antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja di tahun 2024 sebesar 4.032 jiwa. Ini berarti naik sebesar 88 jiwa selang tahun 2024 sampai 2025. Realisasi tiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,84%, tahun 2022 sebesar 8,11%, tahun 2023 sebesar 8,52%, tahun 2024 sebesar 7,79% dan tahun 2025 sebesar 7,8%.

Gambar 3.6
Trend Target dan Realisasi Indikator TPT
Tahun 2021 – 2025



Tabel 3.16
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon Tahun
2025

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Labour force	32.818	20.015	52.833
1. Bekerja/Working	30.438	18.275	48.713
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	2.380	1.740	4.120
II. Bukan angkatan kerja/Not in labour force	8.419	20.707	29.126
1. Sekolah/Attending school	2.639	3.189	5.828
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	2.882	15.288	18.170
3. Lainnya/Others activities	2.898	2.230	5.128
Jumlah/Total	41.237	40.722	81.959

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2026

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 5,05% - 5,55%, realisasi TPT pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 59,46% dari target akhir yang ditetapkan. Walaupun dari tahun

2021 sampai tahun 2025 Pemerintah Kota Tomohon telah mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar satu digit, hasil ini masih jauh dari yang diinginkan. Hasil pada tahun 2025 mencatatkan Kota Tomohon sebagai tertinggi kedua setelah Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini jauh lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 5,99% dan nasional yang sebesar 4,85%.

Tabel 3.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2021 – 2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bolaang Mongondow	4.85	4.96	4.61	4.48	4,97
Minahasa	6.14	7.00	7.65	7.22	7,74
Kepulauan Sangihe	4.72	2.87	2.56	2.50	2,64
Kepulauan Talaud	2.30	3.67	3.10	3.06	3,40
Minahasa Selatan	4.90	5.77	4.98	4.79	4,77
Minahasa Utara	8.12	7.09	7.17	6.73	6,80
Bolaang Mongondow Utara	5.23	5.10	4.48	4.10	4,07
Kepulauan Sitaro	3.39	2.96	2.09	1.94	2,41
Minahasa Tenggara	3.39	3.43	2.84	2.76	3,38
Bolaang Mongondow Selatan	4.60	2.75	2.55	2.51	2,91
Bolaang Mongondow Timur	5.99	6.19	5.35	5.35	5,28
Kota Manado	12.17	10.47	8.85	8.73	8,51
Kota Bitung	9.96	8.56	7.82	7.51	7,35
Kota Tomohon	8.84	8.11	8.52	7.79	7,80
Kota Kotamobagu	7.32	6.59	6.34	5.72	5,97
Sulawesi Utara	7.06	6.61	6.10	5.85	5,99

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator TPT, yaitu:
 1. Mendorong pertumbuhan UMKM dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan membuka lokasi usaha strategis, seperti kawasan pusat kota;
 2. Meningkatkan investasi terutama untuk sektor – sektor yang menyerap tenaga kerja lokal;
 3. Membuka kesempatan seluas luasnya untuk peluang bekerja di luar daerah.

- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator TPT, yaitu:
 1. Pilihan jenis pekerjaan masih sedikit dan belum mampu menampung pekerja lulusan yang lebih tinggi;
 2. Nilai investasi yang masih kurang;
 3. Budaya masyarakat yang masih lebih memilih bekerja sebagai karyawan daripada membuka usaha sendiri dengan resiko yang cukup besar;
- Strategi/solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator TPT, yaitu
 1. Pelaksanaan bursa kerja yang bekerjasama dengan perusahaan dan lembaga – lembaga pemerintah untuk memberikan lebih banyak pilihan lamaran bagi pencari kerja;
 2. Menaikan upah minimum pekerja;
 3. Menjadikan kawasan strategis pusat kota sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan UMKM;
 4. Memberikan bantuan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif seperti bantuan alat, pupuk, bibit/benih, dan modal;
 5. Menaikan kegiatan investasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta seperti usaha makanan dan minimarket;
 6. Memberikan pembekalan kepada masyarakat terutama bagi yang akan bekerja di luar daerah atau luar negeri.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut BPS, IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan

ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IPG. Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda. Untuk itu terlebih dahulu dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung indeksinya terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen, semakin mendekati 100 maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata, semakin menjauhi 100 maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. IPG dapat dihitung dengan menggunakan formula:

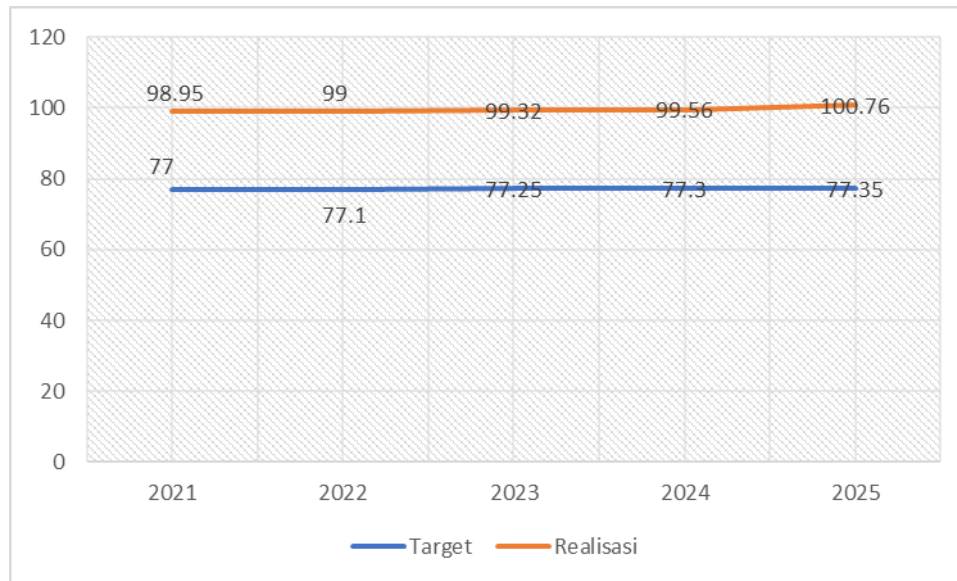
$$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - Laki}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 untuk Kota Tomohon, IPM Perempuan sebesar 80,56 dan IPM Laki - Laki sebesar 81,17, sehingga IPG Kota Tomohon Tahun 2025 yaitu:

$$\frac{80,56}{81,17} \times 100\% = 100,76\%$$

Realisasi IPG Kota Tomohon sampai tahun 2024 masih memakai hasil *long form* Sensus Penduduk Tahun 2010. Hal berbeda dengan IPG Kota Tomohon tahun 2025 yang memakai hasil *long form* Sensus Penduduk Tahun 2020, Realisasi sebesar 100,76 telah mencapai target 77,35 untuk tahun 2025 dengan capaian 130,27% kategori “sangat tinggi”. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2024 IPG Kota Tomohon telah berada di atas 98% dan naik setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebesar 98,95, tahun 2022 sebesar 99, tahun 2023 sebesar 99,32, tahun 2024 sebesar 99,56, tahun 2025 sebesar 100,76.

Gambar 3.7
Trend Target dan Realisasi TPT
Tahun 2021 - 2025



Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 77,8, realisasi IPG Kota Tomohon pada tahun 2025 lebih dari target dengan capaian 120,51% dari target akhir yang ditetapkan. IPG Kota Tomohon sampai tahun 2025 tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara bahkan lebih tinggi secara nasional. IPG Kota Pada tahun 2025, IPG Tomohon lebih tinggi dari IPG Provinsi Sulut yang sebesar 96,18, juga lebih tinggi dari nasional yang sebesar 92,69.

Tabel 3.18
IPM Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021 - 2025

Kabupaten/Kota	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Sulawesi Utara	77.29	73.38	74.03	77.64	73.98	74.52	78.1	74.56	75.04	78.59	75.43	75.68	79.15	76.13	76.32
Bolaang Mongondow	72.62	64.24	69.04	73.42	65.01	69.82	74.08	65.64	70.48	74.67	66.59	71.14	75.38	67.28	71.83
Minahasa	79.33	76.78	77.29	79.71	77.43	77.72	80.43	78.29	78.48	81.03	79.25	79.26	81.46	79.73	79.73
Kepulauan Sangihe	74.45	71.83	72.79	74.99	72.43	73.35	75.69	72.88	73.94	76.14	73.6	74.43	76.87	74.38	75.18
Kepulauan Talaud	71.9	70.61	70.94	72.51	71.2	71.53	73.16	71.89	72.22	73.7	72.59	72.83	74.55	73.44	73.68
Minahasa Selatan	77.68	69.19	73.94	78.22	69.74	74.5	78.59	70.58	75.25	79.04	71.42	75.79	79.63	72.22	76.47
Minahasa Utara	77.38	74.97	75.36	77.91	75.53	75.92	78.42	76.25	76.5	78.92	76.89	77.05	79.65	77.48	77.76
Bolaang Mongondow Utara	74.51	64.92	69.72	75.05	65.68	70.39	75.47	66.27	70.97	76.05	67.09	71.66	76.65	67.81	72.28
Kepulauan Sitaro	73.35	65.5	69.28	74.21	66.36	70.18	74.77	67.05	70.81	75.36	67.93	71.55	75.91	68.73	72.17
Minahasa Tenggara	75.69	69.78	72.16	76.07	70.31	72.56	76.41	70.74	72.97	76.9	71.58	73.68	77.4	72.25	74.28
Bolaang Mongondow Selatan	73.27	58.85	68.2	73.71	59.44	68.66	74.1	60.1	69.17	74.67	61.02	69.92	75.13	61.82	70.54
Bolaang Mongondow Timur	72.57	66.06	68.7	73.22	66.73	69.35	73.81	67.61	70.09	74.31	68.41	70.68	74.81	69.17	71.43
Kota Manado	82.34	80.08	80.53	82.76	80.53	80.96	83.17	80.98	81.4	83.6	81.72	81.86	84.05	82.37	82.4
Kota Bitung	77.98	74.1	75.46	78.44	74.61	75.94	78.76	75.06	76.33	79.25	75.69	76.9	79.85	76.37	77.57
Kota Tomohon	78.37	78.24	78.09	78.88	78.84	78.65	79.28	79.48	79.29	80.05	80.37	80.06	80.56	81.17	80.65
Kota Kotamobagu	77.9	74.76	75.09	78.29	75.29	75.56	78.68	75.78	76.01	79.45	76.68	76.86	80.02	77.32	77.49

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

Tabel 3.19
Indeks Pembangunan Gender Kota Tomohon
Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bolaang Mongondow	88.29	88.41	88.52	88.55	89,12	89,25
Minahasa	96.53	96.02	96.30	96.47	96,88	97,88
Kepulauan Sangihe	95.23	95.94	95.94	95.53	95,82	96,76
Kepulauan Talaud	97.90	98.09	98.09	98.05	98,20	98,51
Minahasa Selatan	88.74	88.78	88.80	89.26	89,76	90,69
Minahasa Utara	96.40	96.24	96.24	98.53	96,62	97,28
Bolaang Mongondow Utara	86.77	87.02	87.35	87.53	87,86	88,47
Kepulauan Sitaro	88.40	88.87	88.87	89.04	89,44	90,54
Minahasa Tenggara	91.88	92.08	92.36	92.43	92,84	93,35
Bolaang Mongondow Selatan	79.70	80.09	80.42	80.97	81,59	82,28
Bolaang Mongondow Timur	90.84	90.98	91.10	91.37	91,76	92,46
Kota Manado	96.23	96.41	96.42	96.51	96,86	98,00
Kota Bitung	94.19	94.56	94.57	94.71	94,81	95,64
Kota Tomohon	98.94	98.95	99.00	99.32	99,56	100,76
Kota Kotamobagu	95.37	95.38	95.47	95.49	95,64	96,63
Sulawesi Utara	94.42	94.61	94.89	95.06	95,48	96,18

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator IPG, yaitu:
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan program pencegahan kekerasan perempuan di Kota Tomohon;
 2. Keterlibatan perempuan yang signifikan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 3. Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik;
 4. Meningkatnya akses anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung Pembangunan Manusia Berbasis Gender tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;

5. Menguatnya sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
 6. Dukungan lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan institusi terkait lainnya untuk PUG;
 7. Jumlah perempuan di lembaga legislatif telah signifikan;
 8. Kesempatan kerja, pengembangan karier yang sama untuk perempuan dan laki – laki;
 9. Hak yang sama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bagi perempuan dan laki – laki.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator IPG, yaitu:
1. Masih rentannya tindak kekerasan anak dan perempuan dalam keluarga;
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator IPG, yaitu:
1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan;
 2. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal termasuk anak dan perempuan;
 3. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak;
 4. Memberikan layanan konseling kepada masyarakat terutama kepada yang rentan tindak kekerasan anak dan perempuan.
 5. Mengikutsertakan forum anak dalam berbagai forum/ kegiatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya seperti dalam forum Musrenbang.

- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 3: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.20
Program yang Menunjang Sasaran Strategis 3 (PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
6	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3AD
11	Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3AD
12	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P3AD
13	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas P3AD
14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P3AD
15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas P3AD
16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
17	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
18	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
19	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
20	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
22	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
23	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
24	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
25	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
26	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Dukcapil

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 33 program yang mendukung sasaran strategis 3 (PK Induk Tahun 2025), tetapi dalam pelaksanaan tahun 2025 hanya 26 program yang tertata di APBD. Hal ini juga sama seperti tahun 2024. Pelaksanaan program-program tersebut oleh 3 PD, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon

Tabel 3.21
 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon”
 PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Turunan angka stunting	%	1,3	21,1	18,3	113,27	18,4	13,7	125,54	16	10,5	134,38	14	10,8	122,86	12	0,43	196,42	10	195,70
2	Umur harapan hidup	Tahun	71,93	71,94	72,06	100,17	71,95	74,93	104,14	72,1	75,28	104,41	72,2	75,57	104,67	72,25	75,99	105,18	72,35	105,03
Capaian Kinerja Sasaran Strategis															150,80					

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon sebesar 150,80% atau kategori **“sangat tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 4 ini sebanyak 2 indikator yaitu turunnya angka stunting dan umur harapan hidup. Angka stunting di Kota Tomohon terbilang cukup kecil, bahkan menjadi daerah dengan prevalensi stunting terendah di Sulawesi Utara. Demikian juga dengan umur harapan hidup, tingginya perhatian pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, menjadikan Kota Tomohon memiliki harapan hidup tertinggi di Sulawesi Utara.

1. Turunnya angka stunting

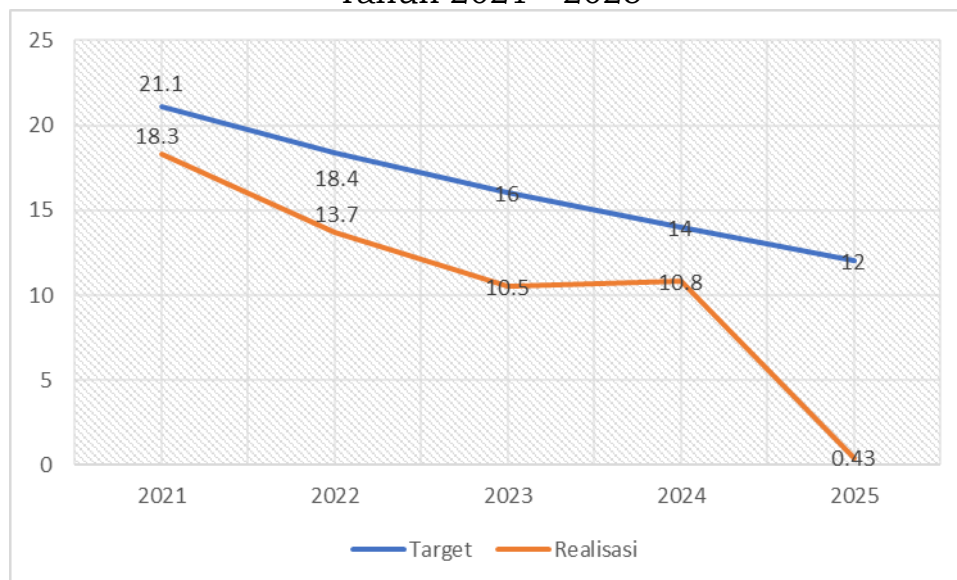
Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Stunting dimana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting adalah persoalan multidimensional yang dampaknya berpengaruh pada masa depan manusia. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan zat gizi tertentu pada bahan pangan. Selama ini warga miskin mengalami masalah hidden hunger, karena makanan harian yang mengenyangkan ternyata miskin gizi mikro. Maka dari itu perlu pengayaan zat gizi pada bahan makanan rakyat, seperti garam, tepung terigu, minyak goreng dan beras.

Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat. Terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting, Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peran dan Kewenangan Kelurahan dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting.

Prevalensi stunting Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 0,43 berdasarkan LKJIP Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2025, dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 12 dengan capaian 196,42% kategori “sangat tinggi”. Secara umum, prevalensi stunting di Kota Tomohon cenderung turun setiap tahunnya, walaupun ada sedikit kenaikan antara tahun 2023 dan tahun 2024, tetapi pada tahun 2025 telah turun drastis dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 18,3, tahun 2022 sebesar 13,7, tahun 2023 sebesar 10,5, tahun 2024 sebesar 10,8, dan tahun 2025 sebesar 0,43.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 10, realisasi prevalensi sampai tahun 2025 telah melampaui target dengan capain 195,7%. Sampai tahun 2025, Kota Tomohon merupakan terendah stunting di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon juga telah mencapai target nasional jangka panjang untuk menurunkan angka stunting sampai 14,2% pada tahun 2029 dan target tahun 2025 secara nasional menurunkan angka stunting sebesar 18,8%.

Gambar 3.8
Trend Target dan Realisasi Indikator Prevalensi Stunting Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator prevalensi stunting, yaitu:

1. Terlaksananya program-program dan kegiatan yang mendukung penurunan permasalahan stunting di Kota Tomohon;
 2. Kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting;
 3. Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Tomohon yang semakin menunjang dan terakreditasi dengan baik;
 4. Tersedianya pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan persalinan bayi baru lahir;
 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, bayi dan balita;
 6. Adanya kegiatan rembuk stunting dari tingkat kelurahan sampai kota sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penurunan stunting berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator prevalensi stunting, yaitu:
- Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator Prevalensi stunting paling sering dijumpai berasal dari faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator prevalensi stunting, yaitu:
1. Adanya pelatihan Pemberian Makanan Bayi pada Anak (PBA) bagi petugas dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Antenatal Care (ANC) terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP ibu.

2. Pelaksanaan Edukasi dan Pencegahan Stunting dilakukan dari usia remaja serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk pencegahan dan penanggulangan stunting.
3. Pelaksanaan monitoring intensif dari pemerintah bagi anak – anak stunting sehingga dapat dikategorikan kembali anak – anak yang awalnya stunting tetapi dalam perkembangannya sudah tidak tergolong stunting.

2. Umur Harapan Hidup

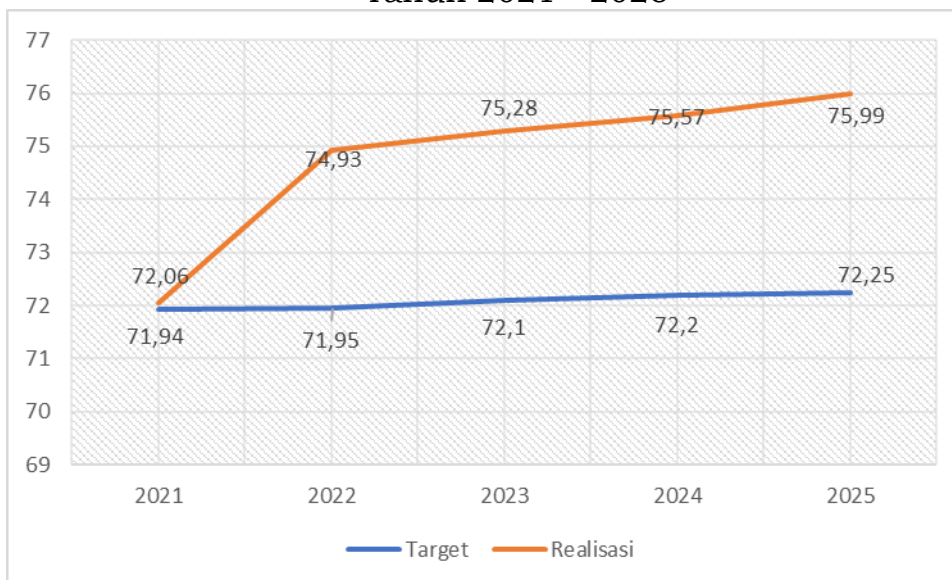
Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH adalah perkiraan rata – rata umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata – rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke- x . Ukuran yang umum digunakan adalah UHH saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu, sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Idealnya, UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian per tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian, tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung UHH digunakan cara tidak langsung dengan program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau dengan program *Mortpak Lite* yang dilakukan BPS.

UHH Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 75,99 tahun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 72,25 tahun dengan capaian 105,81% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, UHH Kota Tomohon naik secara signifikan setiap

tahunnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 72,06 tahun, tahun 2022 sebesar 74,93 tahun, tahun 2023 sebesar 75,28 tahun, tahun 2024 sebesar 75,57 tahun, dan tahun 2025 sebesar 75,99 tahun.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026, sebesar 72,35 tahun realisasi UHH pada tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian 105,03% dari target akhir yang ditetapkan. UHH Kota Tomohon sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi pada tahun 2025 lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 74,44 tahun dan nasional yang sebesar 74,47 tahun. Ini berarti terjadi peningkatan terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara langsung, nampak bahwa urusan kesehatan merupakan prioritas masyarakat Tomohon.

Gambar 3.9
Trend Target dan Realisasi Indikator Umur Harapan Hidup Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.22
Umur Harapan Hidup Kota Tomohon
Tahun 2022-2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir ¹ (tahun)			
	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolaang Mongondow	71,68	71,94	72,16	72,48
Minahasa	74,68	74,96	75,22	75,60
Kepulauan Sangihe	74,24	74,49	74,70	75,02
Kepulauan Talaud	72,96	73,25	73,51	73,92
Minahasa Selatan	73,76	74,07	74,35	74,74
Minahasa Utara	74,26	74,50	74,70	75,02
Bolaang Mongondow Utara	73,15	73,41	73,63	73,93
Siau Tagulandang Biaro	74,08	74,40	74,67	75,10
Minahasa Tenggara	72,84	73,11	73,36	73,71
Bolaang Mongondow Selatan	70,61	70,80	70,94	71,14
Bolaang Mongondow Timur	73,00	73,25	73,45	73,73
Kota Manado	74,78	75,02	75,24	75,58
Kota Bitung	73,98	74,22	74,43	74,76
Kota Tomohon	74,93	75,28	75,57	75,99
Kota Kotamobagu	74,37	74,70	74,97	75,37
SULAWESI UTARA	73,59	73,85	74,08	74,44

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator umur harapan hidup, yaitu:
1. Tersedianya sumber daya manusia kesehatan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, seperti dokter, bidan, perawat di setiap pusat – pusat layanan kesehatan;
 2. Peningkatan sarana prasarana dan layanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kelurahan;
 3. Adanya dua Rumah Sakit Swasta dan satu Rumah Sakit Pemerintah di Kota Tomohon dengan peralatan yang memadai dan pelayanan yang prima;

4. Tersedianya layanan kesehatan untuk manula;
5. Menikngkatnya kesadaran masyarakat melalui sosialisasi kesehatan yang bersifat menyeluruh serta pentingnya hidup bersih dan sehat.

Ada beberapa cara memperpanjang Umur Harapan Hidup:

- Mengonsumsi Makanan Sehat Dengan Gizi

Mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang adalah salah satu cara untuk membantu memperpanjang umur harapan hidup. Ada beragam makanan sehat yang bisa dikonsumsi mulai dari buah dan sayuran segar, kacang-kacangan serta biji-bijian.

Sebaliknya, batasi konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak jenuh, tinggi gula, dan tinggi garam. Ketiga jenis makanan ini beresiko tinggi memicu beragam penyakit yang dapat memperpendek umur harapan hidup.

- Tetap Aktif Bergerak

Studi membuktikan bahwa tetap aktif bergerak atau olahraga juga dapat membantu menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Hal itu tentu berdampak baik pada kualitas hidup seseorang, sehingga bisa membantu memperpanjang umur harapan hidup. Oleh karena itu disarankan untuk dapat berolahraga setidaknya 30 menit per har dan tentunya dengan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh.

- Istirahat Yang Cukup

Studi menyebutkan bahwa orang yang tidurnya sering kurang dari 5-7 jam per malam memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kematian dini. Hal ini dikarenakan kurang tidur. Oleh karena itu, cukupilah waktu tidur yaitu 7-9 jam setiap malamnya.

- Jangan Merokok dan Kurangi Konsumsi Minuma Beralkohol

Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahaya merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan. Rokok dan alkohol bisa meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Semua penyakit itu nantinya dapat memicu kematian lebih cepat.

- Kelola Stres Dengan Baik

Pria dan wanita yang tidak mampu mengelola stres dengan baik maka beresiko lebih tinggi untuk meninggal

- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator umur harapan hidup, yaitu:
 1. Kebiasaan yang kurang sehat di beberapa tempat dalam masyarakat yang berdampak pada resiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes yang menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan umur harapan hidup.
- Strategi/solusi pemecahan masalah atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator umur harapan hidup, yaitu:
 1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang kebiasaan hidup sehat baik secara langsung maupun dengan himbauan melalui media massa seperti radio dan pamflet;
 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi PNS dan masyarakat serta mendorong kampanye perilaku hidup sehat melalui puskesmas di setiap kecamatan;
 3. Melakukan pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis pada puskesmas di setiap kecamatan;
- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.23
Program yang Mendukung Sasaran Strategis 4
(PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Pengendalian Penduduk	Dinas P2KB

5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas P2KB
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (IKS)	Dinas P2KB

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 7 program yang mendukung sasaran strategis 4 (PK Induk Tahun 2025) tetapi dalam pelaksanaan tahun 2025 hanya 6 program yang tertata di APBD. Hal ini sama seperti tahun 2024. Pelaksanaan program tersebut oleh 2 PD, yaitu: Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Infrastruktur dan pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tabel 3.24
 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, Berkualitas Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”
 PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Indeks infrastruktur	Indeks	86,49	87	77,26	88,8	87,2	78,57	90,10	87,5	77,87	88,99	88	78,75	89,49	88,2	80,65	91,44	88,5	91,13
2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	78	62,57	80,22	80	62,35	77,94	82	63,12	76,98	83	67,72	81,59	85	81,64	96,04	85	96,04
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	Persentase	95,52	96	95,82	99,81	97	95,81	98,77	98	96,26	98,22	98,5	95,82	97,28	99	95,82	96,79	100	95,82
4	Akses Air Minum Layak	Persentase	85	90	96,34	107,04	92	99,18	107,8	93	97,65	105	95	97,65	102,79	95	97,65	102,79	95	102,79
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																	96,76			

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, Berkualitas Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan sebesar 96,76% atau kategori **“sangat tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 5 ini sebanyak 4 indikator yaitu indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan akses air minum layak.

1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur terhadap pembangunan di Kota Tomohon. Indeks infrastruktur Kota Tomohon diukur melalui 3 (tiga) indeks pengukuran, yaitu:

1. persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik, diperoleh dari data survey kondisi jalan yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik baik itu melalui pekerjaan pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan jalan,
2. persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat,
3. persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik.

Perentase jalan kota dalam kondisi baik di tahun 2025, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang jalan kota seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\frac{483,16 \text{ Km}}{563,67 \text{ Km}} \times 100\%$$

$$= 85,72\%$$

Gambar 3.10
Program Penyelenggaraan Jalan



Sumber: Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon, 2026

Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran tidak tersumbat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase kota (km)}} \times 100\%$$
$$\frac{64 \text{ Km}}{70 \text{ Km}} \times 100\%$$
$$= 91,43\%$$

Gambar 3.11
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



Sumber: Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon, 2026

Persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik termasuk dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Luas irigasi kota dalam kondisi baik (ha)}}{\text{Luas irigasi kota (ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{270,88 \text{ ha}}{418 \text{ ha}} \times 100\%$$

$$= 64,80\%$$

Gambar 3.12
Peningkatan Jaringan Irigasi



Berdasarkan 3 (tiga) indeks pengukuran di atas, maka diperoleh formula perhitungan untuk mengetahui Indeks infrastruktur sebagai berikut:

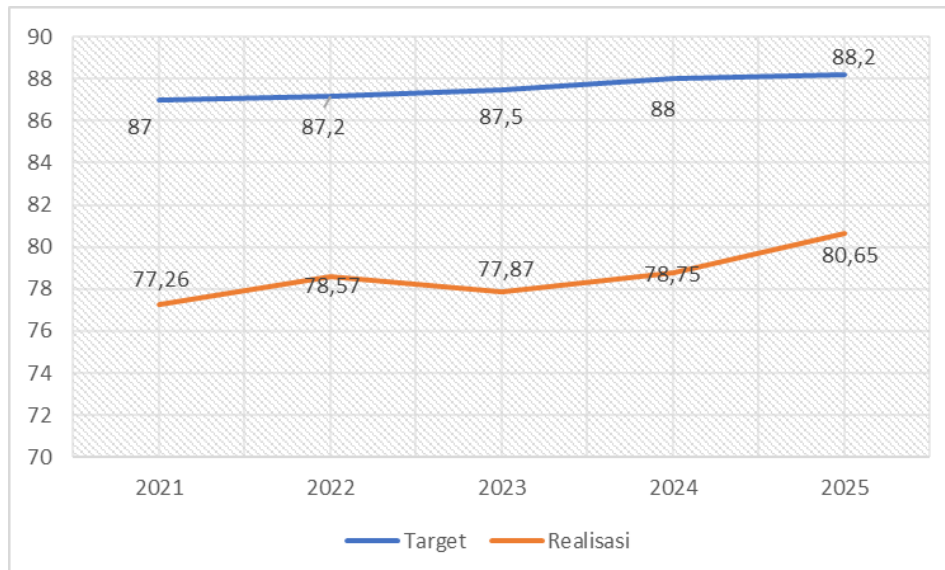
$$\frac{\text{Persentase Jalan dalam Kondisi baik} + \text{Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik} + \text{Persentase Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Indeks Ukuran}} \times 100$$

Sesuai formula perhitungan di atas maka dapat di peroleh persentase indeks infrastruktur tahun 2025, yaitu:

$$\frac{85,72 + 91,43 + 64,80}{3} \times 100\% = 80,65$$

Realisasi tahun 2025 ini masih sedikit di bawah target sebesar 88,2 dengan capaian 91,44% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, maka realisasi di tahun 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 dapat menyentuh angka 8 sementara untuk tahun – tahun sebelumnya masih pada angka 7. Secara rinci, untuk tahun 2021 sebesar 77,26, tahun 2022 sebesar 78,75, tahun 2023 sebesar 77,87, tahun 2024 sebesar 78,75, dan tahun 2025 sebesar 80,65. Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 88,5, realisasi untuk indeks infrastruktur pada tahun 2025 belum mencapai target dengan capaian 91,13% dari target akhir yang ditetapkan.

Gambar 3.13
Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Infrastruktur Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dan stakeholders dalam mendukung aksesibilitas jalan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal-tujuan dengan aman dan nyaman;
 2. Adanya pemeliharaan jalan rutin/berkala sepanjang tahun;
 3. Adanya pengelolaan sistem drainase yang menjamin terpeliharanya kondisi jalan Kota Tomohon;
 4. Komitmen Pemerintah kota Tomohon untuk pemenuhan kebutuhan pangan khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan irigasi untuk menunjang pertanian.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Pemutakhiran database jalan dan jembatan belum secara reguler.
 2. Faktor cuaca, banyaknya curah hujan sehingga tampungan drainase tidak mencukupi dan seringkali menyebabkan kerusakan jalan.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Melaksanakan pemetaan jaringan jalan dan kondisinya secara berkala;
 2. Melaksanakan perbaikan jalan secara rutin/berkala;
 3. Menguji kembali kelayakan desain saluran drainase yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal.
 4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi penting dari keberadaan saluran drainase baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Perhitungan IKLH dengan

mempertimbangkan tiga faktor, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) .$$

Sesuai data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon tahun 2025, diketahui:

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 = 91,35

Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 = 83,93

Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 = 60,72

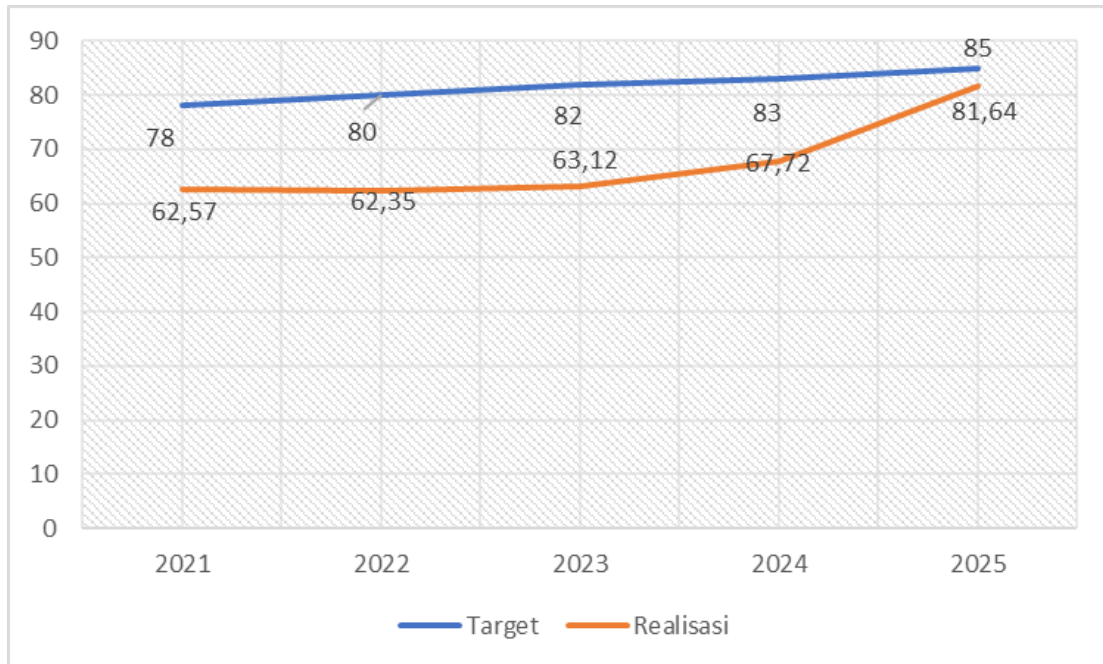
Dengan menggunakan formula, IKLH diperoleh sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times 91,35) + (0,405 \times 83,93) + (0,219 \times 60,72) = 81,64$$

Sesuai target pada tahun 2025 sebesar 85, IKLH Kota Tomohon belum mencapai target dengan capaian 91,44% kategori “sangat tinggi”. IKLH Kota Tomohon mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun dan pada tahun 2025 merupakan nilai tertinggi yang dicapai sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Bila dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2025, IKLH naik secara drastis sebesar 13,92, jauh melampaui kenaikan antar tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan sangat tinggi pada indeks kualitas air dan lahan dimana indeks kualitas air naik sebesar 37,35 dan indeks kualitas lahan naik sebesar 18,97. Tetapi terjadi penurunan pada indeks kualitas udara sebesar 10,57. Secara rinci, IKLH untuk tahun 2021 sebesar 62,57, tahun 2022 sebesar 62,35, tahun 2023 sebesar 63,12, tahun 2024 sebesar 67,72, dan tahun 2025 sebesar 81,64.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026, sebesar 85, realisasi IKLH pada tahun 2025 masih sedikit di bawah target dengan capaian 96,04% dari target akhir yang ditetapkan. Hasil pada tahun 2025 ini telah melampaui target nasional dimana pada tahun 2045 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia dapat mencapai 76,12.

Gambar 3.14
Trend Target dan Realisasi Indikiator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.25
Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air	45.0	45.0	43.75	54.00	91,35
2	Indeks Kualitas Udara	89.65	90.32	92.64	94.50	83,93
3	Indeks Kualitas Lahan	42.64	40.40	-	41.75	60,72
	IKLH	62.57	62.35	63.12	67.72	81,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon, 2026

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator IKLH, yaitu:

1. Adanya bantuan dari KLHK melalui pengadaan terminal/ alat *online monitoring* (Onlimo) sebagai sarana pengujian kualitas air sungai;

2. Adanya bantuan dari KLHK melalui pengadaan *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yang berfungsi sebagai sarana pengujian kualitas udara;
 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, misalnya tidak membuang sampah di sungai;
 4. Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memberikan dasar, arah, dan *road map* pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator IKLH, yaitu:
1. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara;
 2. Semakin Tingginya alih fungsi lahan produktif ke lahan terbangun;
 3. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga;
 4. Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
 5. Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal.
 6. Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping berdampak tidak baik terhadap kesehatan lingkungan di sekitar TPA.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator IKLH, yaitu:
1. Melaksanakan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air permukaan di Kota Tomohon.
 2. Menyelenggarakan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih, sehat dan pengelolaan sampah;
 3. Melaksanakan kampanye penanaman pohon, seperti di kawasan Lokon, dan wajib tanam pohon untuk pasangan yang akan menikah;
 4. Pembatasan penggunaan racun pertanian dan pupuk kimia;

5. Melakukan pengujian emisi gas untuk kendaraan bermotor;

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi layak dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Persentase rumah tinggal bersanitasi layak} = \frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

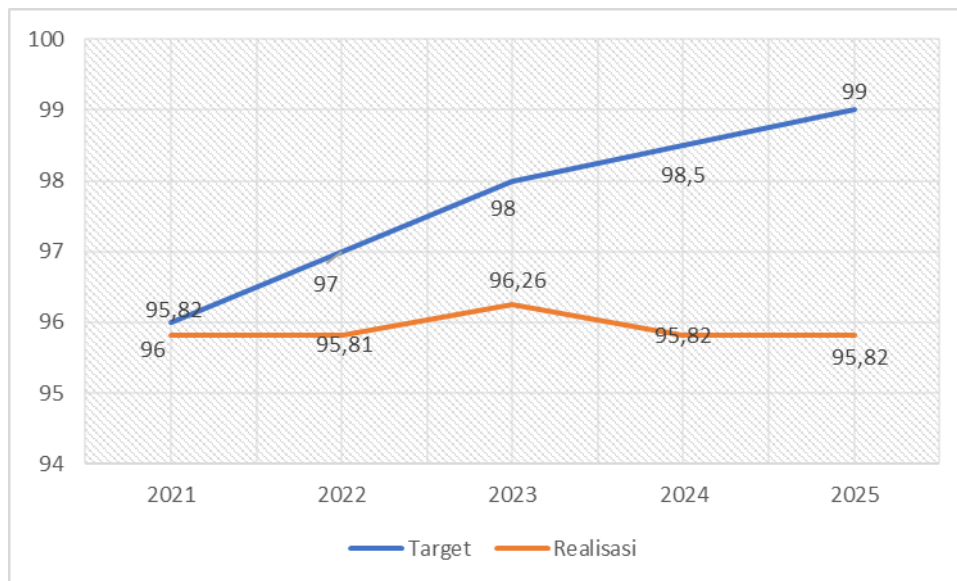
Sesuai data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Daerah Kota Tomohon, pada tahun 2025, jumlah rumah tangga berakses sanitasi sebesar 21.776, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga sebesar 22.726. Sehingga persentase rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2025 sebesar $\frac{21.776}{22.726} \times 100\% = 95,82\%$. Realisasi ini sedikit di bawah target sebesar 99% dengan capaian 96,79% kategori “sangat tinggi”. Realisasi pada tahun 2025 tidak ada kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, tetapi mengalami penurunan sebesar 0,44 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, realisasi yang paling tinggi dicapai pada tahun 2023. Secara rinci, realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi layak untuk tahun 2021 sebesar 95,82%, tahun 2022 sebesar 95,81%, tahun 2023 sebesar 96,26%, tahun 2024 sebesar 95,82%, dan tahun 2025 sebesar 95,82%

Gambar 3.15
Pembangunan IPAL Skala Pemukiman



Sumber: Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon, 2026

Gambar 3.16
Trend Target dan Realisasi Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



Sesuai target akhir RPJMD 2021 - 2026 sebesar 100%, realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2025 masih di bawah target dengan capaian 95,82%. Realisasi tahun 2025 jauh lebih tinggi dari hasil Provinsi Sulawesi Utara sebesar 87,72% dan dari hasil nasional sebesar 85,37%.

- Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi layak, yaitu:
 1. Pelaksanaan survey sanitasi sebagai data dasar pelaksanaan program kegiatan menyangkut sanitasi;
 2. Bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan/ renovasi rumah layak huni yang mendukung kegiatan sanitasi;
 3. Pembangunan/ renovasi rumah layak huni yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat;
 4. Koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan menyangkut sanitasi, seperti pembinaan dan pengawasan peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan kualitas kawasan permukiman, dan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator persentase rumah tinggal bersanitasi layak, yaitu:
 1. Masih terdapat keluarga yang belum memiliki rumah layak tinggal, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena kebutuhan akan rumah layak huni dan kesehatan lingkungan yang baik menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator persentase rumah tinggal bersanitasi layak, yaitu:
 1. Melakukan pendataan kembali kebutuhan rumah tangga bersanitasi yang diharapkan warga sehingga tidak terjadi salah sasaran dari program yang akan diturunkan ke masyarakat.
 2. Terus melaksanakan dan meningkatkan program kegiatan untuk rumah layak huni setiap tahunnya.

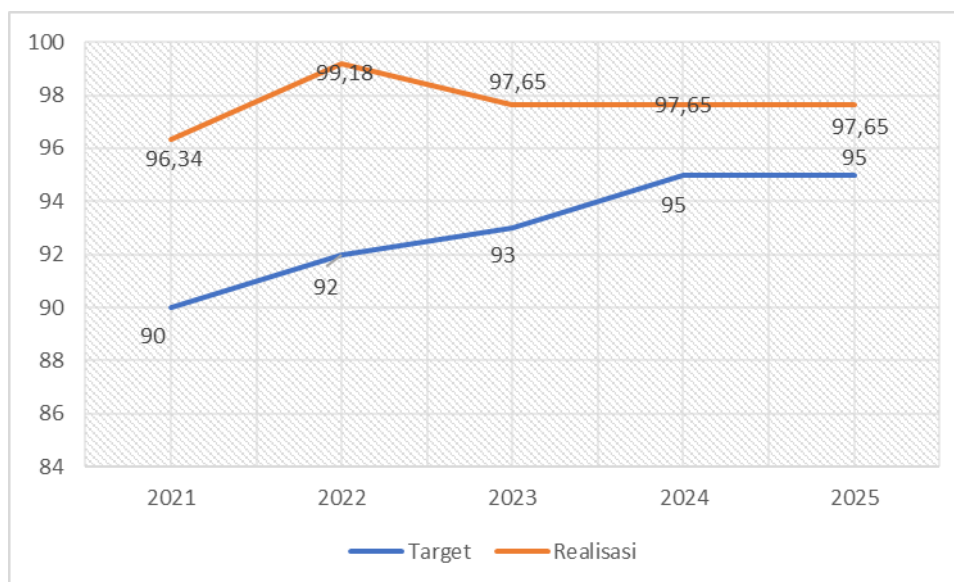
4. Akses Air Minum Layak

Jumlah keluarga dengan akses air minum layak adalah banyaknya keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum layak yang berasal dari sumber yang terlindung seperti leding, sumur bor/ pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan. Sumber ini harus

memiliki kriteria fisik (jernih, tidak berasa, tidak berbau) dan secara teknis terlindung dari pencemaran. Indikator akses air minum layak tahun 2025 menggunakan data dari BPS tahun 2023, untuk Kota Tomohon sebesar 97,65%. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 95% dengan capaian 102,79% kategori “sangat tinggi”.

Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 1,53. Pada kenyataannya, realisasi tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023. Walaupun demikian, sepanjang tahun tersebut, Kota Tomohon tetap memperetahankan realisasi di atas 95%. Secara rinci realisasi untuk tahun 2020 sebesar 97,04%, tahun 2021 sebesar 96,34%, tahun 2022 sebesar 99,18%, tahun 2023 sebesar 97,65%, sedangkan tahun 2024 dan tahun 2025 masih menunggu publikasi dari BPS.

Gambar 3.17
Trend Target dan Realisasi Indikiator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.26
Realisasi Akses Air Minum Layak Kota Tomohon Tahun 2021 - 2023

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Bolaang Mongondow	87,57	88,23	92,94	89,11

Minahasa	90,33	88,01	91,68	91,12
Kepulauan Sangihe	85,66	9,56	93,56	95,20
Kepulauan Talaud	71,53	84,61	86,55	87,09
Minahasa Selatan	90,50	90,78	96,53	96,54
Minahasa Utara	94,54	88,20	95,84	97,61
Bolaang Mongondow Utara	77,58	79,62	91,02	91,92
Kepulauan Sitaro	98,28	96,71	98,44	98,12
Minahasa Tenggara	88,21	92,98	85,71	98,12
Bolaang Mongondow Selatan	89,71	86,10	87,74	87,32
Bolaang Mongondow Timur	77,74	91,61	91,40	94,73
Kota Manado	92,48	95,89	95,69	97,04
Kota Bitung	95,48	96,68	98,14	97,27
Kota Tomohon	97,04	96,34	99,18	97,65
Kota Kotamobagu	96,80	98,06	97,02	98,19
Sulawesi Utara	90,31	91,65	94,15	94,37

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 95%, maka realisasi akses air minum layak pada tahun 2023 telah melampaui target dengan capaian 102,79% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi untuk akses air minum layak pada tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 94,37% dan nasional yang sebesar 91,72% di tahun yang sama. Realisasi ini juga masih lebih tinggi dari realisasi tahun 2025 untuk Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Pada tahun 2025, untuk tingkat perkotaan termasuk Kota Tomohon pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 96,29% dan untuk perkotaan ditambah perdesaan pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 94,86% sedangkan secara nasional sebesar 93,22%.

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator akses air minum layak, yaitu:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan program dan kegiatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Tomohon.
2. Adanya perhatian khusus oleh Pemerintah melalui program Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum terhadap masyarakat Kota Tomohon.

- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator akses air minum layak, yaitu:
 1. Masih tingginya tingkat kebocoran air akibat kerusakan jaringan perpipaan infrastruktur air minum yang terbangun telah lama dengan usia produktivitas yang menurun.
 2. Maraknya pencurian air oleh masyarakat yang mengakibatkan daerah aliran air tidak bekerja secara maksimal dengan tingkat kebocoran hingga 30 % – 40 %.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat (people's behavior) tentang infrastruktur air bersih hal ini terlihat dengan maraknya penebangan pohon serta membuang sampah secara sembarangan di daerah resapan air.
 4. Menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah dalam menunjang program kegiatan infrastruktur air bersih. Kemampuan pencapaian keterlaksanaan setiap kegiatan tentunya tidak lepas dengan ketersediaan dana kabupaten / kota tersebut.

- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator
 1. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon menguji kembali kelayakan akses air minum layak yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal.
 2. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi penting dan pentingnya akses air minum layak baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis.
 3. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air.
 4. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon menganggarkan biaya

pemeliharaan terhadap jaringan perpipaan guna menekann angka kebocoran

5. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon memberikan sanksi terhadap pelanggaran pencurian air melalui jaringan perpipaan tanpa sepengetahuan Pemda.
 6. Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air melalui kegiatan sosialisasi.
- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 5: Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.27

Realisasi Anggaran atas Program yang Mendukung Sasaran Strategis 5 (PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
11	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
14	Program Pengelolaan dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Tenaga Kerja
15	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penylematan Kebakaran dan Penylematan Non Kebakaran	SatPolPP
17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
18	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
20	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 33 program yang mendukung sasaran strategis 5 (PK Induk Tahun 2025) tetapi dalam pelaksanaan tahun 2025 hanya 20 program yang tertata di APBD. Sedangkan untuk tahun 2024 dilaksanakan 21 program. Pelaksanaan program tersebut oleh 7 PD, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Tenaga Kerja Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Pemajuan Budaya Lokal

Tabel 3.28
 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Dan Pemajuan Budaya Lokal”
 PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	582,64	1000	510	51	1.050	348,23	33,16	1.155	322,515	27,92	1.270	734,16	57,81	1.397	658,36	47,13	1.537	42,83
2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	0	2	2	100	2	2	100	3	3	100	3	3	100	4	1	25	4	25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																		36,06		

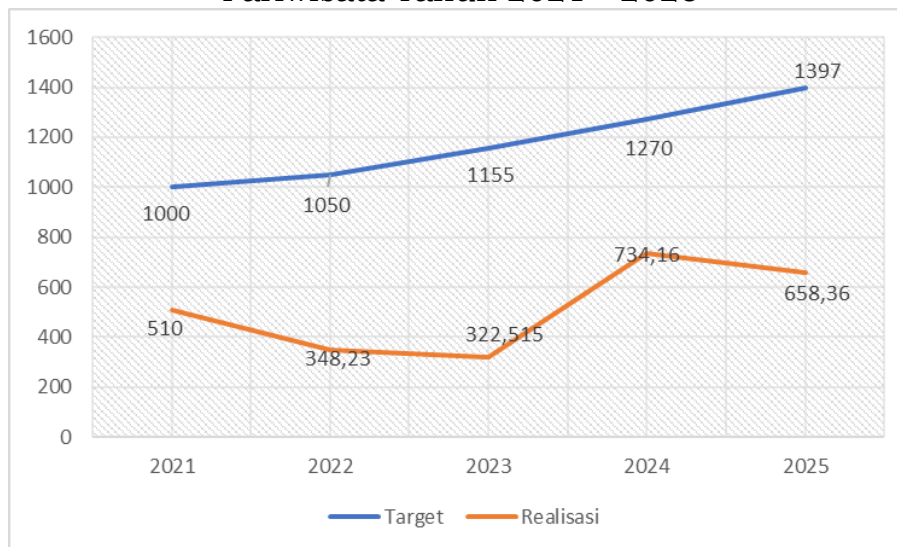
Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal sebesar 36,06% atau kategori **“sangat rendah”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 2 ini sebanyak 2 indikator yaitu peningkatan PAD dari sektor pariwisata dan lama tinggal wisatawan.

1. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sebagai sektor unggulan di Kota Tomohon, pada tahun 2025, pariwisata ditargetkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon sebesar Rp.1,397 miliar dan realisasinya sebesar Rp.658,36 juta atau hanya mencapai 47,13% kategori “sangat rendah”, masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Realisasi ini menurun dari tahun sebelumnya, pada tahun 2024 mencapai Rp.734,16 juta, berarti terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.75, juta. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, realisasi terbesar berada pada tahun 2024. Secara rinci, realisasi untuk indikator ini pada tahun 2021 sebesar Rp.510 juta, tahun 2022 sebesar Rp. 348,23 juta, tahun 2023 sebesar 322,515 juta, tahun 2024 sebesar Rp.734,16 juta, dan tahun 2025 sebesar Rp.658,36 juta.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026, sebesar Rp.1.537 juta, realisasi pada tahun 2025 ini masih jauh dari target dan hanya mampu mencapai 42,83% dari target yang ditetapkan.

Gambar 3.18
Trend Target dan Realisasi Indikator Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2021 - 2025



➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator peningkatan PAD dari sektor pariwisata, yaitu:

1. Beroperasinya 3 obyek wisata yang menunjang PAD di Kota Tomohon, yaitu: Pemandian Air Panas Lahendong, Air Terjun Tekaian Telu dan Danau Linow. Adapun juga telah dibangunnya beberapa fasilitas di objek wisata Danau Linow dengan tujuan dapat menarik minat wisatawan.
2. Adanya koodinasi yang baik dengan *stakeholders* pariwisata di Kota Tomohon untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata di Kota Tomohon;
3. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tarif masuk obyek wisata milik pemerintah yang memberikan ladsan hukum untuk memungut bayaran;
4. Pelaksanaan TIFF 2025;
5. Lokasi Kota Tomohon yang strategis dekat dengan Kota Manado sebagai gerbang masuk wisatawan;
6. Terlaksananya kegiatan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan.
7. Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri;

8. Adanya wisata kuliner sebagai penggerak utama sektor pariwisata, karena pengeluaran terbesar wisatawan di Kota Tomohon adalah makan minum.

Gambar 3.19
Pelaksanaan TIFF 2025



Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, 2026

- Hambatan/permasalahan yang dihadapi yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator peningkatan PAD dari sektor pariwisata, yaitu:
 1. Manajemen penataan/pengelolaan obyek wisata milik pemerintah belum profesional;
 2. PAD sektor pariwisata masih dominan pada retribusi;
 3. Masih kurangnya kemampuan bahasa asing para pelaku pariwisata (terutama selain bahasa Inggris, seperti Mandarin untuk pasar Tiongkok).
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator peningkatan PAD dari sektor pariwisata, yaitu:
 1. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan retribusi pariwisata;
 2. Mendorong investasi melalui pengembangan destinasi wisata dan pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya;

3. Menumbuhkan gerakan sadar wisata, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi destinasi wisat;
4. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur pariwisata;
5. Mendorong perkembangan atraksi wisata;
6. Memperkuat promosi wisata melalui penyelenggaraan event-event kepariwisataan;
7. Pelaksanaan Tomohon Internasional Festival (TIFF);
8. Pengembangan pasar kuliner yang lebih atraktif dan dapat menarik kunjungan wisatawan.

2. Lama Tinggal Wisatawan (*length of stay*)

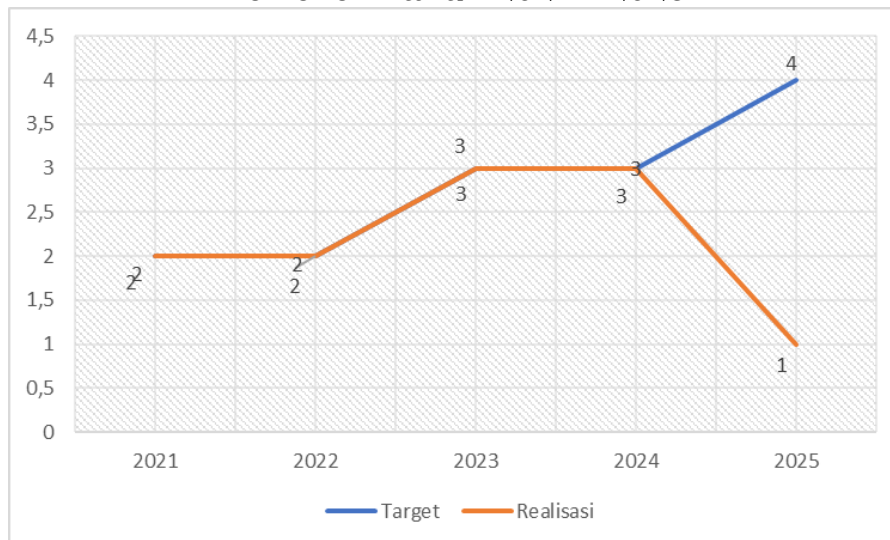
Meningkatnya lama tinggal wisatawan akan berpengaruh pada perekonomian di Kota Tomohon karena semakin lama tinggal wisatawan akan semakin banyak juga pengeluaran dari wisatawan. Rata-rata lama tinggal wisatawan ini dihitung dari tingkat rata-rata lamanya wisatawan berada disuatu daerah untuk satu kali kunjungan. Data ini diperoleh dari pendataan rutin yang dilakukan Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon terhadap hotel/ penginapan yang tersebar di Kota Tomohon dimana rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 1 hari, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 4 hari pada tahun 2025. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 hanya sebesar 25% kategori “sangat rendah”. Realisasi pada tahun 2025 sangat kontras bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, yang mana terjadi penurunan realisasi yang sangat mencolok pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2021 sampai tahun 2024. Secara rinci, realisasi untuk indikator lama tinggal wisatawan pada tahun 2021 sebesar 2 hari, tahun 2022 sebesar 2 hari, tahun 2023 sebesar 3 hari, tahun 2024 sebesar 3 hari, dan tahun 2025 sebesar 1 hari.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 4 hari, maka realisasi lama tinggal wisatawan pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 25% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi ini juga

masih lebih kecil dari realisasi untuk Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 2,4 hari dan tingkat nasional. Pada skala nasional untuk tahun 2025, lama tinggal mancanegara sebesar 9,74 malam dan untuk nusantara sebesar 1,5 hari. Meskipun kunjungan wisatawan pesat, tetapi wisatawan pada umumnya hanya berkunjung ke obyek – obyek wisata di Tomohon atau *day trip* ke Tomohon dan menginap beberapa hari di Manado.

Gambar 3.20

Trend Target dan Realisasi Indikator Lama Tinggal Wisatawan di Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



➤ Faktor-faktor yang Mempengaruhi keberhasilan indikator lama tinggal wisatawan, yaitu:

1. Tersedianya website baik milik pemerintah maupun swasta untuk bisa mengakses dan menyebarluaskan potensi dan perkembangan pariwisata Kota Tomohon;
2. Tersedianya tempat wisata yang menarik untuk wisatawan;
3. Tersedianya hotel atau penginapan untuk para wisatawan;
4. Suhu udara Tomohon yang sejuk (18 – 24°C) menjadi tempat yang cocok untuk bersantai;

➤ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator lama tinggal wisatawan, yaitu:

1. Jarak Tomohon – Manado yang hanya ±25 km (45 – 60 menit) dari Manado membuat wisatawan tidak perlu *check out* dari hotel mereka di Manado;

2. Paket wisata yang ada masih jarang menawarkan pengalaman yang mengharuskan wisatawan menginap;
 3. Kurangnya hotel bintang 4 atau 5 di Kota Tomohon sehingga wisatawan lebih memilih menginap di Manado dan hanya melakukan *day trip* ke Tomohon.
- Strategi/solusi diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator
1. Menambah sarana dan prasarana di obyek wisata;
 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar dan pengelola obyek wisata tentang arti penting sarana dan prasarana serta lingkungan;
 3. Mengoptimalkan pengguna platform/promosi pariwisata berbasis digital lengkap dengan layanan penginapan yang menarik dan nyaman;
 4. Mendorong pihak swasta dalam penyediaan hotel/ penginapan yang nyaman untuk menarik wisatawan tinggal di Tomohon.
- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 6: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Pemajuan Budaya Lokal (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.29
Program yang Mendukung Sasaran Strategis 6 (PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 7 program yang mendukung sasaran strategis 6 (PK Induk Tahun 2025). Pada tahun 2025, semua program tersebut tertata dalam APBD. Hal ini sama seperti pada tahun 2024. Pelaksanaan program tersebut oleh 2 PD, yaitu: Dinas Pariwisata Daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian”
IKU Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	60	61	60	98	62	60	96,77	63	60	95,24	64	60	93,75	64	60	92,31	66	90,91
Capaian Kinerja Strategis																		92,31		

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya produksi komoditas pertanian sebesar 92,31% atau kategori **“sangat tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis sebanyak 1 indikator.

1. Produktivitas Bahan Pangan

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon dalam mewujudkan indikator produktivitas bahan pangan menggunakan teknologi dan inovasi unggul untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Tomohon. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini, yaitu:

$$\text{Produktifitas bahan pangan} = \frac{\text{Jumlah produksi bahan pangan padi}}{\text{Jumlah luas panen sebelumnya}}$$

Pada tahun 2025, jumlah produksi bahan pangan padi sebesar 5.898 ton, dan jumlah luas panen sebesar 983 Ha, sehingga produktifitas bahan pangan = $\frac{5.898 \text{ ton}}{983 \text{ Ha}} = 6 \frac{\text{ton}}{\text{Ha}} = 60 \text{ kw/Ha}$. Realisasi ini masih sedikit di bawah target tahun 2025 sebesar 64 Kw/Ha dengan capaian 92,31% kategori **“sangat tinggi”**.

Realisasi indikator ini sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, sama setiap tahunnya. Dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, pada tahun 2025, terjadi penurunan paling besar untuk jumlah produksi padi dan luas panen. Ini disebabkan karena adanya iklim elnino yang berkepanjangan sehingga lahan sawah tadah hujan tidak bisa ditanami padi.

Tabel 3.31
Jumlah Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bahan Pangan Jenis Padi sampai Tahun 2025

Tahun	Jumlah Produksi Padi (Ton)	Jumlah Luas Panen (Ha)	Produktivitas Bahan Pangan padi (Kw/Ha)
2022	8.405	1.401	60
2023	8.223	1.371	60
2024	7.329	1.221,6	60
2025	5.898	983	60

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon, 2026

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 66, realisasi pada tahun 2025 ini belum mencapai target akhir yang ditetapkan dengan capaian 90,91%.

Gambar 3.21
Penanaman dan Pemanenan Padi di Kota Tomohon



Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator produktivitas bahan pangan, yaitu:

1. Pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani;
2. Adanya ketersediaan fasilitas produksi bahan pangan tepat guna;
3. Adanya penanganan bencana pertanian (bahan pangan);
4. Adanya pendampingan kelompok tani;

5. Adanya peningkatan pertumbuhan produksi bahan pangan diukur dari jumlah produksi hasil budidaya jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar serta penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator produktivitas bahan pangan, yaitu:
 1. Adanya ahli fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman dan tempat pariwisata
 2. Pengaruh iklim dan cuaca terhadap stabilitas ketahanan pangan Kota Tomohon
 - Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator produktivitas bahan pangan, yaitu:
 1. Dalam menuju kemandirian pangan, produktivitas pangan dilakukan dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang unggul;
 2. Melakukan intensifikasi pertanian untuk mengoptimalkan jumlah panen.
 - Analisis program yang mendukung sasaran strategis 7: Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.32

Program yang Mendukung Sasaran Strategis 7 (PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Perikanan
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
5	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Perikanan

7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
---	--	-------------------------------

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 7 program yang mendukung sasaran strategis 7 (PK Induk Tahun 2025) dan semuanya tertata dalam APBD, sedangkan pada tahun 2024 hanya 3 program yang tertata dalam APBD. Pelaksanaan program tersebut oleh PD Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah.

Tabel 3.33
 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan”
 PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target (T)	Realisasi (R)	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Cadangan beras Pemerintah Kota	ton	3,55	3	3,621	120,7	3	3,591	119,7	37	11,8	31,89	37	0	0	37	18,4	49,73	37	49,73
2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	skor	85,77	88,8	89,74	101,06	87,1	91,45	104,99	87,6	91,45	104,39	88,1	91,45	103,80	88,6	94,7	106,88	89,1	106,29
Capaian Kinerja Strategis																		78,31		

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan sebesar 78,31% atau kategori **“tinggi”**. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 8 ini sebanyak 2 indikator yaitu cadangan beras pemerintah kota, dan pola pangan harapan ketersediaan.

1. Cadangan Beras Pemerintah Kota

Penyediaan cadangan pangan utama dalam hal ketersediaan beras wajib disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi apabila di suatu wilayah atau sulitnya pasokan bahan pangan dari suatu wilayah akibat adanya gangguan/bencana pada daerah pemasok beras, hal ini juga sejalan dengan peraturan menteri pertanian tentang cadangan beras pemerintah kabupaten/kota. Penguatan cadangan pangan yang dimaksudkan adalah penyediaan cadangan pangan beras pemerintah/cadangan beras pemerintah kota (CBPK). Cadangan Beras Pemerintah Kota Tomohon diukur dengan formula:

$$\text{Cadangan Beras Pemerintah Kota Tomohon} = \frac{80\% \times \text{cadangan beras total propinsi} \times \text{ratio jumlah penduduk Kota Tomohon terhadap jumlah penduduk propinsi}}$$

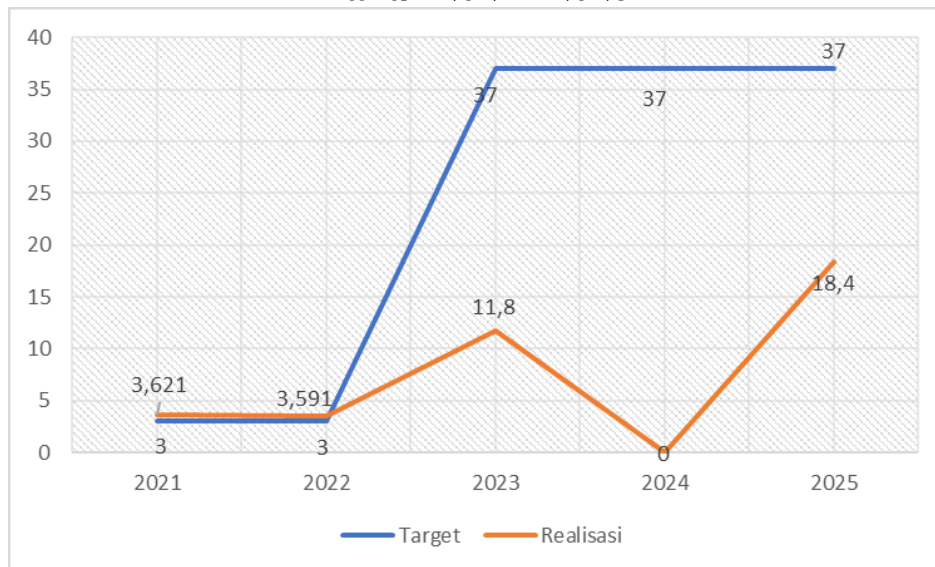
Berdasarkan formula perhitungan di atas, diperoleh penguatan cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon pada tahun 2025 dari target 37 ton, terealisasi sebesar 18,4 ton, masih jauh di bawah target yang ditetapkan dengan capaian 49,73% kategori “sangat rendah”.

Realisasi cadangan beras ini berfluktuatif sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025 dan tahun 2025 ini merupakan realisasi tertinggi. Dibandingkan dengan tahun 2024, cadangan beras pemerintah nol, barulah pada tahun 2025, Pemerintah Kota Tomohon mempunyai cadangan beras 18,4 ton. Secara rinci, realisasi cadangan beras pemerintah pada tahun 2021 sebesar 3,621 ton, tahun 2022 sebesar 3,591 ton, tahun 2023 sebesar 11,8 ton, tahun 2024 sebesar nol ton, dan tahun 2025 sebesar 18,4 ton.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 37 ton, realisasi pada tahun 2025 ini belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 49,73% dari target akhir yang ditetapkan. Sesuai Perbapanas Nomor 5 Tahun 2025 maka jumlah target cadangan beras nasional sebesar 3 – 3,5 juta ton berarti

dengan realisasi 18,4ton, Kota Tomohon telah berkontribusi sebesar 0,00061% untuk target nasional.

Gambar 3.22
Trend Target dan Realisasi Cadangan Beras Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator cadangan beras pemerintah kota, yaitu:
 1. Adanya komitmen dan dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan cadangan beras serta kerja sama yang baik antara pimpinan dan pelaksana kegiatan pengadaan cadangan baik Dinas Pangan maupun Pihak ketiga (bulog);
 2. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi, dengan bulog dan BPS dalam pengelolaan dan penyaluran beras di Kota Tomohon.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator cadangan beras pemerintah kota, yaitu:
 1. Terbatasnya waktu pengumpulan data cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon dengan ketersediaan data yang masih terlambat;
 2. Pergeseran anggaran tahun 2025 sehingga optimalisasi anggaran disesuaikan untuk prioritas lain.

- Strategi/solusi diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator cadangan beras pemerintah kota, yaitu:
1. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak ketiga maupun stakeholder yang berkaitan untuk mengoptimalkan pencapaian target cadangan beras Kota Tomohon serta percepatan penyusunan Perda tentang penyelenggaraan cadangan beras.
 2. Pembentukan tim kerja dalam melaksanakan kegiatan peningkatan cadangan beras Kota Tomohon;
 3. Evaluasi rutin untuk optimalisasi penentuan target cadangan beras;
 4. Penyaluran bantuan beras pangan kepada masyarakat untuk meringankan beban kebutuhan pokok sehari – hari.

2. Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan untuk mengukur keberagaman dan mutu gizi ketersediaan di suatu wilayah berdasarkan 9 kelompok pangan utama. Kesembilan kelompok pangan tersebut, yaitu: padi – padian, umbi – umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang – kacangan, gula, sayur dan buah serta aneka bumbu.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pemerintah Kota Tomohon diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skor Pola Pangan Harapan} = \text{Persentase AKG} \times \frac{\text{Bobot Masing-masing}}{\text{Kelompok Bahan Pangan}}$$

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan didapat dari dua alat analisis sebagai dasar perhitungan, yakni Analisis Neraca Bahan Makanan, dan Analisis Pola Pangan Harapan Ketersediaan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 94,7 Angka Kecukupan Gizi:

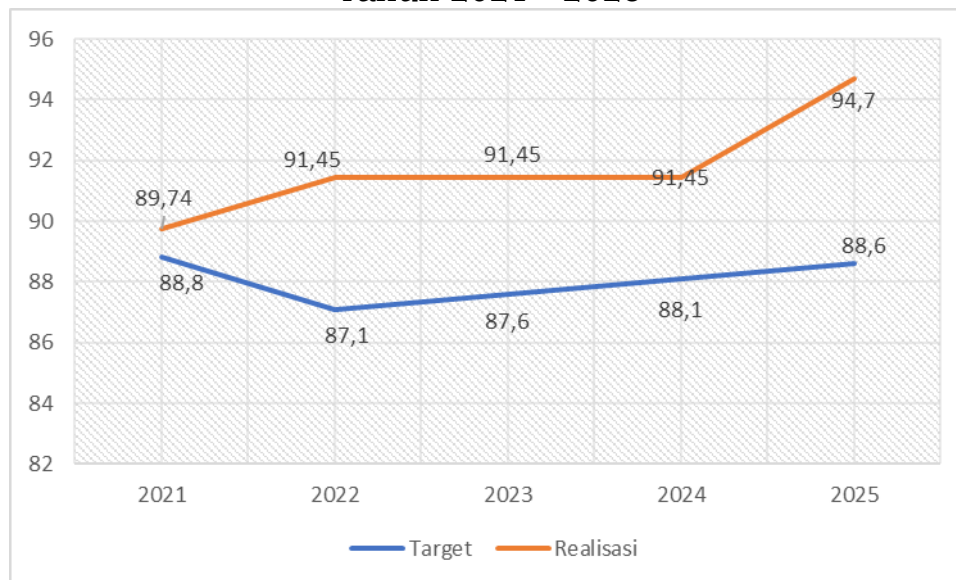
- Ketersediaan Energi per Kapita per Hari : 3.771 Kkal/Kapita/Hari
- Ketersediaan protein per Kapita per Hari : 101,36 Gram/Kapita/Hari

Pada tahun 2025, realisasi untuk PPH Ketersediaan sebesar 94,7 dan melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar 88,6 dengan

capaian 106,88% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, maka realisasi pada tahun 2025 merupakan tertinggi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Secara rinci, realisasi untuk PPH Ketersediaan pada tahun 2021 sebesar 89,74, tahun 2022 sebesar 91,45, tahun 2023 sebesar 91,45, tahun 2024 sebesar 91,45, dan tahun 2025 sebesar 94,7.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 89,1, realisasi pada tahun 2025 ini telah melampaui target dengan capaian 106,29% dari target akhir yang ditetapkan. Walaupun demikian, realisasi ini masih sedikit di bawah nasional yang sebesar 95,1 untuk tahun 2025.

Gambar 3.23
Trend Target dan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Tahun 2021 - 2025



➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator pola pangan harapan ketersediaan, yaitu:

1. Adanya sikap kooperatif dan terbuka dari pihak pemberi data pada saat pelaksanaan kegiatan pendataan dan permintaan data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon;
2. Sumber data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang diambil dapat dipercaya tingkat kebenarannya;
3. Pejabat pengolah data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi; dan

- Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator pola pangan harapan ketersediaan, yaitu:
 1. Terbatasnya petugas pendataan pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon atau enumerator di lapangan;
 2. Data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang dibutuhkan sebagai bahan analisis seringkali tidak lengkap; dan
 3. Terbatasnya waktu terhadap kebutuhan data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon dengan ketersediaan data yang masih terlambat.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator pola pangan harapan ketersediaan, yaitu:
 1. Membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon;
 2. Penguatan unit organisasi pelaksanaan kegiatan melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
 3. Evaluasi rutin dalam rangka peningkatan pemberdayaan fungsi management organisasi;
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya penganalisis ketahanan pangan.
- Analisis program yang mendukung keberhasilan sasaran strategis 8: Meningkatkan Ketahanan Pangan (PK Induk 2025)

Tabel 3.34
 Realisasi Anggaran atas Program yang Mendukung Sasaran Strategis 8
 Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 4 program yang mendukung sasaran strategis 8 (PK Induk Tahun 2025) dan semua

program tersebut tertata di APBD. Sedangkan pada tahun 2024 hanya 3 program yang tertata dalam APBD. Pelaksanaan program tersebut oleh PD Dinas Pangan Daerah.

Sasaran Strategis 9

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran “Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”
PK Induk Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026 (Akhir Tahun RPJM D)	Capaian s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	54,12	58-61	55,09	94,98	61-64	56,91	93,3	64-67	64,58	100,91	67-71	72,22	107,79	71	72,22	101,72	>75	96,29
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Indeks SPBE	Nilai	1,65	2	1,67	83,5	2,5	1,76	70,4	3	3	100	3,26	3,03	92,94	3,5	3,12	89,14	3,8	82,11
4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	3,1543	3,4	3,5660	104,88	3,45	3,1543	91,43	3,8	2,5406	66,86	4	2,57	64,25	4,1	2,6144	63,77	4,25	61,52
5	Nilai SAKIP Kota	Nilai	62,99	65-67	64,01	98,47	67-71	63,93	98,35	71-74	64,71	91,14	74,77	65,01	86,95	77	64,21	83,39	>80	80,26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis																	87,60			

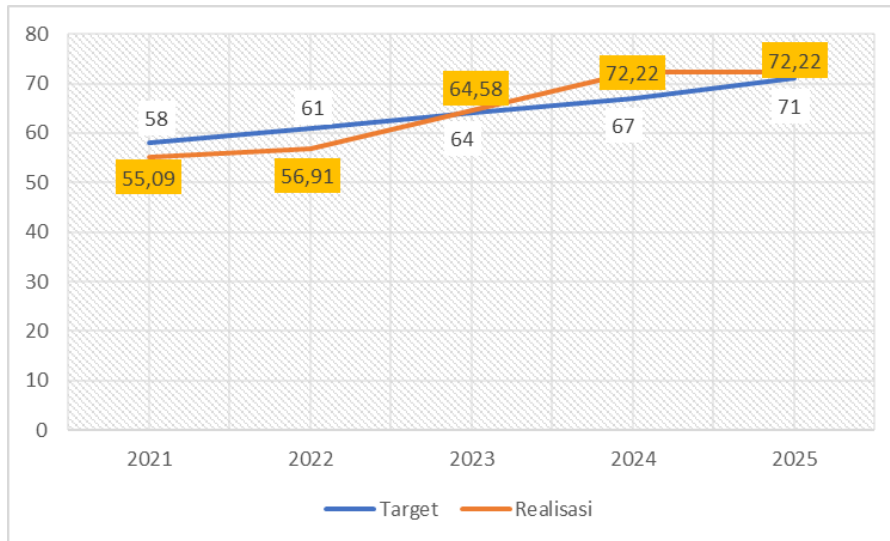
Capaian kinerja sasaran strategis Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik sebesar 87,60% atau kategori “**tinggi**”. Jumlah indikator untuk mengukur sasaran strategis 9 ini sebanyak 5 indikator yaitu indeks reformasi birokrasi, opini BPK terhadap laporan keuangan, indeks SPBE, skor kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan nilai SAKIP Kota.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon pada tahun 2025 masih memakai realisasi tahun 2024 sebesar 72,22, telah melampaui target untuk tahun 2025 sebesar 71 dengan capaian 101,72% kategori “sangat tinggi”. Realisasi indeks reformasi birokrasi meningkat signifikan setiap tahunnya sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2024. Adapun capaian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dicapai Pemerintah Kota Tomohon tahun 2020 dengan nilai 55,09 kategori CC, tahun 2021 dengan nilai 56,91 kategori CC, tahun 2022 dengan nilai 58,68 kategori B, tahun 2023 dengan nilai 64,58 kategori B dan tahun 2024 dengan nilai 72,22 kategori B. Tahun 2025 belum ada hasil evaluasi dari kementerian PAN RB sehingga masih memakai realisasi tahun 2024.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 75, realisasi sampai tahun 2024 ini belum mencapai target dengan capaian 96,29% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2024 ini telah mencapai target nasional pada tahun 2024 dimana diarahkan untuk mencapai nilai 71,55 kategori “baik”. Harapannya jika telah ada hasil pada tahun 2025, maka dapat mencapai target nasional tahun 2025 dengan pencapaian predikat minimal A “memuaskan”, nilai 80 – 90.

Gambar 3.24
Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025



Gambar 3.25
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUBERMAN KAL. 40, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKS/HELE (021) 7396323, SITUS <http://www.mempang.id>

Nomor : B/588/RB.06/2025 28 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Yth.
**Sekretaris Daerah
 Pemerintah Kota Tomohon**
 di
 Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Tomohon. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional". Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kota Tomohon tahun 2024 adalah 72,22 dengan kategori "BB".
 Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian	Bobot	2023	2024
1.	RB General	100	57,16	60,69
2.	RB Tematik	20	7,42	11,53
3.	Indeks RB	120	64,58	72,22
			B	BB

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya

Sumber: LHE Pelaksanaan RB Tahun 2025

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks reformasi birokrasi, yaitu:
 1. Adanya komitmen pimpinan untuk membuat program pendukung indikator RB General dan RB Tematik;
 2. Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan oleh PD pengampu melalui implementasi program dan kegiatan;
 3. Menyempurnakan indikator kinerja individu;
 4. Memperkuat pelaksanaan agen perubahan;
 5. Meningkatkan pengendalian internal;
 6. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas; dan
 7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks reformasi birokrasi, yaitu:
 1. Kurangnya pemahaman terkait penajaman RB General dan RB Tematik;
 2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tomohon;
 3. Terdapat Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik dikarenakan keterbatasan anggaran; dan
 4. Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks reformasi birokrasi, yaitu:
 1. Dalam menyusun road map Reformasi Birokrasi tahun 2021-2024 harus memperhatikan hasil reuiu terhadap kekurangan road map periode sebelumnya, mengintegrasikan dengan RPJMD Kota Tomohon dan menindaklanjuti Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik;
 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Penajaman Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik terhadap seluruh PD;

3. Pemerintah Kota Tomohon perlu mengalokasikan dana yang diperuntukkan untuk pembuatan inovasi-inovasi dalam Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik; dan
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kota Tomohon.

2. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dijadikan indikator dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan provinsi Sulawesi Utara terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 yang akan diserahkan pada Tahun 2026, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember. Namun untuk hasil dari BPK masih dalam proses, sehingga untuk realisasi masih memakai data tahun 2024.

Target Kinerja tahun 2026 yang ingin dicapai adalah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang duabelas kali guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan didukung oleh penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP. Disadari bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dan Instansi terkait,

bertekad akan terus bekerja keras untuk mempertahankan opini yang diberikan oleh BPK RI.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:
 1. Adanya sosialisasi Peraturan walikota Tomohon Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 2. Komitmen Pimpinan untuk mempertahankan Opini WTP dengan melaksanakan Evaluasi dan pengawasan secara berjenjang;
 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:
 1. Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh perangkat daerah karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online) oleh masing-masing perangkat daerah sehingga terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan perangkat daerah itu sendiri;
 2. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:
 1. Mendayagunakan komitmen dari setiap Perangkat Daerah untuk taat waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 2. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang;
 3. Meningkatkan komitmen koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah;
 4. Mendayagunakan ide-ide dalam pengembangan sarana dan prasarana;

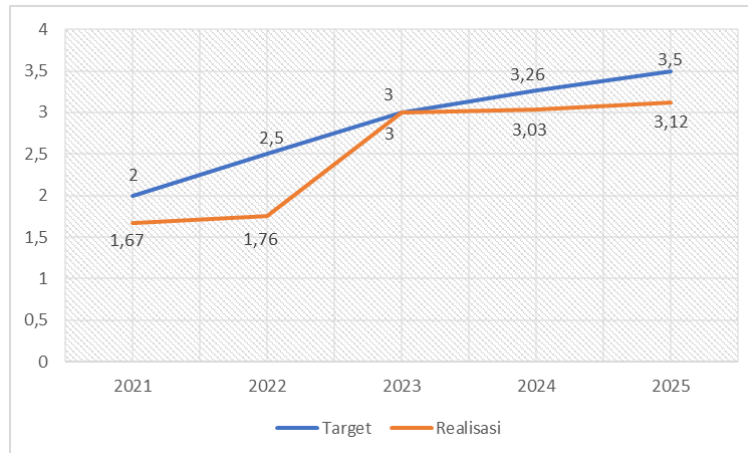
5. Pemanfaatan lembaga diklat dan penyesuaian penyusunan laporan keuangan; dan
6. Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern;
7. Melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap OPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
8. Mentaati aturan yang berlaku;
9. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
10. Pengembangan SDM yang berkesinambungan;

3. Indeks SPBE

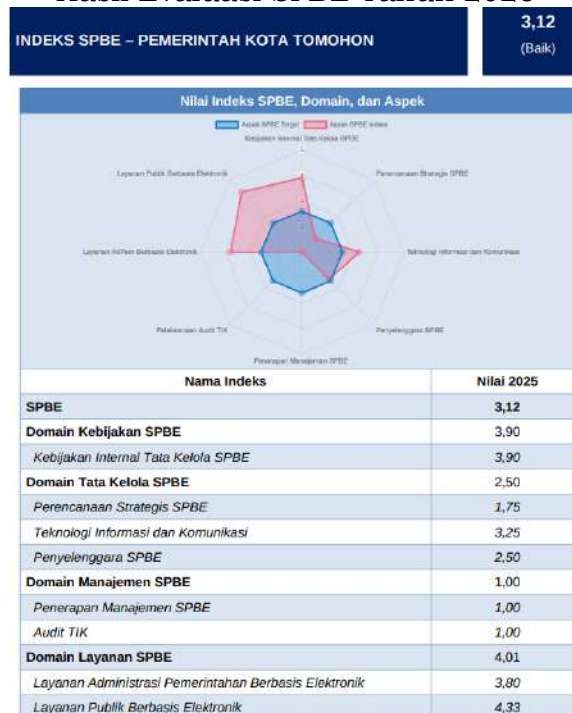
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna yaitu: instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip: efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Hasil audit Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap tingkat penerapan SPBE Kota Tomohon tahun 2025 sebesar 3,12 dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 3,5, maka realisasi tahun 2025 masih di bawah target dengan capaian 89,14% kategori tinggi. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025, indeks SPBE selalu mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan tahun 2024, indeks SPBE naik sebesar 0,09 di tahun 2025. Secara rinci, realisasi indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 1,67, tahun 2022 sebesar 1,76, tahun 2023 sebesar 3, tahun 2024 sebesar 3,03, dan tahun 2025 sebesar 3,12.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 3,8, realisasi pada tahun 2025 belum mencapai target akhir yang ditetapkan dengan capaian 82,11%. Hasil SPBE Kota Tomohon sudah sesuai dengan target nasional yaitu, peningkatan SPBE didorong untuk melebihi angka pada tahun – tahun sebelumnya.

Gambar 3.26
Trend Target dan Realisasi Indikator SPBE Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



Gambar 3.27
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025



Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 untuk Pemerintah Kota Tomohon, Kementerian PAN & RB, 2025

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks SPBE, yaitu:

1. Adanya komitmen pemerintah dalam penguatan tata kelola SPBE;
 2. Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan SPBE sebagai acuan Perangkat Daerah;
 3. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi dan layanan digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator SPBE, yaitu:
1. Belum optimalnya integrasi aplikasi antar perangkat daerah;
 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus bidang SPBE;
 3. Proses pemenuhan bukti dukung penilaian SPBE yang memerlukan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator SPBE, yaitu:
1. Penguatan tata kelola SPBE melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan internal serta pedoman pelaksanaan SPBE;
 2. Peningkatan integrasi aplikasi pemerintahan antar Perangkat Daerah;
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis di bidang SPBE
 4. Penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pemenuhan bukti dukung penilaian SPBE

4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 – 2019 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kota Tomohon mendapat skor 2,6144 dengan kategori sedang. Realisasi ini masih di bawah target tahun 2025 sebesar 4,1 dengan capaian 63,77% kategori “rendah”. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,0444. Secara rinci, realisasinya untuk tahun 2021 sebesar 3,566, tahun 2022 sebesar 3,1543, tahun 2023 sebesar 2,5406, tahun 2024 sebesar 2,57 dan tahun 2025 sebesar 2,6144. Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 4,25, realisasi pada tahun 2025 masih di bawah target dengan capaian 61,52% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini menempatkan Pemerintah Kota Tomohon pada urutan ke-73 dari 90 kota di Indonesia, tetapi masih lebih tinggi dari realisasi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2,0202.

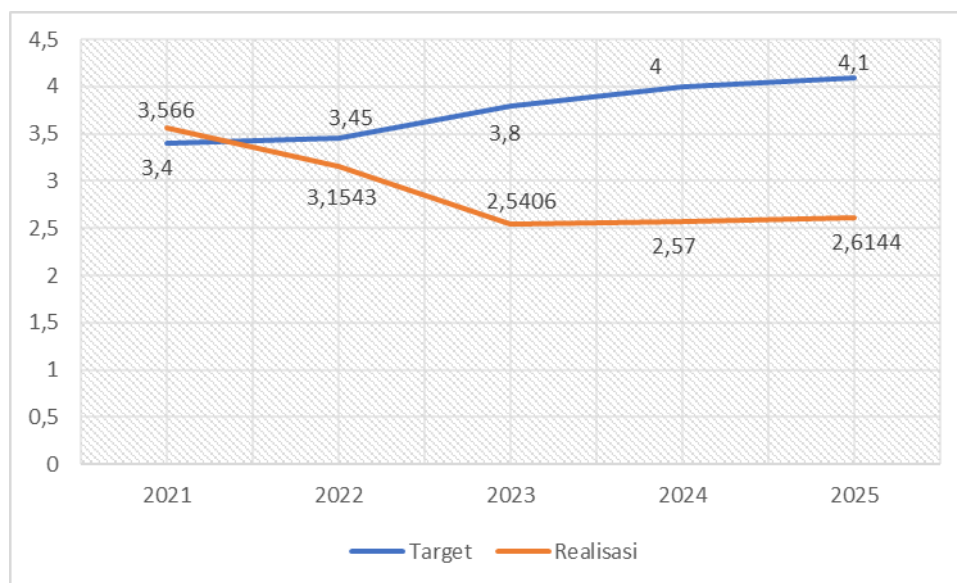
Tabel 3.36
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Beberapa Kota

Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
Provinsi Sulawesi Utara	2,0202	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow	3,0561	Sedang
Kabupaten Minahasa	2,4038	Rendah
Kabupaten Kepulauan Sangihe	2,9762	Sedang
Kabupaten Kepulauan Talaud	3,0683	Sedang
Kabupaten Minahasa Selatan	2,7316	Sedang
Kabupaten Minahasa Utara	2,9879	Sedang
Kabupaten Minahasa Tenggara	2,4702	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow	3,5353	Tinggi
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2,650	Sedang
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,6515	Sedang

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,1983	Sedang
Kota Manado	3,0623	Sedang
Kota Bitung	2,9710	Sedang
Kota Tomohon	2,6144	Sedang
Kota Kotamobagu	2,9736	Sedang

Sumber: Lampiran Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7 - 2019 Tahun 2025

Gambar 3.28
Trend Target dan Realisasi Indikator Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 - 2025



- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan Perangkat Daerah terhadap penyusunan LPPD;
 2. Penyusunan LPPD telah dilaksanakan secara elektronik (E-LPPD);
 3. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tomohon dengan seluruh perangkat Daerah;

4. Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik; dan
 5. Tingkat pemahaman tim penyusun LPPD sudah baik.
- Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
1. Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat waktu;
 2. Hasil EKPPD belum sepenuhnya menjadi bahan penetapan target capaian kinerja dalam perencanaan perangkat daerah maupun RKPD;
 3. Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat waktu;
 4. Penyajian data pendukung belum terpilah secara baik dan rapih; dan
 5. Kesalahan persepsi dalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan.
- Strategi/solusi pemecahan masalah
1. Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik;
 2. Menyelenggarakan bimbingan teknis atau workshop bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan capaian kinerja, serta menyusun data dukung akurat, jelas, rapih, baik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 3. Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung LPPD kepada Perangkat Daerah.

5. Nilai SAKIP Kota

Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

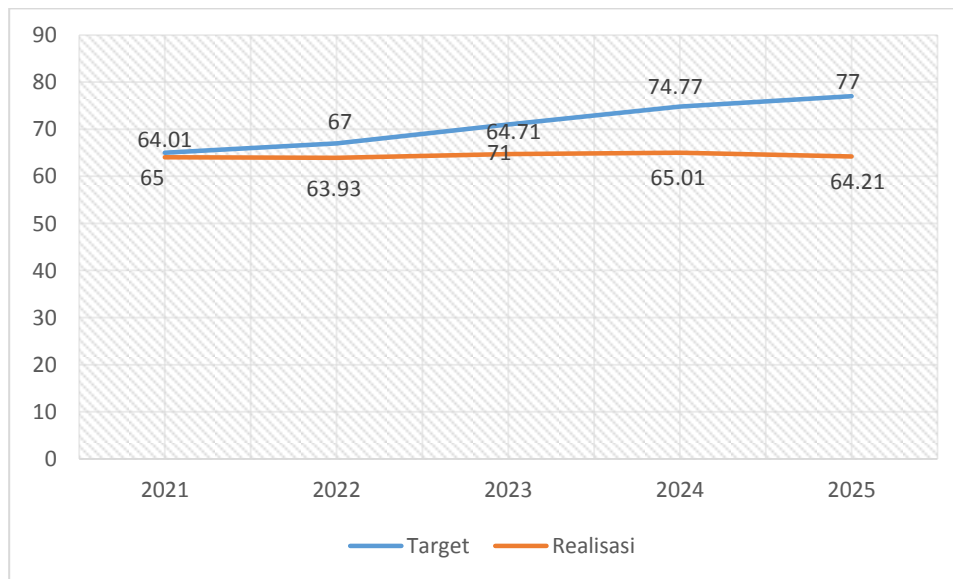
Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk piagam penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi kepada Kepala Daerah atas capaian tersebut. Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
2. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
3. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai, pada tahun 2026 untuk penilaian kinerja tahun 2025, Pemerintah Kota Tomohon mendapatkan nilai 64,21 dengan kategori B. Realisasi ini masih di bawah target tahun 2025 sebesar 77 dengan capaian 83,39% kategori “tinggi”. Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan hasil yang baik sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025 walaupun sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Secara rinci, realisasi tahun 2021 sebesar 64,01, tahun 2022 sebesar 63,93, tahun 2023 sebesar 64,71, tahun 2024 sebesar 65,01, dan tahun 2025 sebesar 64,21.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar >80, realisasi pada tahun 2025 belum mencapai target dengan capaian 80,26% dari target akhir yang ditetapkan.

Gambar 3.29
Trend Tareget dan Realisasi Nilai SAKIP Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



Gambar 3.30
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tomohon Tahun 2025

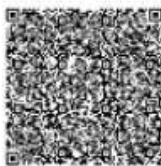
2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan nilai **64,21** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Tomohon dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan)
2. Yth. Menteri Dalam Negeri
3. Yth. Gubernur Sulawesi Utara
4. Yth. Wali Kota Tomohon

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator nilai SAKIP, yaitu:
 1. Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran kinerja baik dari sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level individu;
 2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
 3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat Daerah, serta kualitas evaluasi program;
 4. Adanya peningkatan dari Perangkat Daerah Dalam penyusunan LKjIP walaupun disadari masih banyak kekurangan;
 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi – inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;
 6. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP;
 7. Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim;
 8. Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan Perangkat Daerah secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator nilai SAKIP, yaitu:
 1. Sistem pengumpulan data/informasi di perangkat daerah belum optimal;
 2. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengelola SAKIP Perangkat Daerah dalam metode dan sistematika penyusunan SAKIP;
 3. Belum optimalnya akurasi data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan sebagai bahan penyusunan SAKIP Kota Tomohon;

4. Perangkat Daerah belum memahami cara menetapkan Indikator yang baik dan belum mengerti dalam menentukan Indikator Eselon II, eselon III dan eselon IV;
 5. Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada “output” daripada “outcome”;
 6. Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur logika program dan kinerja yang logis;
 7. Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja program yang belum berorientasi hasil (outcome);
 8. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam SAKIP; dan
 9. Belum dimanfaatkannya SAKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Strategi/solusi pemecahan masalah yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator ilai SAKIP, yaitu:
1. Memperbaiki Dokumen Perencanaan seiring dengan Perubahan RPJMD dan Renstra;
 2. Penguatan komitmen. Penguatan komitmen merupakan keniscayaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon;
 3. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala;
 4. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional;
 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SAKIP kepada seluruh perangkat daerah;
 6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat Daerah, serta kualitas evaluasi program;
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian kinerja, baik di tingkat Kota maupun di PD masing-masing, sebagai dasar penerapan pemberian reward and punishment, dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

8. Mengoptimalkan evaluasi kinerja Internal; dan
 9. Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung SAKIP kepada Perangkat Daerah.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 9: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.37

Program yang Mendukung Sasaran Strategis 9 (PK Induk Tahun 2025)

No	Program	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapelitbangda
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbangda
6	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapelitbangda
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
10	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tomohon Utara
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Utara
13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomohon Utara
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Kecamatan Tomohon Utara
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tomohon Timur
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Timur
17	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomohon Timur
18	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Kecamatan Tomohon Timur
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tomohon Tengah

20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Tengah
21	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomohon Tengah
22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tomohon Barat
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Barat
24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomohon Barat
25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tomohon Selatan
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tomohon Selatan
27	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomohon Selatan
28	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan
29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
30	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
31	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
32	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
JUMLAH		

Sesuai RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, terdapat 39 program yang mendukung sasaran strategis 9 (PK Induk Tahun 2025), tetapi dalam pelaksanaan tahun 2025 hanya 32 program yang tertata di APBD. Pada tahun 2024, hanya 31 program yang tertata di APBD. Pelaksanaan program tersebut oleh 12 PD, yaitu: Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Deerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan Tomohon Selatan, Kecamatan Tomohon Timur, Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Barat, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah.

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (PK Induk Tahun 2025)

Tabel 3.38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tiap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	$5=3/4 \times 100\%$
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	83,69%	93,74%	89,28%
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	76,79%	52,21%	147,09%
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	102,03%	56,07%	181,97%
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	150,80%	84,97%	177,47%
5	Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	96,76%	92,67%	104,41%
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	36,06%	98,16%	36,74%
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	92,31%	80,23%	115,06%
8	Meningkatnya ketahanan pangan	78,31%	79,79%	98,15%
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	87,60%	91,04%	96,22%

Berdasarkan hasil di atas, efisiensi penggunaan sumber daya dinilai efisien untuk kedelapan sasaran strategis dalam PK Induk Tahun 2025. Tetapi sasaran strategis 6: meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal dinilai tidak efisien.

b. PK Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi
1	

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi”
PK Perubahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,47	77	76,47	99,31	80	95,59
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						99,31		

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama mengandung tiga unsur penting, yaitu kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, dan kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Indeks Kerukunan Umat Beragama memakai sumber publikasi dari Kementrian Agama, tidak seperti Indeks Toleransi dalam IKU Induk 2025 yang memakai publikasi dari Setara Institute.

Realisasi tahun 2025 masih memakai *baseline* tahun 2024 sebesar 76,47. Realisasi tahun 2025 masih menunggu publikasi dari Kementrian Agama. Realisasi ini masih sedikit di bawah target tahun 2025 sebesar 77 dengan capaian 99,31% kategori “sangat tinggi”. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 – 2029, masih di bawah target dengan capaian 95,59%. Secara nasional, pada tahun 2025 indeks kerukunan umat beragama sebesar 77,89.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks kerukunan beragama, yaitu:

1. Terselenggaranya kegiatan dan pembentukan kerjasama dengan mitra kerja / Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
 2. Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan insentif kepada para rohaniawan setiap bulannya.
 3. Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan rumah ibadah.
 4. Pemerintah Kota Tomohon telah menyediakan dukungan layanan keagamaan.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks kerukunan beragama, yaitu:
- Dalam pelaksanaan indikator Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran masih terdapat politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks kerukunan beragama, yaitu:
1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama dalam rangka meningkatkan sinergitas kerukunan umat beragama.
 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerima perbedaan di Kota Tomohon.
 3. Menumbuhkan sifat saling percaya dan saling memahami antar masyarakat
 4. Memberikan pemahaman bahwa realitas keberagaman dalam kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan sosial.
 5. Memberikan bantuan bagi pembangunan/renovasi rumah ibadah dan insentif bagi para rohaniawan.
- Analisis Program yang mendukung sasaran strategis 1: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi (PK Perubahan Tahun 2025), yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan Kesbangpol;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan Kesbangpol;
3. Program Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan Dikbud.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,92	84,15	80,08	95,16	86,75	92,31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						95,16		

2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk apat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor – faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP. Indeks ketahanan pangan merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah berdasarkan tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Adapun indikator – indikator untuk mengukur IKP, yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Rata – rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*);
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 3.41
Bobot Indikator Kota Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	-
Sub Total		-
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
Sub Total		0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,08
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
Sub Total		0,55

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

Penghitungan IKP dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Standardisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100);
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing – masing nilai indikator yang sudah distandardisasi dengan bobot indikator, dengan formula:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

dimana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9

j : Kota ke-1, 2, 3, ...96, 97, dan 98

Y_j : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke- j

a_i : Bobot masing – masing indikator ke- i

X_{ij} : Nilai standarisasi masing – masing indikator ke- i pada kabupaten/kota ke- j ;

3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP.

Cut off point IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing - masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. *Cut off point* untuk kota, sebagai berikut:

- Kelompok IKP 1 dengan nilai $\leq 28,84$;
- Kelompok IKP 2 dengan nilai $> 28,84 - 41,44$;
- Kelompok IKP 3 dengan nilai $> 41,44 - 51,29$;
- Kelompok IKP 4 dengan nilai $> 51,29 - 61,13$;
- Kelompok IKP 5 dengan nilai $> 61,13 - 70,64$;
- Kelompok IKP 6 dengan nilai $> 70,64$;

IKP Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 80,08, masih di bawah target tahun 2025 sebesar 84,15 dengan capaian 95,16% kategori “sangat

tinggi”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 83,92, IKP Kota Tomohon di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,84. Pada tahun 2021 sampai tahun 2024, IKP Kota Tomohon terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Walaupun demikian, jika dilihat dari peringkat IKP Kabupaten Kota, pada tahun 2024 telah mengalami penurunan drastis. Peringkat IKP Kota Tomohon menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021 berada pada urutan ke-41, tahun 2022 urutan 65, tahun 2023 urutan ke-52, dan tahun 2024 urutan ke-143.

Secara rinci, realisasi IKP Kota Tomohon sebagai berikut: pada tahun 2021 sebesar 80,32, pada tahun 2022 sebesar 72,89, pada tahun 2023 sebesar 83,14, pada tahun 2024 sebesar 83,92, dan pada tahun 2025 sebesar 80,08. Sepanjang tahun 2021 sampai 2025, IKP Kota Tomohon berada diatas nilai *cut off* 70,64 yang berarti masuk dalam kelompok 6 atau merupakan kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik sesuai pengelompokan. Realisasi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 menggunakan sumber dari Badan Pangan Nasional, dan untuk tahun 2025 belum ada publikasi dari Badan Pangan Nasional dan masih memakai sumber dari Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon. Realisasi IKP tahun 2025 belum mencapai target tahun 2030 sebesar 86,75 tetapi sudah mencapai 92,31% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi tahun 2025 lebih tinggi dari realisasi nasional yang sebesar 73,00.

Tabel 3.42
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2024

10 entries per page Search: tomohon

NOMOR	KODE PROV	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	KODE KAB/KOTA	TIPE	TAHUN	IKP	PERINGKAT KAB/KOTA	KELO
500	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2018	71.76	50	6
1014	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2019	77.81	46	6
1528	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2020	79.44	40	6
2042	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2021	80.32	41	6
2556	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2022	72.89	65	6
3070	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2023	83.14	52	6
3584	71	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	7173	Kota	2024	83.92	143	6

Showing 1 to 7 of 7 entries (filtered from 3,598 total entries)

Sumber: Situs resmi Badan Pangan Nasional, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks ketahanan pangan, yaitu:
 1. Pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani terutama untuk menaikkan produksi pangan;
 2. Adanya ketersediaan fasilitas produksi bahan pangan tepat guna;
 3. Pemberian bantuan sarana pertanian kepada petani;
 4. Pengembangan prasarana pertanian;
 5. Adanya pendampingan kelompok tani;
 6. Pelaksanaan pasar murah untuk menjaga ketahanan pangan dengan menaikkan daya beli masyarakat;
 7. Pelaksanaan operasi pasar terutama saat menjelang hari raya Natal, Tahun Baru, Paskah, Idul Fitri untuk memonitor stabilitas harga bahan pokok;
 8. Adanya pengawasan keamanan pangan;
 9. Adanya peningkatan pertumbuhan produksi bahan pangan diukur dari jumlah produksi hasil budidaya jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar serta penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian.

- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator produktivitas bahan pangan, yaitu:
 1. Adanya ahli fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman dan tempat pariwisata
 2. Pengaruh iklim dan cuaca terhadap stabilitas ketahanan pangan Kota Tomohon

- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator produktivitas bahan pangan, yaitu:
 1. Dalam menuju kemandirian pangan, produktivitas pangan dilakukan dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang unggul;

2. Melakukan intensifikasi pertanian untuk mengoptimalkan jumlah panen.
 3. Mengusahakan adanya Peraturan Daerah tentang alih fungsi lahan terutama sawah.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 2: Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau (PK Perubahan Tahun 2025), yaitu:
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan;
 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Pangan;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan;
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan;
 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan;
 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan;
 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,72	67,97	81,64	120,11	70	116,63
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						120,11		

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 81,64. Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan 2025 sebesar 67,97, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target dengan capaian 120,11% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan *baseline* tahun 2024, maka IKLH Kota Tomohon pada tahun 2025 meningkat sebesar 13,92. Realisasi tahun 2025 sudah mencapai target akhir periode tahun 2030 yang ditargetkan sebesar 70 dengan capaian 116,63% dari target akhir yang ditetapkan. Hasil pada tahun 2025 ini telah melampaui target nasional dimana pada tahun 2045 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia dapat mencapai 76,12.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Perhitungan IKLH dengan mempertimbangkan tiga faktor, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) .$$

Sesuai data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon tahun 2025, diketahui:

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 = 91,35

Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 = 83,93

Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 = 60,72

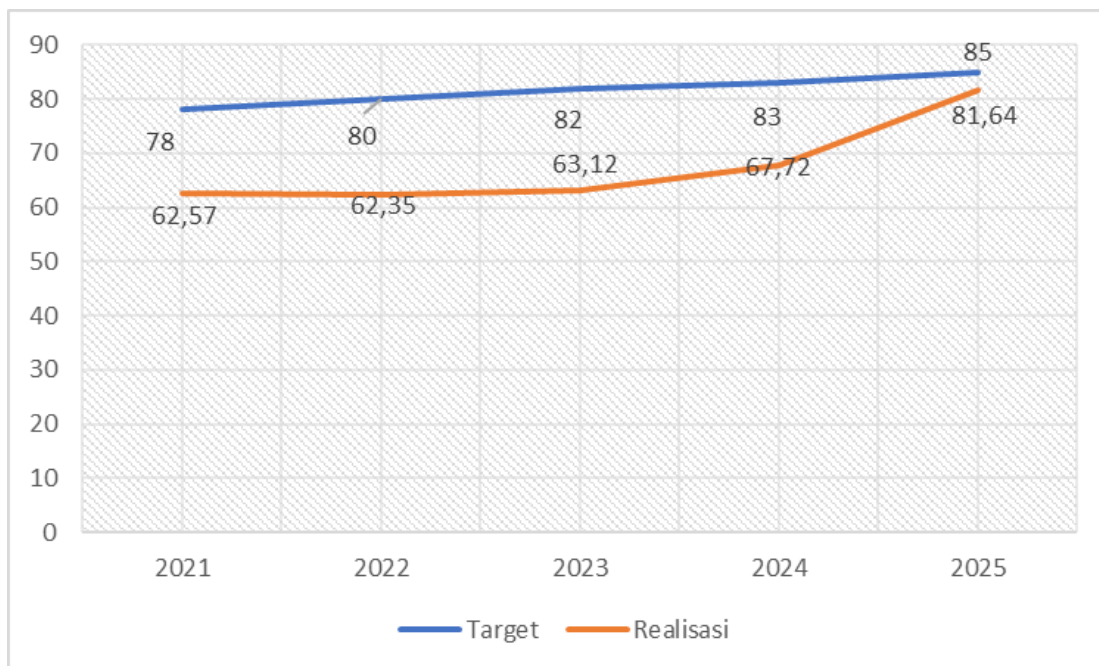
Dengan menggunakan formula, IKLH diperoleh sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times 91,35) + (0,405 \times 83,93) + (0,219 \times 60,72) = 81,64$$

Sesuai target pada tahun 2025 sebesar 85, IKLH Kota Tomohon belum mencapai target dengan capaian 91,44% kategori “sangat tinggi”. IKLH Kota Tomohon mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun dan pada tahun 2025 merupakan nilai tertinggi yang dicapai sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Bila dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2025, IKLH naik secara drastis sebesar 13,92, jauh melampaui kenaikan antar tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan sangat tinggi pada indeks kualitas air dan lahan dimana indeks kualitas air naik sebesar 37,35 dan indeks kualitas lahan naik sebesar 18,97. Tetapi terjadi penurunan pada indeks kualitas udara sebesar 10,57. Secara rinci, IKLH untuk tahun 2021 sebesar 62,57, tahun 2022 sebesar 62,35, tahun 2023 sebesar 63,12, tahun 2024 sebesar 67,72, dan tahun 2025 sebesar 81,64.

Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026, sebesar 85, realisasi IKLH pada tahun 2025 masih sedikit di bawah target dengan capaian 96,04% dari target akhir yang ditetapkan. Hasil pada tahun 2025 ini telah melampaui target nasional dimana pada tahun 2045 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia dapat mencapai 76,12.

Gambar 3.31
Trend Target dan Realisasi Indikiator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.44
Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air	45.0	45.0	43.75	54.00	91,35
2	Indeks Kualitas Udara	89.65	90.32	92.64	94.50	83,93
3	Indeks Kualitas Lahan	42.64	40.40	-	41.75	60,72
	IKLH	62.57	62.35	63.12	67.72	81,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon, 2026

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator IKLH, yaitu:
1. Adanya bantuan dari KLHK melalui pengadaan terminal/ alat *online monitoring (Onlimo)* sebagai sarana pengujian kualitas air sungai;

2. Adanya bantuan dari KLHK melalui pengadaan *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yang berfungsi sebagai sarana pengujian kualitas udara;
 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, misalnya tidak membuang sampah di sungai;
 4. Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memberikan dasar, arah, dan *road map* pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator IKLH, yaitu:
1. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara;
 2. Semakin Tingginya alih fungsi lahan produktif ke lahan terbangun;
 3. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga;
 4. Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
 5. Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal.
 6. Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping berdampak tidak baik terhadap kesehatan lingkungan di sekitar TPA.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator IKLH, yaitu:
1. Melaksanakan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air permukaan di Kota Tomohon.
 2. Menyelenggarakan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih, sehat dan pengelolaan sampah;
 3. Melaksanakan kampanye penanaman pohon, seperti di kawasan Lokon, dan wajib tanam pohon untuk pasangan yang akan menikah;
 4. Pembatasan penggunaan racun pertanian dan pupuk kimia;

5. Melakukan pengujian emisi gas untuk kendaraan bermotor.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (PK Perubahan Tahun 2025), yaitu:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Program Pengelolaan Persampahan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	78,75	78	80,65	103,40	85	94,88
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						103,40		

4. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 80,65. Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan tahun 2025 sebesar 78, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target dengan capaian 103,40% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka indeks infrastruktur Kota Tomohon pada tahun 2025

meningkat sebesar 1,9. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir periode tahun 2030 yang ditargetkan sebesar 85 dengan capaian 94,88% dari target akhir yang ditetapkan.

Indeks infrastruktur merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur terhadap pembangunan di Kota Tomohon. Indeks infrastruktur Kota Tomohon diukur melalui 3 (tiga) indeks pengukuran, yaitu:

1. persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik, diperoleh dari data survey kondisi jalan yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik baik itu melalui pekerjaan pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan jalan,
2. persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat,
3. persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik.

Perentase jalan kota dalam kondisi baik di tahun 2025, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang jalan kota seluruhnya}} \times 100\% = \frac{483,16 \text{ Km}}{563,67 \text{ Km}} \times 100\% = 85,72\%$$

Gambar 3.32
Program Penyelenggaraan Jalan



Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran tidak tersumbat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase kota (km)}} \times 100\%$$
$$\frac{64 \text{ Km}}{70 \text{ Km}} \times 100\%$$
$$= 91,43\%$$

Gambar 3.33
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



Sumber: Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon, 2026

Persentase luas irigasi kota dalam kondisi baik termasuk dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Luas irigasi kota dalam kondisi baik (ha)}}{\text{Luas irigasi kota (ha)}} \times 100\%$$

$$\frac{270,88 \text{ ha}}{418 \text{ ha}} \times 100\%$$

$$= 64,80\%$$

Gambar 3.34
Peningkatan Jaringan Irigasi



Berdasarkan 3 (tiga) indeks pengukuran di atas, maka diperoleh formula perhitungan untuk mengetahui Indeks infrastruktur sebagai berikut:

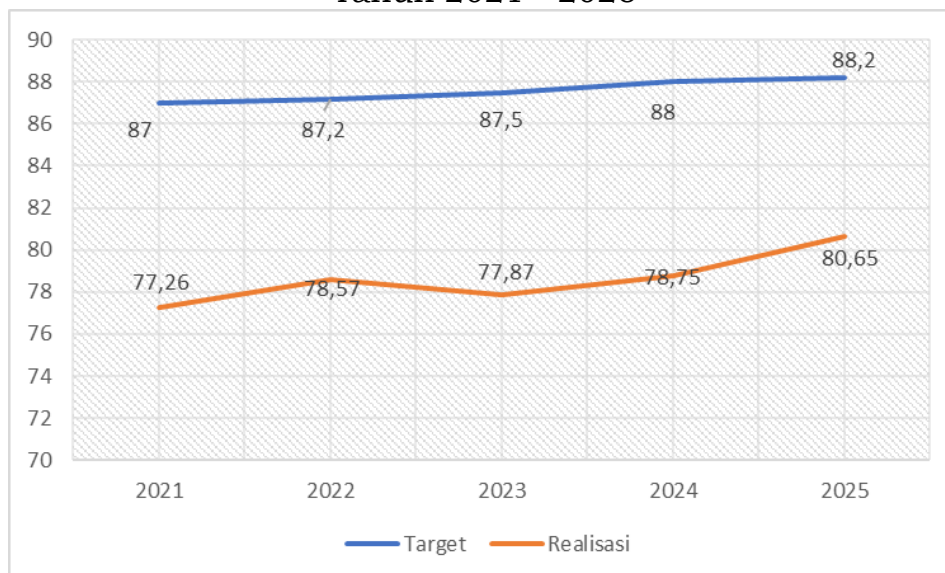
$$\frac{\text{Persentase Jalan dalam Kondisi baik} + \text{Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik} + \text{Persentase Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Indeks Ukuran}} \times 100$$

Sesuai formula perhitungan di atas maka dapat di peroleh persentase indeks infrastruktur tahun 2025, yaitu:

$$\frac{85,72 + 91,43 + 64,80}{3} \times 100\% = 80,65$$

Realisasi tahun 2025 ini masih sedikit di bawah target sebesar 88,2 dengan capaian 91,44% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, maka realisasi di tahun 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 dapat menyentuh angka 8 sementara untuk tahun – tahun sebelumnya masih pada angka 7. Secara rinci, untuk tahun 2021 sebesar 77,26, tahun 2022 sebesar 78,75, tahun 2023 sebesar 77,87, tahun 2024 sebesar 78,75, dan tahun 2025 sebesar 80,65. Sesuai target akhir RPJMD 2021 – 2026 sebesar 88,5, realisasi untuk indeks infrastruktur pada tahun 2025 belum mencapai target dengan capaian 91,13% dari target akhir yang ditetapkan.

Gambar 3.35
Trend Target dan Realisasi Indikator Indeks Infrastruktur Kota Tomohon Tahun 2021 - 2025



- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dan stakeholders dalam mendukung aksesibilitas jalan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal-tujuan dengan aman dan nyaman;
 2. Adanya pemeliharaan jalan rutin/berkala sepanjang tahun;
 3. Adanya pengelolaan sistem drainase yang menjamin terpeliharanya kondisi jalan Kota Tomohon;
 4. Komitmen Pemerintah kota Tomohon untuk pemenuhan kebutuhan pangan khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan irigasi untuk menunjang pertanian.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Pemutakhiran database jalan dan jembatan belum secara reguler.
 2. Faktor cuaca, banyaknya curah hujan sehingga tampungan drainase tidak mencukupi dan seringkali menyebabkan kerusakan jalan.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks infrastruktur, yaitu:
 1. Melaksanakan pemetaan jaringan jalan dan kondisinya secara berkala;
 2. Melaksanakan perbaikan jalan secara rutin/berkala;
 3. Menguji kembali kelayakan desain saluran drainase yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal;
 4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi penting dari keberadaan saluran drainase baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 4: meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan (PK Perubahan tahun 2025), yaitu:
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
6. Program Pengembangan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
8. Program Penyelenggaraan Jalan, dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
10. Program Pengembangan Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perkim;
11. Program Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perkim;
12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dilaksanakan oleh Dinas Perkim;
13. Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU), dilaksanakan oleh Dinas Perkim;
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dilaksanakan oleh semua Kecamatan;

Sasaran Strategis 5 Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Sasaran “Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persentase	2,05	2,1	2,30	109,52	2,38	96,64
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						109,52		

5. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku

Sektor pariwisata dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha, terdiri dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sesuai data BPS Kota Tomohon pada tahun 2025, PDRB Harga Berlaku menurut lapangan usaha untuk penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp.147,16 miliar. Sedangkan total PDRB Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha sebesar Rp.6.386,85 miliar. Sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2025 adalah

$$\frac{147,16}{6.386,85} \times 100\% = 2,30\%.$$

Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan tahun 2025 sebesar 2,1, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target dengan capaian sebesar 109,52% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku pada tahun 2025 meningkat sebesar signifikan sebesar 0,25. Untuk target tahun 2030, realisasi pada tahun 2025 masih sedikit di bawah target dengan capaian 96,64% dari target akhir yang ditetapkan.

Tabel 3.47
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	13,87	13,91	14,02	14,34	14,64
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9,16	9,84	9,16	9,03	9,13
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,47	6,58	6,53	6,51	6,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,41	0,39	0,36	0,37	0,37
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	21,50	20,52	20,36	19,23	18,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,87	11,11	11,51	11,76	11,80
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,24	5,47	5,91	6,08	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,84	1,90	1,99	2,05	2,30
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,80	3,85	3,86	3,95	3,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,17	1,99	1,82	1,77	1,74
Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,86	3,75	3,67	3,70	3,77
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,86	6,52	6,33	6,45	6,21
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,85	2,94	3,05	3,24	3,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,57	8,61	8,68	8,62	8,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,25	2,34	2,47	2,60	2,63
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2026

- Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku, yaitu:
 1. Pelaksanaan TIFF 2025 yang mampu mendongkrak pengembangan sektor – sektor seperti akomodasi dan makan minum;
 2. Beroperasinya 3 obyek wisata yang menunjang PAD di Kota Tomohon, yaitu: Pemandian Air Panas Lahendong, Air Terjun Tekaian Telu dan Danau Linow. Adapun juga telah dibangunnya beberapa fasilitas di objek wisata Danau Linow dengan tujuan dapat menarik minat wisatawan.
 3. Adanya koodinasi yang baik dengan *stakeholders* pariwisata di Kota Tomohon untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata di Kota Tomohon;
 4. Adanya hotel dan penginapan yang memadai di Kota Tomohon;
 5. Terlaksananya kegiatan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan.
 6. Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri;
 7. Adanya wisata kuliner sebagai penggerak utama sektor pariwisata, karena pengeluaran terbesar wisatawan di Kota Tomohon adalah makan minum.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku, yaitu:
 1. Manajemen penataan/pengelolaan obyek wisata milik pemerintah belum profesional;
 2. Kurangnya hotel bintang 4 atau 5 di Kota Tomohon;
 3. Belum maksimalnya pengembangan wisata kuliner;
 4. Berkurangnya lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku, yaitu:

1. Mendorong investasi melalui pengembangan destinasi wisata dan pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya;
 2. Menumbuhkan gerakan sadar wisata, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi destinasi wisata;
 3. Mendorong pihak swasta dalam penyediaan hotel/ penginapan yang nyaman untuk menarik wisatawan tinggal di Tomohon;
 4. Pengembangan Kawasan Strategis termasuk kawasan pariwisata dan kawasan kuliner di Kota Tomohon;
 5. Memperkuat promosi wisata melalui penyelenggaraan event-event kepariwisataan;
 6. Mengoptimalkan pengguna platform/promosi pariwisata berbasis digital lengkap dengan layanan penginapan yang menarik dan nyaman;
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 5: Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan (PK Perubahan 2025), yaitu:
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
 2. Program Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata

Tabel 3.48

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,06	80-80,5	80,65	100,81	81,78 – 82,2	98,62
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						100,81		

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 80,65. Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan tahun 2025 sebesar 80 – 80,5, maka realisasi tahun 2025 sudah melampaui target dengan capaian 100,81% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka IPM Kota Tomohon pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,59. IPM Kota Tomohon naik secara signifikan setiap tahunnya dan pada tahun 2025 merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi pada tahun 2025 untuk Kota Tomohon jauh lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 76,32 dan nasional yang sebesar 75,90. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir periode tahun 2030 yang ditargetkan sebesar 81,78 – 82,2 dengan capaian 98,62% dari target akhir yang ditetapkan.

Tabel 3.49
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Pembentuk dan
Kabupaten Kota, 2022 - 2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir ¹ (tahun)				Harapan Lama Sekolah (tahun)				Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bolaang Mongondow	71,68	71,94	72,16	72,48	11,61	11,63	11,65	11,82	8,17	8,36	8,38	8,49
Minahasa	74,68	74,96	75,22	75,60	14,17	14,18	14,19	14,20	9,82	10,11	10,23	10,25
Kepulauan Sangihe	74,24	74,49	74,70	75,02	12,59	12,60	12,61	12,80	8,49	8,64	8,65	8,70
Kepulauan Talaud	72,96	73,25	73,51	73,92	12,65	12,66	12,67	12,84	9,73	9,91	9,96	9,97
Minahasa Selatan	73,76	74,07	74,35	74,74	12,98	12,99	13,02	13,03	9,19	9,41	9,43	9,53
Minahasa Utara	74,26	74,50	74,70	75,02	13,06	13,07	13,08	13,27	10,18	10,30	10,35	10,36
Bolaang Mongondow Utara	73,15	73,41	73,63	73,93	12,34	12,38	12,39	12,58	8,57	8,58	8,61	8,63
Siau Tagulandang Biaro	74,08	74,40	74,67	75,10	12,02	12,03	12,04	12,05	9,21	9,25	9,43	9,51
Minahasa Tenggara	72,84	73,11	73,36	73,71	12,44	12,45	12,60	12,61	9,12	9,13	9,14	9,16
Bolaang Mongondow Selatan	70,61	70,80	70,94	71,14	12,31	12,33	12,34	12,35	8,16	8,17	8,28	8,38
Bolaang Mongondow Timur	73,00	73,25	73,45	73,73	11,88	11,90	11,91	12,11	8,09	8,27	8,29	8,30
Kota Manado	74,78	75,02	75,24	75,58	14,17	14,19	14,20	14,21	11,43	11,44	11,46	11,52
Kota Bitung	73,98	74,22	74,43	74,76	12,65	12,66	12,67	12,88	9,91	9,94	9,96	10,05
Kota Tomohon	74,93	75,28	75,57	75,99	14,23	14,24	14,38	14,39	10,75	10,99	11,03	11,04
Kota Kotamobagu	74,37	74,70	74,97	75,37	12,89	12,90	13,05	13,25	10,32	10,33	10,35	10,36
SULAWESI UTARA	73,59	73,85	74,08	74,44	12,95	12,96	12,97	12,98	9,68	9,77	9,84	9,91

Provinsi	Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)				IPM			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Bolaang Mongondow	10.614	10.915	11.507	11.756	69,82	70,48	71,14	71,83
Minahasa	12.690	13.027	13.681	14.035	77,72	78,48	79,26	79,73
Kepulauan Sangihe	11.631	11.946	12.409	12.839	73,35	73,94	74,43	75,18
Kepulauan Talaud	8.869	9.146	9.512	9.953	71,53	72,22	72,83	73,68
Minahasa Selatan	11.717	12.090	12.529	12.986	74,5	75,25	75,79	76,47
Minahasa Utara	11.593	11.958	12.412	12.846	75,92	76,5	77,05	77,76
Bolaang Mongondow Utara	9.285	9.652	10.170	10.434	70,39	70,97	71,66	72,28
Siau Tagulandang Biaro	8.401	8.742	9.062	9.335	70,18	70,81	71,55	72,17
Minahasa Tenggara	10.753	11.034	11.511	11.981	72,56	72,97	73,68	74,28
Bolaang Mongondow Selatan	9.238	9.593	10.114	10.519	68,66	69,17	69,92	70,54
Bolaang Mongondow Timur	9.390	9.741	10.191	10.600	69,35	70,09	70,68	71,43
Kota Manado	14.399	14.822	15.301	15.755	80,96	81,4	81,86	82,40
Kota Bitung	12.665	12.954	13.539	13.804	75,94	76,33	76,9	77,57
Kota Tomohon	12.268	12.488	13.045	13.503	78,65	79,29	80,06	80,65
Kota Kotamobagu	11.151	11.452	12.074	12.337	75,56	76,01	76,86	77,49
SULAWESI UTARA	11.179	11.497	11.998	12.450	74,52	75,04	75,68	76,32

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2026

Pada komponen rata – rata lama sekolah, Kota Tomohon pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,04 tahun. Ini menjadikan Tomohon sebagai tertinggi kedua setelah Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini juga lebih tinggi dari pada Sulawesi Utara yang sebesar 9,91 tahun dan nasional yang sebesar 9,07 tahun.

Pada komponen Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun, Kota Tomohon pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp.13,50 juta dan merupakan tertinggi keempat di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar Rp.12,45 juta dan nasional yang sebesar Rp.12,8 juta.

Secara umum, IPM Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 80,65 melampaui target yang ditetapkan sebesar 77 dengan capaian 104,74% kategori “sangat tinggi”. IPM Kota Tomohon naik secara signifikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 sebesar 78,09, tahun 2022 sebesar 78,65, tahun 2023 sebesar 79,29, tahun 2024 sebesar 80,06, dan tahun 2025 sebesar 80,65.

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator IPM, yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi, dan renovasi ruang kelas; serta peningkatan kualitas tenaga pengajar di Kota Tomohon;
2. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang memiliki latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, pemberian bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu, pemberian bantuan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi;
3. Kemitraan dengan lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta;
4. Peningkatan tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat di setiap pusat-pusat layanan kesehatan;
5. Peningkatan sarana prasarana dan layanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kelurahan;

6. Adanya dua Rumah Sakit Swasta dan satu Rumah Sakit Pemerintah di Kota Tomohon;
 7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon yang meningkatkan daya beli masyarakat
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator IPM, yaitu:
1. Kebutuhan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan jumlah siswa;
 2. Kebiasaan yang kurang sehat di beberapa tempat dalam masyarakat yang berdampak pada resiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes yang menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan umur harapan hidup.
 3. Kenaikan harga bahan pokok yang cenderung melemahkan daya beli masyarakat terutama pada hari raya seperti Natal, Tahun Baru, Paskah dan Idul Fitri.
- Strategi/solusi diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator IPM, yaitu
1. Peningkatkan kuantitas tenaga pendidik dengan mengangkat tenaga pendidik honorer menjadi PNS ataupun P3K;
 2. Penyuluhan kepada masyarakat tentang kebiasaan hidup sehat baik secara langsung maupun dengan himbauan melalui media massa seperti radio dan pamflet;
 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi PNS dan masyarakat serta mendorong kampanye perilaku hidup sehat melalui puskesmas di setiap kecamatan;
 4. Melakukan pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis pada puskesmas di setiap kecamatan;
 5. Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah secara rutin untuk memantau dan menyeimbangkan harga bahan pokok terutama menjelang hari raya.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 6: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata (PK Perubahan 2025), yaitu:
1. Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan oleh Dikbud;

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan oleh Dikbud;
3. Program Pengembangan Kurikulum, dilaksanakan oleh Dikbud;
4. Program Pembinaan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Sasaran Strategis 7 Meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,74	5,00 – 5,50	5,41	108,20	6,70 – 7,00	80,75
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67	3,7	3,71	100,27	3,82	97,12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						104,24		

7. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 5,41%. Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan tahun 2025 sebesar 5,00% – 5,50%, maka realisasi tahun 2025 sudah mencapai target dengan capaian 108,20% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,67. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024, tetapi pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon berhasil naik pada tahun 2025. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir periode tahun 2030 yang ditargetkan sebesar 6,7% – 7% dengan capaian 80,75% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2025, masih lebih kecil dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi

Utara yang sebesar 5,66% tetapi lebih besar dari nasional yang sebesar 5,11%.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Indikator laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan formula:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_{rt} - PDRB_{rt-1}}{PDRB_{rt-1}} \times 100\%$$

dimana:

rt = tahun pengamatan PDRB

rt - 1 = tahun pengamatan PDRB sebelumnya.

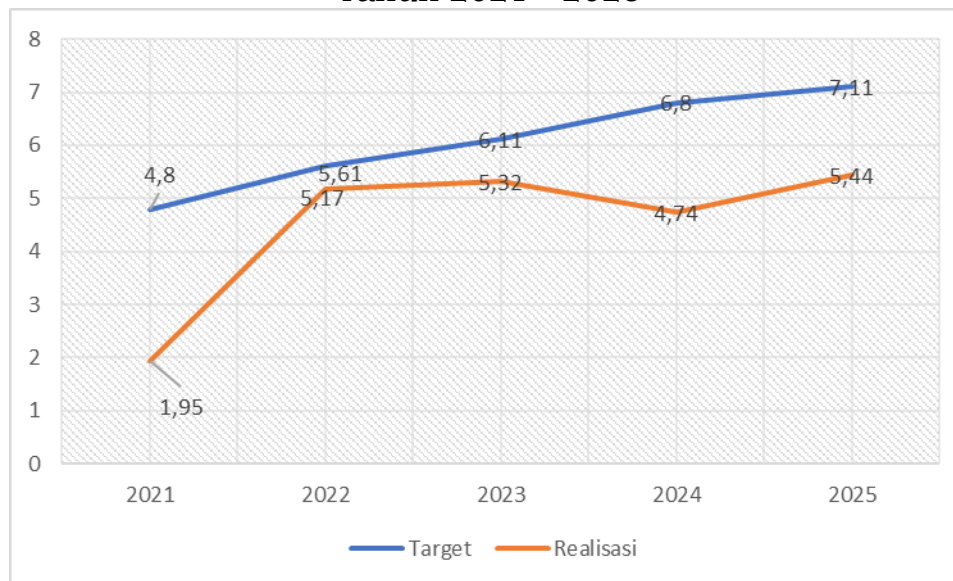
Sesuai data, maka dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025, yaitu:

PDRB tahun 2025 = 3.927,94 (miliar rupiah)

PDRB tahun 2023 = 3.726,48 (miliar rupiah)

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025} = \frac{3.927,94 - 3.726,48}{3.726,48} \times 100\% = 5,41\%$$

Gambar 3.36
Trend Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon
Tahun 2021 - 2025



Tabel 3.51
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota
Tomohon (miliar rupiah), Tahun 2021 – 2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024**	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	420,8	452,8	481,5	508,95	541,87
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	300,3	314,6	326,8	331,79	358,17
C Industri Pengolahan/Manufacturing	204,4	216,6	228,4	239,11	259,66
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	9,9	10,8	11,3	11,78	12,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	15,7	16,0	16,0	16,46	17,52
F Konstruksi/Construction	726,8	738,3	768,1	775,80	775,96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	348,5	375,8	406,3	431,26	451,45
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	134,5	42,9	153,2	165,15	173,62
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	59,2	65,5	72,9	78,82	94,25
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	141,5	153,7	162,3	173,60	187,48

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	71,4	67,5	65,8	68,49	71,06
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	133,6	138,2	141,7	149,41	158,76
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,4	1,5	1,6	1,76	1,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	183,1	186,9	192,4	211,40	219,93
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	85,6	93,0	100,3	109,37	115,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	302,6	323,5	339,3	353,09	381,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	72,3	80,5	90,0	100,25	107,88
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		3.211,9	3.378,0	3.557,7	3.726,48	3.927,94

Sumber: Tomohon dalam Angka 2026, BPS Kota Tomohon

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 didorong oleh semua sektor yang bertumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya. Sektor yang paling pesat pertumbuhannya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,58%. Sedangkan sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar Kota Tomohon hanya bertumbuh sebesar 0,02%. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum didorong oleh pelaksanaan TIFF (*Tournament International Festival Flower*) yang diadakan Pemerintah Kota setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2025, pelaksanaannya berhasil dan mampu menggerakkan atau mendongkrak pertumbuhan PDRB dengan signifikan. Secara lebih rinci, pertumbuhan dari berbagai sektor PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon 2021 - 2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,35	7,60	6,35	5,70	6,47	L Real Estat/Real Estate Activities	-2,35	3,50	2,48	5,48	6,25
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,98	4,75	3,88	1,53	7,95	M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,26	4,60	7,71	7,93	4,35
C Industri Pengolahan/Manufacturing	4,93	5,94	5,46	4,69	8,60	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,16	2,06	2,92	9,90	4,03
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,43	9,39	4,05	4,63	1,90	P Jasa Pendidikan/Education	4,00	8,70	7,82	9,06	5,58
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,10	2,10	-0,37	3,19	6,43	Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	9,30	6,90	4,87	4,07	7,91
F Konstruksi/Construction	2,14	1,57	4,04	1,01	0,02	R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	3,30	11,30	11,88	11,36	7,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,96	7,81	8,13	6,14	4,68	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	1,95	5,17	5,32	4,74	5,41
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,63	6,16	7,25	7,77	5,13						
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,37	10,65	11,25	8,18	19,58						
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,35	8,60	5,56	6,99	8,00						
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,27	-5,47	-2,51	4,02	3,76						

Sumber: Tomohon dalam Angka 2026, BPS Kota Tomohon

Sesuai target akhir tahun RPJMD 2021 – 2026 sebesar 7,61%-8,11%, realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2025 belum mencapai target dan hanya mampu mencapai 71,09% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2025, masih lebih kecil dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Utara yang sebesar 5,66% tetapi lebih besar dari nasional yang sebesar 5,11%.

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pelaksanaan TIFF 2025 yang mampu mendongkrak sektor – sektor seperti akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan sebesar 19,58% dan sektor jasa lainnya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,62%;
2. Intervensi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam pemberdayaan UMKM;
3. Kemudahan perijinan dalam investasi di Kota Tomohon;

4. Perkembangan informasi dan teknologi yang memungkinkan pengusaha terutama UMKM memasarkan hasil produksinya melalui media online;
 5. Terpeliharanya suasana kondusif di Kota Tomohon yang menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha;
 6. Adanya program kegiatan dari pemerintah pusat seperti makanan bergizi gratis yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dari warga masyarakat, dari sisi harga bahan pokok tertentu yang stabil, atau dari penyerapan tenaga kerja.
- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Melonjaknya harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama beberapa jenis bahan pokok terutama saat hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, Paskah, Idul Fitri;
 2. Pilihan lapangan pekerjaan yang relatif terbatas di Kota Tomohon;
 3. Perkembangan sektor konstruksi yang relatif sama seperti tahun 2024;
 4. Pilihan profesi berusaha dari kaum muda yang lebih fokus kepada pekerjaan – pekerjaan yang mudah, langsung berdampak, dan keuntungannya besar. Beberapa daerah di Kota Tomohon, telah kekurangan petani usia muda dikarenakan kaum mudanya lebih memilih berprofesi sebagai kurir makanan, sopir, tukang, pegawai, atau pekerjaan di media sosial.
- Strategi/solusi pemecahan masalah yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Melaksanakan TIFF secara berkala setiap tahunnya sambil terus melakukan peningkatan dari segi promosi, keterlibatan masyarakat, dampak terhadap ekonomi masyarakat, dan kualitas event;
 2. Mendorong pertumbuhan UMKM dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan membuka lokasi usaha strategis, seperti kawasan pusat kota;

3. Mempermudah perijinan dalam investasi di Kota Tomohon;
4. Tetap menjaga suasana kota yang kondusif dengan meningkatkan keamanan di lingkungan masing – masing, melakukan penataan kota untuk mejamin keasrian kota, serta mempererat keharmonisan antar umat beragama;
5. Mengefektifkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di Kota Tomohon;
6. Melakukan upaya – upaya mendapatkan tambahan dana pembangunan melalui usulan dan proposal ke Kementrian/Lembaga.
7. Bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menunjang program strategis nasional, seperti makanan bergizi gratis dan koperasi merah putih;
8. Menurunkan angka kemiskinan secara signifikan;
9. Mengadakan operasi pasar terutama harga bahan pokok untuk menstabilkan harga;
10. Meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dengan berbagai intervensi pemerintah menyangkut kebijakan dan implementasinya;
11. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.

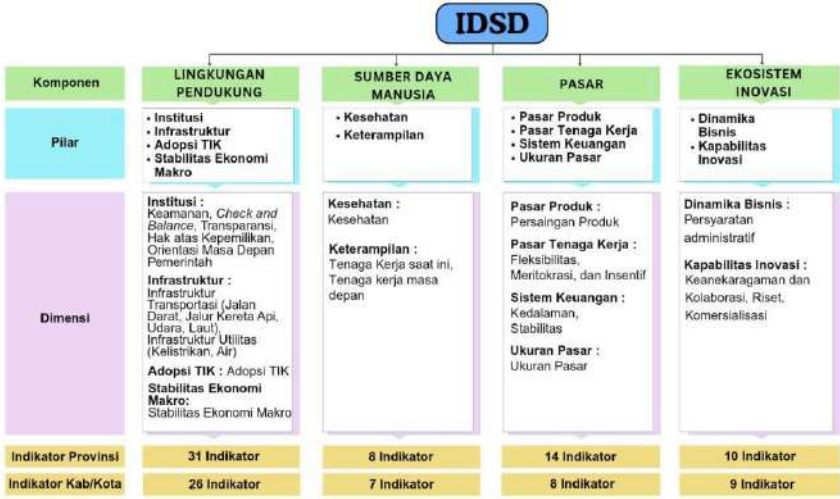
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Pengukuran IDSD tahun 2025 mengadopsi kerangka Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang telah disesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional. Pengukuran terhadap 12 pilar yang terdiri dari 63 indikator digunakan untuk tingkat provinsi dan 50 indikator untuk tingkat kabupaten/kota.

Proses penyusunan dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi melalui pengembangan konsep, harmonisasi data lintas kementrian/lembaga, serta penjaminan mutu untuk memastikan

konsistensi dan keandalan hasil pengukuran. Data dasar IDSD tahun 2025 menyajikan potret perkembangan daya saing daerah pada berbagai pilar utama serta produktivitas wilayah secara komprehensif.

Gambar 3.37
Kerangka Pengukuran IDSD Tahun 2025



Sumber: BRIN, 2026

IDSD Kota Tomohon pada tahun 2025 sebesar 3,71. Sesuai target tahun 2025 dalam PK Perubahan tahun 2025 sebesar 3,7, maka realisasi tahun 2025 sudah mencapai target dengan capaian 100,27% kategori “sangat tinggi”. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka IDSD Kota Tomohon pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,04. Pada tahun 2024 dan tahun 2025, Kota Tomohon berada pada urutan ketiga tertinggi kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir periode tahun 2030 yang ditargetkan sebesar 3,82 dengan capaian 97,12% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Utara yang sebesar 3,62 dan rata – rata nasional yang sebesar 3,5.

Tabel 3.53
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 - 2025

Nama Daerah	Tahun 2024	Tahun 2025
Sulawesi Utara	3,52	3,62
Bolaang Mongondow	3,22	3,26
Minahasa	3,65	3,71

Kepulauan Sangihe	3,35	3,38
Kepulauan Talaud	3,09	3,18
Minahasa Selatan	3,41	3,45
Minahasa Utara	3,53	3,52
Bolaang Mongondow Utara	3,16	3,11
Kepulauan Sitaro	3,25	3,26
Minahasa Tenggara	3,23	3,21
Bolaang Mongondow Selatan	2,92	2,99
Bolaang Mongondow Timur	2,99	3,11
Kota Manado	4,18	4,23
Kota Bitung	3,39	3,47
Kota Tomohon	3,67	3,71
Kota Kotamobagu	3,69	3,74

Sumber: BRIN, 2026

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator Indeks Daya Saing Daerah, yaitu:

1. Meningkatnya indeks SPBE Kota Tomohon;
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon;
3. Adanya transparansi anggaran;
4. Terjaminnya kebebasan pers;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik;
6. Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel;
7. Adanya upaya pencegahan korupsi yang berjalan setiap tahun;
8. Meningkatnya indeks infrastruktur;
9. Akses air minum layak lebih dari 95%;
10. Penggunaan jaringan internet yang luas di masyarakat untuk mengakses data dan informasi terbaru;
11. Percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025;
12. Angka harapan sekolah yang tinggi;
13. Angka harapan hidup yang tinggi;
14. Banyaknya lembaga perbankan di Tomohon;
15. Adanya kesetaraan upah perempuan dan laki – laki;
16. Kinerja pelayanan publik yang baik di lingkungan instansi pemerintah;
17. Meningkatnya publikasi ilmiah tentang Kota Tomohon;

- Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indikator Indeks Daya Saing Daerah, yaitu:
 1. Nilai investasi di Kota Tomohon masih rendah;
 2. Jumlah pengangguran terbuka masih tinggi;
 3. Terbatasnya jenis lapangan pekerjaan yang dapat menampung pekerja sesuai dengan keahliannya;
 4. Masih rendahnya belanja riset Pemerintah Kota Tomohon.
 5. Menurunnya indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025.
- Strategi/solusi pemecahan masalah yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indikator Indeks Daya Saing Daerah, yaitu:
 1. Mendorong pertumbuhan investasi di Kota Tomohon terutama pada sektor jasa dan makan minum yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tomohon;
 2. Mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Tomohon yang secara langsung dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Tomohon;
 3. Mempermudah perijinan dalam investasi di Kota Tomohon;
 4. Tetap menjaga suasana kota yang kondusif dengan meningkatkan keamanan di lingkungan masing – masing, melakukan penataan kota untuk mejamin keasrian kota, serta mempererat keharmonisan antar umat beragama;
 5. Mengefektifkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di Kota Tomohon;
 6. Melakukan upaya – upaya mendapatkan tambahan dana pembangunan melalui usulan dan proposal ke Kementrian/Lembaga.
 7. Bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menunjang program strategis nasional, seperti makanan bergizi gratis dan koperasi merah putih;
 8. Mengadakan operasi pasar terutama harga bahan pokok untuk menjaga inflasi;

9. Mengadakan pasar murah secara berkala untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
 10. Memberikan bantuan sosial dan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 7: Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat (PK Perubahan 2025), yaitu:
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dilaksanakan oleh DPMPTSP;
 2. Program Promosi Penanaman Modal, dilaksanakan oleh DPMPTSP;
 3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dilaksanakan oleh DPMPTSP;
 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
 11. Program Rehabilitasi Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 12. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 13. Program Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 14. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;

15. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
16. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
17. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
18. Program Pengembangan UMKM, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Sasaran Strategis 8 Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi dan digitalisasi layanan

Tabel 3.54
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi dan digitalisasi layanan” (PK Perubahan 2025)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun awal 2024	Tahun 2025			Target Tahun 2030 (Akhir Tahun RPJMD)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,22	71	72,22	101,72	75	96,29
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						100,86		

9. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon pada tahun 2025 masih memakai realisasi tahun 2024 sebesar 72,22, telah melampaui target untuk tahun 2025 sebesar 71 dengan capaian 101,72% kategori “sangat tinggi”. Realisasi indeks reformasi birokrasi meningkat signifikan setiap tahunnya sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2024. Adapun capaian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dicapai Pemerintah Kota Tomohon tahun 2020 dengan nilai 55,09 kategori CC, tahun 2021 dengan nilai 56,91 kategori CC, tahun 2022 dengan nilai 58,68 kategori B, tahun 2023 dengan nilai 64,58 kategori B dan tahun 2024

dengan nilai 72,22 kategori B. Tahun 2025 belum ada hasil evaluasi dari kementerian PAN RB sehingga masih memakai realisasi tahun 2024.

Sesuai target akhir tahun 2030 sebesar 75, realisasi sampai tahun 2024 ini belum mencapai target dengan capaian 96,29% dari target akhir yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2024 ini telah mencapai target nasional pada tahun 2024 dimana diarahkan untuk mencapai nilai 71,55 kategori “baik”. Harapannya jika telah ada hasil pada tahun 2025, maka dapat mencapai target nasional tahun 2025 dengan pencapaian predikat minimal A “memuaskan”, nilai 80 – 90.

➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator indeks reformasi birokrasi, yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk membuat program pendukung indikator RB General dan RB Tematik;
2. Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan oleh PD pengampu melalui implementasi program dan kegiatan;
3. Menyempurnakan indikator kinerja individu;
4. Memperkuat pelaksanaan agen perubahan;
5. Meningkatkan pengendalian internal;
6. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas; dan
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

➤ Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator indeks reformasi birokrasi, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terkait penajaman RB General dan RB Tematik;
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tomohon;
3. Terdapat Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik dikarenakan keterbatasan anggaran; dan
4. Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator indeks indeks reformasi birokrasi, yaitu:
1. Dalam menyusun road map Reformasi Birokrasi tahun 2021-2024 harus memperhatikan hasil reuiu terhadap kekurangan road map periode sebelumnya, mengintegrasikan dengan RPJMD Kota Tomohon dan menindaklanjuti Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik;
 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Penajaman Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik terhadap seluruh PD;
 3. Pemerintah Kota Tomohon perlu menganggarkan dana yang diperuntukkan untuk pembuatan inovasi-inovasi dalam Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik; dan
 4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kota Tomohon.

10. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 yang akan diserahkan pada Tahun 2026, Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dijadikan indikator dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan provinsi Sulawesi Utara terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 yang akan diserahkan pada Tahun 2026, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember. Namun untuk hasil dari BPK masih dalam proses, sehingga untuk realisasi masih memakai data tahun 2024.

Target Kinerja tahun 2026 yang ingin dicapai adalah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang duabelas kali guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan didukung oleh penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP. Disadari bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dan Instansi terkait, bertekad akan terus bekerja keras untuk mempertahankan opini yang diberikan oleh BPK RI.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:
 1. Adanya sosialisasi Peraturan walikota Tomohon Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 2. Komitmen Pimpinan untuk mempertahankan Opini WTP dengan melaksanakan Evaluasi dan pengawasan secara berjenjang;
 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pencapaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:
 1. Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh perangkat daerah karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online) oleh masing-masing perangkat daerah sehingga terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan perangkat daerah itu sendiri;
 2. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Strategi/solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi dalam mendukung indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, yaitu:

1. Mendayagunakan komitmen dari setiap Perangkat Daerah untuk taat waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 2. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang;
 3. Meningkatkan komitmen koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah;
 4. Mendayagunakan ide-ide dalam pengembangan sarana dan prasarana;
 5. Pemanfaatan lembaga diklat dan penyesuaian penyusunan laporan keuangan; dan
 6. Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern;
 7. Melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap OPD dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
 8. Mentaati aturan yang berlaku;
 9. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
 10. Pengembangan SDM yang berkesinambungan;
- Analisis program yang mendukung sasaran strategis 8: Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan (PK Perubahan 2025), yaitu:
1. Program Pendaftaran Penduduk, dilaksanakan oleh Dinas Capil;
 2. Program Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Capil;
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Kominfo;
 4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dilaksanakan oleh Dinas Kominfo;
 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dilaksanakan oleh Kecamatan;
 6. Program Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Bapelitbangda;
 7. Program Riset dan Inovasi Daerah, dilaksanakan oleh Bapelitbangda;

8. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Bapelitbangda;
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan oleh BPKPD;
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan oleh BPKPD;
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat;
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan oleh Inspektorat;
13. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
14. Program Perekonomian dan Pembangunan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
16. Program Kepegawaian Daerah, dilaksanakan oleh BKPSDM;
17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan oleh BKPSDM.

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (PK Perubahan Tahun 2025)

Tabel 3.55
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tiap Sasaran Strategis (PK Perubahan Tahun 2025)

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100\%$
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	99,31%	98,93%	100,39%
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	95,16%	83,16%	114,43%
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	120,11%	90,33%	132,97%
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	103,40%	94,99%	108,85%
5	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	235,24%	98,91%	237,83%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas	100,81%	40,60%	248,32%
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	104,24%	68,82%	151,47%
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	100,86%	68,82%	146,55%

Berdasarkan hasil di atas, efisiensi penggunaan sumber daya dinilai efisien untuk semua sasaran strategis dalam PK Perubahan Tahun 2025.

A. Realisasi Anggaran

a. PK Induk Tahun 2025

Tabel 3.56

Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis (PK Induk Tahun 2025)

No	Sasaran	No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.850.000	1.175.884.860	99,58%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	612.772.653	610.872.652	99,69%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	228.210.000	226.654.700	99,32%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	473.360.000	471.839.310	99,68%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.427.820.000	2.382.990.000	98,15%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.782.698.670	7.979.953.160	90,86%	SatPolPP	
		JUMLAH			13.705.711.323	12.848.194.682	93,74%	
2	Meningkatnya perekonomian	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	192.535.800	66.636.400	34,61%	Dinas Koperasi	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

Kota Tomohon						dan UMKM	
	2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.960.000	100.860.000	99,90%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak Tertata di APBD 2025
	4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	286.325.000	15.500.000	5,41%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	5	Program Pengembangan UMKM	214.000.000	-	0,00%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
	7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
	8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	450.000.000	123.019.750	27,34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	9	Program Pengembangan Ekspor	31.155.200	25.451.700	81,69%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	10	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	41.030.000	30.260.200	73,75%	Dinas Perdagangan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

						dan Perindustrian	
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	160.067.500	91.019.450	56,86%		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
12	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	656.101.400	506.310.703	77,17%		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	65.457.549	37.540.700	57,35%		DPMPTSP	
16	Program Promosi Penanaman Modal	187.427.751	178.145.040	95,05%		DPMPTSP	
17	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.056.975	89.057.100	89,90%		DPMPTSP	
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	75.917.300	74.773.100	98,49%		DPMPTSP	
19	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4.911.200	521.200	10,61%		DPMPTSP	
	JUMLAH	2.564.945.675	1.339.095.343	52,21%			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1	Program Pengelolaan Pendidikan	22.198.479.549	6.727.765.815	30,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Program Pengembangan Kurikulum				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Tertata di APBD 2025
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.791.605.850	4.391.803.959	91,66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Tertata di APBD 2025
		5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Tertata di APBD 2025
		6	Program Pembinaan Perpustakaan	709.446.007	125.719.000	17,72%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		7	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	112.500.000	40.382.036	35,90%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		8	Program Pengelolaan Arsip	46.672.722	5.430.000	11,63%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		9	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	41.019.060	10.046.400	24,49%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

	10	Program Perizinan Penggunaan Arsip				Dinas Arsip dan Perpustakaan	Tidak Tertata di APBD 2025
	11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	325.000.000	201.186.850	61,90%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.425.000.000	1.158.891.600	81,33%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	100.000.000	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	145.208.900	137.643.486	94,79%	Dinas P3AD	
	15	Program Perlindungan Perempuan	197.517.795	86.315.100	43,70%	Dinas P3AD	
	16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	950.000.000	744.504.337	78,37%	Dinas P3AD	
	17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				Dinas P3AD	Tidak Tertata di APBD 2025
	18	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	212.433.415	201.904.600	95,04%	Dinas P3AD	
	19	Program Perlindungan Khusus Anak	270.605.000	202.126.554	74,69%	Dinas P3AD	
	20	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Dinas Tenaga Kerja	Tidak Tertata di APBD 2025
	21	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	580.298.360	505.585.952	87,13%	Dinas Tenaga Kerja	
	22	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.051.363.700	1.021.255.540	97,14%	Dinas Tenaga Kerja	
	23	Program Hubungan Industrial			99,31%	Dinas	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

				4.099.735.250	4.071.640.895		Tenaga Kerja	
		24	Program Pemberdayaan Sosial	139.471.800	120.088.600	86,10%	Dinas Sosial	
		25	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				Dinas Sosial	Tidak Tertata di APBD 2025
		26	Program Rehabilitasi Sosial	820.803.920	782.098.800	95,28%	Dinas Sosial	
		27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.668.229.223	1.358.610.300	81,44%	Dinas Sosial	
		28	Program Penanganan Bencana	348.481.000	329.091.700	94,44%	Dinas Sosial	
		29	Program Taman Makam Pahlawan				Dinas Sosial	Tidak Tertata di APBD 2025
		30	Program Pendaftaran Penduduk	405.453.344	361.098.903	89,06%	Dinas Dukcapil	
		31	Program Pencatatan Sipil	147.463.467	146.618.700	99,43%	Dinas Dukcapil	
		32	Program Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	72.958.189	72.682.100	99,62%	Dinas Dukcapil	
		33	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	17.049.182	16.111.600	94,50%	Dinas Dukcapil	
			JUMLAH	40.876.795.733	22.918.602.827	56,07%		
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	45.485.286.771	38.701.536.441	85,09%	Dinas Kesehatan	
		2	Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Dinas Kesehatan	Tidak Tertata di APBD 2025
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	379.667.000	108.181.086	28,49%	Dinas Kesehatan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.742.628.000	1.689.809.955	96,97%	Dinas Kesehatan	
		5	Program Pengendalian Penduduk	2.348.790.000	1.889.118.302	80,43%	Dinas P2KB	
		6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	309.910.000	182.563.900	58,91%	Dinas P2KB	
		7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (IKS)	1.109.555.000	1.081.135.200	97,44%	Dinas P2KB	
			JUMLAH	51.375.836.771	43.652.344.884	84,97%		
5	Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.220.667.852	6.148.910.151	98,85%	Dinas PUPR	
		2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.029.315.666	12.057.938.150	92,54%	Dinas PUPR	
		3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.403.833.100	1.361.875.600	97,01%	Dinas PUPR	
		4	Program Pengembangan Permukiman				Dinas PUPR	Tidak Tertata di APBD 2025
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	347.516.100	287.005.500	82,59%	Dinas PUPR	
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	16.630.749.614	16.515.217.137	99,31%	Dinas PUPR	
		7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.807.850	523.429.980	63,23%	Dinas PUPR	
		8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				Dinas PUPR	Tidak Tertata di APBD 2025
		9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.310.967.000	2.906.627.250	87,79%	Dinas PUPR	
		10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				Dinas PUPR	Tidak Tertata di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

							APBD 2025
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					Dinas PUPR	Tidak Tertata di APBD 2025
12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	976.479.450	869.592.819	89,05%	Dinas Perkim		
13	Program Kawasan Permukiman	453.837.300	347.789.362	76,63%	Dinas Perkim		
14	Program Pengembangan Perumahan	12.920.000	8.200.000	63,47%	Dinas Perkim		
15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	872.263.125	739.599.400	84,79%	Dinas Perkim		
16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				Dinas Perkim		Tidak Tertata di APBD 2025
17	Pogram Pengelolaan Izin Lokasi				Dinas PUPR		Tidak Tertata di APBD 2025
18	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				Dinas PUPR		Tidak Tertata di APBD 2025
19	Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				Dinas PUPR		Tidak Tertata di APBD 2025
20	Program Penatagunaan Tanah				Dinas PUPR		Tidak Tertata di APBD 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

	21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.978.110.700	4.878.333.564	81,60%	Dinas Perhubungan	
	22	Program Pengelolaan dan Energi Baru Terbarukan	4.078.800	3.888.000	95,32%	Dinas Tenaga Kerja	
	23	Program Penanggulangan Bencana	443.981.400	336.597.724	75,81%	BPBD	
	24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penylematan Kebakaran dan Penylematan Non Kebakaran	130.000.000	116.683.000	89,76%	SatPolPP	
	25	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	172.500.000	154.825.000	89,75%	Dinas Lingkungan Hidup	
	26	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000	92.446.750	92,45%	Dinas Lingkungan Hidup	
	27	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	50.271.000	34.654.200	68,93%	Dinas Lingkungan Hidup	
	28	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD 2025
	29	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD 2025
	30	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD 2025
	31	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

								2025	
		32	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD 2025
		33	Program Pengelolaan Persampahan	6.881.389.701	6.224.192.150	90,45%		Dinas Lingkungan Hidup	
			JUMLAH	57.846.688.658	53.607.805.737	92,67%			
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	948.258.000	940.821.817	99,22%		Dinas Pariwisata	
		2	Program Pemasaran Pariwisata	2.140.467.161	2.105.110.280	98,35%		Dinas Pariwisata	
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.289.859.500	1.284.964.288	99,62%		Dinas Pariwisata	
		4	Program Pengembangan Kebudayaan	150.205.300	137.306.600	91,41%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	34.500.000	32.500.000	94,20%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6	Program Pembinaan Sejarah	20.635.000	5.430.000	26,31%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	81.018.800	72.748.021	89,79%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			JUMLAH	4.664.943.761	4.578.881.006	98,16%			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.885.293.038	3.149.130.520	81,05%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.594.753.068	1.414.489.550	88,70%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	48.046.550	96,09%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.161.701.861	707.032.760	60,86%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		5	Program Penyuluhan Pertanian	414.642.750	339.364.979	81,85%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	290.470.100	271.189.961	93,36%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.000.000	24.987.994	99,95%	Dinas Pertanian dan Perikanan
		JUMLAH			7.421.860.817	5.954.242.314	80,23%
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.907.300	-	0,00%	Dinas Pangan
		2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	901.061.379	733.586.896	81,41%	Dinas Pangan
		3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	64.037.700	21.185.303	33,08%	Dinas Pangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.000	98.174.727	98,17%	Dinas Pangan	
		JUMLAH		1.069.006.379	852.946.926	79,79%		
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.486.695.184	13.730.803.242	78,52%	BPKPD	
		2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.296.360.233	1.280.001.530	98,74%	BPKPD	
		3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.455.947.284	2.249.110.357	91,58%	BPKPD	
		4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.307.147.260	655.049.109	50,11%	Bapelitbang da	
		5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	277.224.000	211.998.257	76,47%	Bapelitbang da	
		6	Program Kepegawaian Daerah	680.326.046	481.099.640	70,72%	BKPSDM	
		7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	964.298.730	755.460.591	78,34%	BKPSDM	
		8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	151.366.400	92.855.000	61,34%	Bapelitbang da	
		9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.639.152.363	2.185.226.800	82,80%	Inspektorat	
		10	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	892.087.000	582.980.210	65,35%	Inspektorat	
		11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	257.997.250	255.041.000	98,85%	Kecamatan Tomohon Utara	
		12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.916.600.000	4.914.701.373	99,96%	Kecamatan Tomohon Utara	
		13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	40.000.000	100,00%	Kecamatan Tomohon Utara	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

	14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	14.200.000	14.191.000	99,94%	Kecamatan Tomohon Utara	
	15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	305.713.079	257.370.000	84,19%	Kecamatan Tomohon Timur	
	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.460.600.000	2.421.874.570	98,43%	Kecamatan Tomohon Timur	
	17	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.600.000	27.945.000	94,41%	Kecamatan Tomohon Timur	
	18	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	4.430.000	-	0,00%	Kecamatan Tomohon Timur	
	19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	302.255.886	289.080.050	95,64%	Kecamatan Tomohon Tengah	
	20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.796.000.000	3.788.299.000	99,80%	Kecamatan Tomohon Tengah	
	21	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	22.500.000	90,00%	Kecamatan Tomohon Tengah	
	22	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	35.000.000	34.889.200	99,68%	Kecamatan Tomohon Tengah	
	23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	296.281.370	275.251.063	92,90%	Kecamatan Tomohon Barat	
	24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.761.000.000	3.744.354.982	99,56%	Kecamatan Tomohon Barat	
	25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.200.000	35.140.000	89,64%	Kecamatan Tomohon Barat	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

	26	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	16.000.000	9.740.000	60,88%	Kecamatan Tomohon Barat	
	27	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	437.178.500	388.290.730	88,82%	Kecamatan Tomohon Selatan	
	28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.352.180.895	5.272.281.815	98,51%	Kecamatan Tomohon Selatan	
	29	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.373.500	57.886.800	95,88%	Kecamatan Tomohon Selatan	
	30	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	40.400	-	0,00%	Kecamatan Tomohon Selatan	
	31	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.976.324.100	14.931.928.219	93,46%	Sekretariat Dewan	
	32	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota				Sekretariat Dewan	Tidak Tertata di APBD 2025
	33	Program Administrasi Umum				Sekretariat Daerah	Tidak Tertata di APBD 2025
	34	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.923.448.204	18.415.336.642	97,31%	Sekretariat Daerah	
	35	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.222.008.080	2.987.932.614	92,74%	Sekretariat Daerah	
	36	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Dinas Kominfo	Tidak Tertata di APBD 2025
	37	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.524.815.600	3.414.969.892	96,88%	Dinas Kominfo	
	38	Program Pengelolaan Aplikasi			81,05%	Dinas	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		Informatika	1.148.292.550	930.664.890		Kominfo	
	39	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				Dinas Kominfo	Tidak Tertata di APBD 2025
		JUMLAH	93.095.143.914	84.754.253.576	91,04%		
		TOTAL	272.620.933.031	230.506.367.295	84,55%		

Sumber: BPKPD, 2026 (unaudited)

a. PK Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.57

Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis (PK Perubahan Tahun 2025)

No	Sasaran	No	Program Prioritas	Anggaran	Realisasi	%(Rp)	PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.180.850.000	1.175.884.860	99,58%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	473.360.000	471.839.310	99,68%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		3	Program Pengembangan Kebudayaan	150.205.300	137.306.600	91,41%	Dikbud	
			JUMLAH	1.804.415.300	1.785.030.770	98,93%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.907.300		0,00%	Dinas Pangan		
		2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	901.061.379	733.586.896	81,41%	Dinas Pangan		
		4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.000	98.174.727	98,17%	Dinas Pangan		
		5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.885.293.038	3.149.160.520	81,05%	Dinas Pertanian dan Perikanan		
		6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.594.753.068	1.414.489.550	88,70%	Dinas Pertanian dan Perikanan		
		7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	290.470.750	271.189.961	93,36%	Dinas Pertanian dan Perikanan		
		JUMLAH			6.839.523.235	5.687.786.957	83,16%		
		3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000	92.446.750	92,45%	Dinas Lingkungan Hidup
2	2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			50.271.000	34.654.200	68,93%	Dinas Lingkungan Hidup		
3	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tertata di APBD 2025	
4	Program Pengelolaan Persampahan			6.881.389.701	6.224.192.150	90,45%	Dinas Lingkungan Hidup		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		5	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	4.078.800	3.888.000	95,32%	Dinas Tenaga Kerja	
		JUMLAH		7.035.739.501	6.355.181.100	90,33%		
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.220.667.852	6.148.910.151	98,85%	Dinas PUPR	
		2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.029.315.666	12.057.938.150	92,54%	Dinas PUPR	
		3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				Dinas PUPR	Tidak Tertata di APBD 2025
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.310.967.000	2.906.627.250	87,79%	Dinas PUPR	
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.403.833.100	1.361.875.600	97,01%	Dinas PUPR	
		6	Program Pengembangan Permukiman				Dinas PUPR	Tidak Tertata di APBD 2025
		7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	827.807.850	523.429.980	63,23%	Dinas PUPR	
		9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.978.110.700	4.878.333.564	81,60%	Dinas Perhubungan	
		10	Program Pengembangan Perumahan	12.920.000	8.200.000	63,47%	Dinas Perkim	
		11	Program Kawasan Permukiman	453.837.300	347.789.362	76,63%	Dinas Perkim	
		12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	976.479.450	869.592.819	89,05%	Dinas Perkim	
		13	Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	872.263.125	739.599.400	84,79%	Dinas Perkim	
		14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.916.600.000	4.914.701.373	99,96%	Kecamatan Tomohon Utara	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.460.600.000	2.421.874.570	98,43%	Kecamatan Tomohon Timur	
		16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.796.000.000	3.788.299.000	99,80%	Kecamatan Tomohon Tengah	
		17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.761.000.000	3.744.354.982	99,56%	Kecamatan Tomohon Barat	
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.352.180.895	5.272.281.815	98,51%	Kecamatan Tomohon Selatan	
		JUMLAH			70.003.332.552	66.499.025.153	94,99%	
5	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	948.258.000	940.821.817	99,22%	Dinas Priwisata	
		2	Program Pemasaran Pariwisata	2.140.467.161	2.105.110.280	98,35%	Dinas Priwisata	
		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				Dinas Priwisata	Tidak Tertata di APBD 2025
		4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.289.859.500	1.284.964.288	99,62%	Dinas Priwisata	
		JUMLAH			4.378.584.661	4.330.896.385	98,91%	
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas	1	Program Pengelolaan Pendidikan	22.198.479.549	6.727.765.815	30,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.791.605.850	4.391.803.959	91,66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

		3	Program Pengembangan Kurikulum				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Tertata di APBD 2025
		4	Program Pembinaan Perpustakaan	709.446.007	125.719.000	17,72%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		JUMLAH		27.699.531.406	11.245.288.774	40,60%		
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	65.457.549	37.540.700	57,35%	DPMPTSP	
		2	Program Promosi Penanaman Modal	187.427.751	178.145.040	95,05%	DPMPTSP	
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.056.975	89.057.100	89,90%	DPMPTSP	
		4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
		5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
		6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	160.067.500	91.019.450	56,86%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

	8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	656.101.400	506.310.703	77,17%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
	10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	450.000.000	123.019.750	27,34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	12	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.668.229.223	1.358.610.300	81,44%	Dinas Sosial	
	13	Program Pemberdayaan Sosial	139.471.800	120.088.600	86,10%	Dinas Sosial	
	14	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	192.535.800	66.636.400	34,61%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.960.000	100.860.000	99,90%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	16	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak Tertata di APBD 2025
	17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	286.325.000	15.500.000	5,41%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	18	Program Pengembangan UMKM	214.000.000	-	0,00%	Dinas Koperasi dan UMKM	
	JUMLAH		5.040.436.918	3.468.886.843	68,82%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	65.457.549	37.540.700	57,35%	DPMPTSP	
		2	Program Promosi Penanaman Modal	187.427.751	178.145.040	95,05%	DPMPTSP	
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.056.975	89.057.100	89,90%	DPMPTSP	
		4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
		5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
		6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	160.067.500	91.019.450	56,86%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025
		8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	656.101.400	506.310.703	77,17%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tidak Tertata di APBD 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025

10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	450.000.000	123.019.750	27,34%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
11	Program Rehabilitasi Sosial	820.803.920	782.098.800	95,28%	Dinas Sosial	
12	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.668.229.223	1.358.610.300	81,44%	Dinas Sosial	
13	Program Pemberdayaan Sosial	139.471.800	120.088.600	86,10%	Dinas Sosial	
14	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	192.535.800	66.636.400	34,61%	Dinas Koperasi dan UMKM	
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.960.000	100.860.000	99,90%	Dinas Koperasi dan UMKM	
16	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak Tertata di APBD 2025
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	286.325.000	15.500.000	5,41%	Dinas Koperasi dan UMKM	
18	Program Pengembangan UMKM	214.000.000	-	0,00%	Dinas Koperasi dan UMKM	
JUMLAH		5.040.436.918	3.468.886.843	68,82%		
TOTAL		127.842.000.491	102.840.982.825	80,44%		

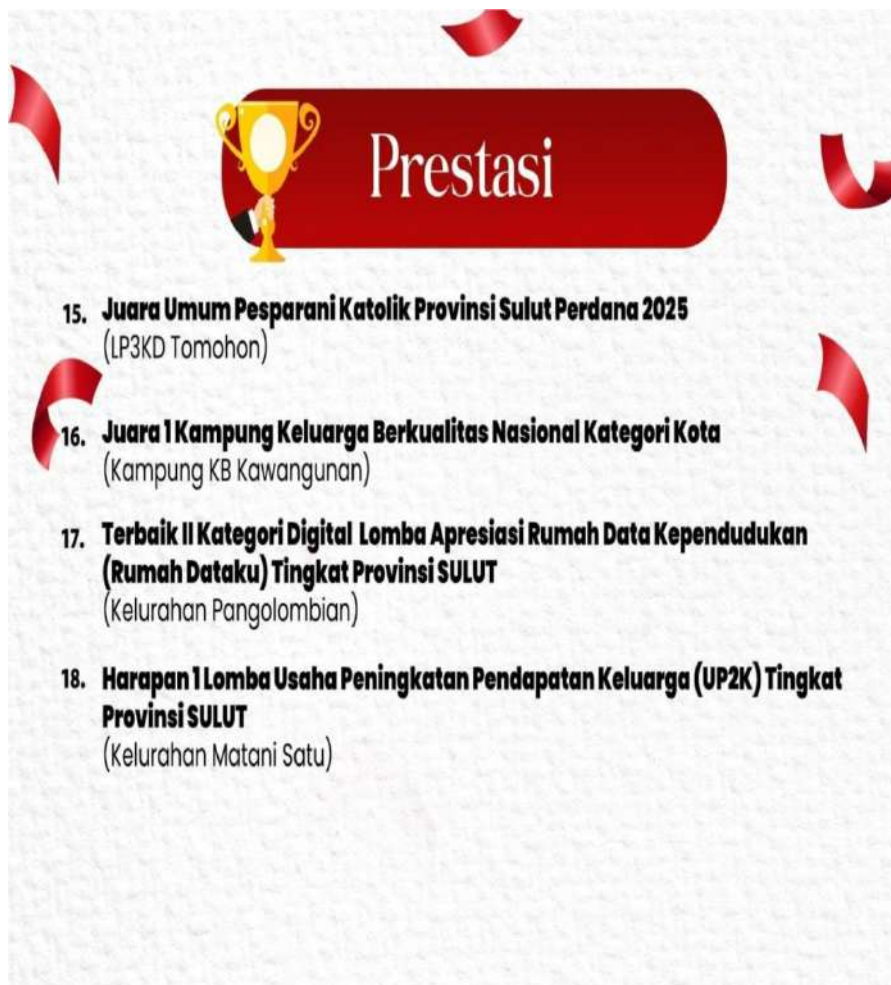
Sumber: BPKPD, 2026 (unaudited)

C. Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Tomohon



Prestasi

- 1. Most Prosperity City in The Wonderful Indonesia Cities Impact Award 2025 (Kemenparekraf RI)**
satu-satunya kota dari Indonesia Timur, mengakui dampak pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2. Indonesia Prosperity City Award 2025**
(pengakuan atas kemajuan pariwisata berkelanjutan).
- 3. Public Service for IMPACT 2025 (DisParda – Kemenparekraf RI)**
atas inovasi pelayanan publik sektor pariwisata.
- 4. Terbaik 1 Penurunan Stunting Sulut 2025 (Pemprov Sulut)**
dengan piala Best Performance
- 5. Terbaik III Penurunan Stunting 2025 (Pemprov Sulut)**
atas kinerja 8 aksi konvergensi
- 6. Pembina Program Kesehatan Terbaik**
(HKN Sulut 2025)
- 7. GM-DTGI Awards 2025 (UGM)**
atas transformasi digital tata kelola
- 8. Pemerintah Kota Terbaik dalam Transformasi Digital 2025**
(satu-satunya di Sulut)
- 9. TP2DD Kota Terbaik II Wilayah Sulawesi 2025**
(Kemenko Perekonomian RI)
- 10. Terbaik I Pelayanan Publik Dukcapil se-Sulut 2025**
(nilai 98,19%)
- 11. 4 Penghargaan Anugerah Mapalus Pendidikan Sulut 2025 (Kemendikdasmen/BPMP Sulut)**
Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Terbaik, Progres Sinkronisasi Dapodik Terbaik, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Terbaik, Implementasi SPMB 2025 Terbaik.
- 12. Score Pelayanan Minimal Tertinggi Terminal Tipe C se-Sulut 2025**
(Dishub)
- 13. Prakarsa Expo Inovasi PKN & PKA 2025**
(BKPSDM – dari Wali Kota)
- 14. Prestasi Nasional Paskibraka**
Bianca Alessia Christabella Lantang (SMA Lentera Harapan) terpilih sebagai pembawa baki pada Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara





Wakil Wali Kota Tomohon SENDY RUMAJAR, S.E., M.J.Kom
menerima Penghargaan

"MOST PROSPERITY CITY"
THE WONDERFULL INDONESIA
Cities Impact Award 2025

Kategori penghargaan tersebut merupakan penilaian terhadap Kota yang paling memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata.



Wakil Wali Kota Tomohon SENDY RUMAJAR, S.E., M.J.Kom
menerima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas

**DUKUNGAN KOTA TOMOHON TERHADAP
PROGRAM KAWASAN BERBASIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)**





Wakil Wali Kota Tomohon SENDY RUMAJAR, S.E., M.I.Kom menerima Penghargaan

TERBAIK 1 ATAS KATEGORI BEST PERFORMANCE

Pada pelaksanaan penilaian penurunan stunting tahun 2025 di Provinsi SULUT



Walikota Tomohon Caroll J.A Senduk, SH menerima Penghargaan

KOTA TERBAIK 1 DENGAN NILAI 98,19% (OPINI KUALITAS TERBAIK)

Hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2025.



BAB IV PENUTUP

Upaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara baik dan benar serta memelihara kepercayaan masyarakat yang selalu menuntut transparansi.

Pemerintah Kota Tomohon telah berhasil melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan uraian LKjIP tahun 2025 memuat hasil pengukuran kinerja khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target, dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025 dan 8 (delapan) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 secara umum dapat diakumulasi pencapaiannya **berhasil**, sehingga dengan capaian tersebut Pemerintah Kota Tomohon telah berhasil di tahun 2025 dalam menjabarkan visinya berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 yaitu "**Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera**" dan RPJMD tahun 2025-2029 yaitu "**Tomohon Kota Wisata Dunia, Maju, Sejahtera**"

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon di tahun 2025 berupa kendala teknis yang dipengaruhi oleh hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Kurangnya tingkat pemahaman dan kepedulian sumberdaya aparatur pengolah LkjIP Perangkat Daerah.
- Masih kurangnya keterkaitan antara sasaran dan indikatornya dalam penjabarannya ke dalam program dan kegiatan operasionalnya.
- Proses pengumpulan data yang memerlukan waktu lama dikarenakan tindak lanjut Perangkat Daerah yang lambat.

Solusi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pelaporan yang akuntabel adalah dengan pelaksanaan antara lain:

- Perlunya keselarasan antara RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kota Tomohon
- Sosialisasi/Bimtek SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan di tahun yang akan datang lebih dimantapkan kinerja dalam rangka penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berkesinambungan.

Terima kasih.



WALIKOTA TOMOHON

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA TOMOHON
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasi	1	Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	6,5
2	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1	Laju pertumbuhan ekonomi	7,11-7,61
		2	Indeks Gini	0,32
		3	Angka kemiskinan	3,64
3	Meningkatnya Kualitas dan daya saing SDM	1	Indeks Pembangunan manusia	77
		2	Tingkat Pengangguran terbuka	5,55-6,05
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	77,35
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Prevalensi stunting	12
		2	Umur harapan hidup	72,25

5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	88,2
		2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	85
		3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	99
		4	Akses air minum layak	95
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	1397
		2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	4
7	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	65
8	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	37
		2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	88,6
9	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	71-75
		2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP
		3	Indeks SPBE	3,5
		4	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4,1
		5	Nilai SAKIP Kota	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp20,153,120,950.00	APBD
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp3,811,714,300.00	APBD
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp6,740,000.00	APBD
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp624,100,648.00	APBD
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp336,118,400.00	APBD
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp269,223,500.00	APBD
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp388,784,000.00	APBD
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp117,798,800.00	APBD
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp87,392,800.00	APBD
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp112,499,993.70	APBD
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp1,500,000,000.00	APBD
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp250,000,000.00	APBD
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp375,355,000.00	APBD
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp1,742,628,000.00	APBD
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp21,565,852,770.00	APBD
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp204,597,800.00	APBD
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp359,559,600.00	APBD
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp300,000,000.00	APBD
19	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp319,000,000.00	APBD
20	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp761,091,280.40	APBD
21	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp32,660,000.00	APBD
22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp309,324,900.00	APBD

23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp41,544,137,600.00	APBD
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp8,518,301,250.00	APBD
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp423,498,500.00	APBD
26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp35,000,000.00	APBD
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp350,032,900.00	APBD
28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp306,044,100.00	APBD
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp126,850,267.00	APBD
30	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp150,000,000.00	APBD
31	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp444,142,944.00	APBD
32	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp4,938,874,980.00	APBD
33	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp154,353,100.00	APBD
34	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp256,180,400.00	APBD
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp381,956,000.00	APBD
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp201,021,810.00	APBD
37	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp25,000,000.00	APBD
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp50,000,000.00	APBD
39	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp1,202,133,236.00	APBD
40	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp74,999,048.00	APBD
41	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp1,225,000,000.00	APBD
42	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp3,310,967,000.00	APBD
43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp900,000,000.00	APBD
44	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp13,438,270,300.00	APBD

45	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp7,201,200.00	APBD
46	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rp15,609,800.00	APBD
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp79,006,789.00	APBD
48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp2,357,400,000.00	APBD
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp50,271,000.00	APBD
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp21,083,739,159.00	APBD
51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp2,454,051,940.00	APBD
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp22,210,218,330.00	APBD
53	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp37,500,000.00	APBD
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp5,428,640,000.00	APBD
55	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp31,125,588.00	APBD
56	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp5,574,701,000.00	APBD
57	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rp3,907,300.00	APBD
58	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp40,000,000.00	
59	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp89,993,549.00	APBD
60	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp825,000,000.00	APBD
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp350,000,000.00	APBD
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp100,000,000.00	APBD
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp150,447,200.00	APBD
64	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Rp29,500,000.00	APBD

65	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp23,013,000.00	APBD
66	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp964,298,730.00	APBD
67	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp888,822,200.00	APBD
68	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp119,923,700.00	APBD
69	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp210,000,000.00	APBD
70	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp210,000,000.00	APBD
71	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp50,000,000.00	APBD
72	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp125,000,000.00	APBD
73	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp114,342,775.00	APBD
74	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp2,408,480,000.00	APBD
75	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp214,090,200.00	APBD
76	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp25,000,000.00	APBD
77	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp1,170,800,000.00	APBD
78	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp525,000,000.00	APBD
79	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp718,955,700.00	APBD
80	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp47,934,400.00	APBD
81	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp13,951,487,660.00	APBD
82	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp1,983,710,000.00	APBD

83	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp950,000,000.00	APBD
84	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp631,823,853.40	APBD
85	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp180,283,174.00	APBD
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp429,169,302,962.02	APBD
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp450,645,000.00	APBD
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp1,290,000,000.00	APBD
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp38,386,416,000.00	APBD
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp3,889,208,600.00	APBD
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp1,481,016,413.00	APBD
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp518,955,900.00	APBD
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp1,982,525,098.00	APBD
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp11,700,000.00	APBD
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp76,675,000.00	APBD
96	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp190,092,750.00	APBD
97	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp1,852,716,450.00	APBD
98	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp500,000,000.00	APBD
99	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp172,500,000.00	APBD
100	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp1,547,584,000.00	APBD
101	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp2,493,189,223.00	APBD

102	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp75,000,000.00	APBD
103	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp270,605,000.00	APBD
104	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp206,087,400.00	APBD
105	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp1,039,517,000.00	APBD
106	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp1,548,714,000.00	APBD
107	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp255,006,451.00	APBD
108	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp603,912,020.00	APBD
109	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp465,843,000.00	APBD
110	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp250,000,000.00	APBD
111	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp29,557,300.00	APBD

Tomohon, Februari 2025

WALIKOTA TOMOHON



CAROL V. A. SENDUK, SH

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**



WALIKOTA TOMOHON

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

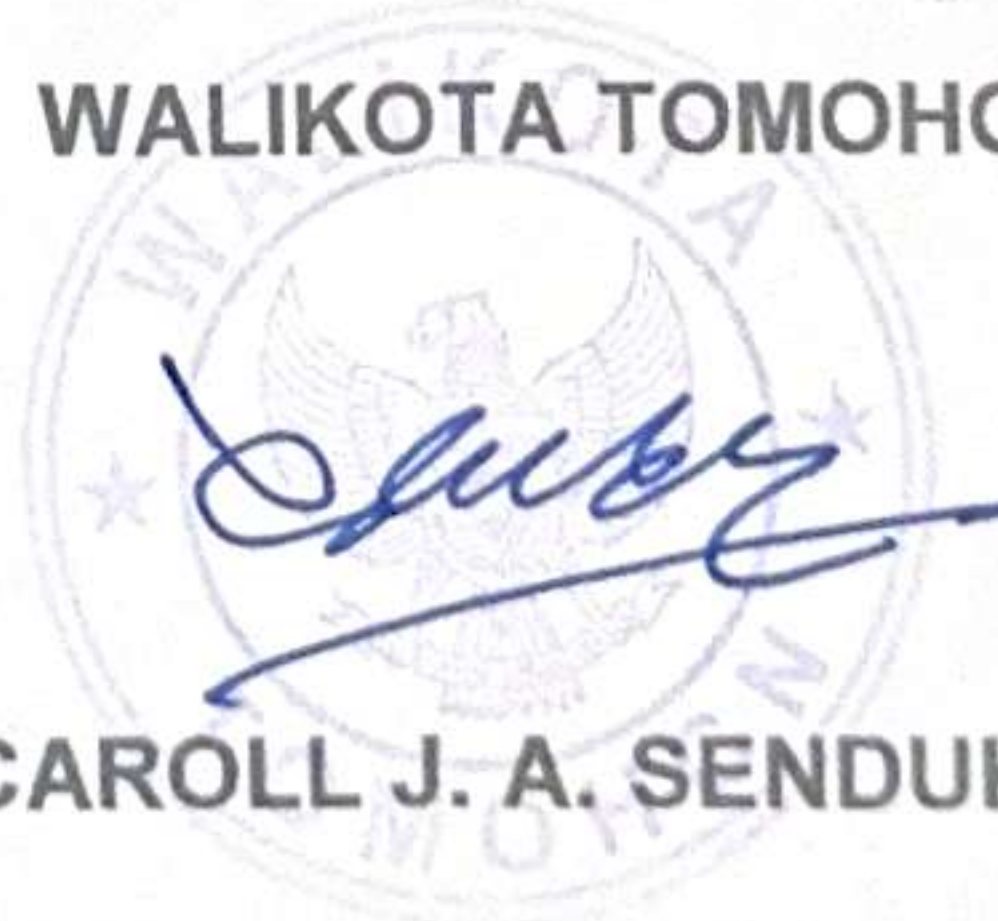
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAROLL J. A. SENDUK, SH
Jabatan : WALIKOTA TOMOHON

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tomohon, November 2025

WALIKOTA TOMOHON


CAROLL J. A. SENDUK, SH



WALIKOTA TOMOHON

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

Provinsi/Kabupaten/Kota : KOTA TOMOHON
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan dan rukun dalam kerangka demokrasi.	1 Indeks Kerukunan Umat beragama	77
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks Ketahanan Pangan	84,15
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,97
4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	1 Indeks Infrastruktur	78

5	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	2,1
6	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Pembangunan Manusia	80 – 80,5
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan rakyat	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50
		2	Indeks Daya Saing Daerah	3,67
8	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah dan digitalisasi layanan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	71
		2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15,976,324,100.00	APBDP
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4,099,735,250.00	APBDP
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	453,837,300.00	APBDP
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	680,326,046.00	APBDP
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	277,224,000.00	APBDP
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	194,173,500.00	APBDP
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	580,298,360.00	APBDP
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99,056,975.00	APBDP
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	81,018,800.00	APBDP
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	112,500,000.00	APBDP
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,140,467,161.00	APBDP
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	228,210,000.00	APBDP
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,109,555,999.00	APBDP
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,742,628,000.00	APBDP
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,286,380,895.00	APBDP
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	139,471,800.00	APBDP
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286,325,000.00	APBDP
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	473,360,000.00	APBDP
19	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	309,910,000.00	APBDP
20	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	709,446,007.00	APBDP
21	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20,635,000.00	APBDP
22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	212,433,415.00	APBDP
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45,485,286,771.00	APBDP

24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,461,724,102.00	APBDP
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	348,481,000.00	APBDP
26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64,037,700.00	APBDP
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	443,981,400.00	APBDP
28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	347,516,100.00	APBDP
29	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	147,463,467.00	APBDP
30	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	130,000,000.00	APBDP
31	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405,453,344.00	APBDP
32	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4,791,605,850.00	APBDP
33	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100,960,000.00	APBDP
34	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	151,366,400.00	APBDP
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,051,363,700.00	APBDP
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	145,208,900.00	APBDP
37	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	192,535,800.00	APBDP
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100,000,000.00	APBDP
39	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,148,292,550.00	APBDP
40	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46,672,722.00	APBDP
41	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,296,360,233.00	APBDP
42	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,310,967,000.00	APBDP
43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,403,833,100.00	APBDP
44	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13,029,315,666.00	APBDP
45	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4,911,200.00	APBDP
46	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4,078,800.00	APBDP
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	72,958,189.00	APBDP


48	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,524,815,600.00	APBDP
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50,271,000.00	APBDP
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17,649,438,913.00	APBDP
51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,455,947,284.00	APBDP
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	22,198,479,549.00	APBDP
53	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	290,470,100.00	APBDP
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,881,389,701.00	APBDP
55	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17,049,182.00	APBDP
56	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6,220,667,852.00	APBDP
57	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3,907,300.00	APBDP
58	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	31,155,200.00	APBDP
59	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65,457,549.00	APBDP
60	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1,425,000,000.00	APBDP
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	325,000,000.00	APBDP
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100,000,000.00	APBDP
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150,205,300.00	APBDP
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	34,500,000.00	APBDP
65	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12,920,000.00	APBDP
66	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	964,298,730.00	APBDP
67	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,289,859,500.00	APBDP
68	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	214,000,000.00	APBDP
69	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,161,701,861.00	APBDP
70	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50,000,000.00	APBDP
71	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75,917,300.00	APBDP

72	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000.00	APBDP
73	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2,348,790,000.00	APBDP
74	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	160,067,500.00	APBDP
75	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25,000,000.00	APBDP
76	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,180,850,000.00	APBDP
77	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	948,258,000.00	APBDP
78	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	901,061,379.00	APBDP
79	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,782,698,670.00	APBDP
80	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,427,820,000.00	APBDP
81	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	950,000,000.00	APBDP
82	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	612,772,653.00	APBDP
83	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	872,263,125.00	APBDP
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	408,306,349,147.00	APBDP
85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,594,753,068.00	APBDP
86	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,885,293,038.00	APBDP
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16,630,749,614.00	APBDP
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5,978,110,700.00	APBDP
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,599,426,085.00	APBDP
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	827,807,850.00	APBDP
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,639,152,363.00	APBDP
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69,670,400.00	APBDP
93	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	414,642,750.00	APBDP
94	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,611,004,040.00	APBDP

95	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	656,101,400.00	APBDP
96	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	172,500,000.00	APBDP
97	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,307,147,260.00	APBDP
98	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,668,229,223.00	APBDP
99	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	41,019,060.00	APBDP
100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	270,605,000.00	APBDP
101	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	197,517,795.00	APBDP
102	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	976,479,450.00	APBDP
103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	892,087,000.00	APBDP
104	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	187,427,751.00	APBDP
105	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	820,803,920.00	APBDP
106	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	379,667,000.00	APBDP
107	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	450,000,000.00	APBDP
108	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	41,030,000.00	APBDP

Tomohon, November 2025

WALIKOTA TOMOHON



CAROLL J. A SENDUK, SH



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2025**

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon serta penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatnya toleransi antarumat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama/Indeks Kota Toleran	Skor	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$ Variabel 1 : Hubungan Sosial Variabel 2 : Agama dan Konflik Variabel 3 : Kebijakan Pemerintah Variabel 4 : Peran Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
2	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{PDB rt} - \text{PDB rt-1}}{\text{PDB rt-1}}$	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
			b	Indeks Gini	Poin	Data dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon	Dinas Sosial Daerah
			c	Angka Kemiskinan	%	Data dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon	Dinas Sosial Daerah
		Meningkatnya Kualitas dan daya Saing SDM	a	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	Data dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah
			b	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja Daerah
			c	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Tomohon	a	Turunnya Angka <i>Stunting</i>	%	$\frac{\text{Jumlah Balita } \textit{Stunting} \text{ (PB/U atau TB/U dengan z-score kurang dari -2 SD)}}{\text{Jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100$	Dinas Kesehatan Daerah		
			b	Umur Harapan Hidup	Tahun	$\frac{\text{Jumlah semua umur orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}} \times 100$	Dinas Kesehatan Daerah		
		Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan kota terpadu, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	a	Indeks Infrastruktur	Indeks	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km)/pembuangan aliran air tidak tersumbat + luas irigasi kota dalam kondisi baik + panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase kota (km) + luas irigasi kota + panjang jalan kota seluruhnya}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah		
			b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
			c	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah		
			d	Akses Air Minum Layak	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah		
		3	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan professional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	a	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Rupiah	$\frac{\text{Realiasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100$	Dinas Pariwisata Daerah
					b	Lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Hari	$\frac{\text{Jumlah Kamar terjual}}{\text{Jumlah kunjungan menginap}} \times 100$	Dinas Pariwisata Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Terwujudnya peningkatan produksi komoditi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	$\frac{\text{Jumlah produksi bahan pangan padi}}{\text{Jumlah Luas Panen sebelumnya}} \times 100$	Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
		Meningkatnya ketahanan pangan	a Cadangan Beras Pemerintah Kota Tomohon	Ton	CBPK = 80% x Cadangan beras total provinsi x Ratio jumlah penduduk Kota Tomohon terhadap jumlah penduduk provinsi	Dinas Pangan Daerah
			b Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok bahan pangan	Dinas Pangan Daerah
5	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Kategori Penilaian dari Kementerian PAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			b Opini Terhadap Laporan Keuangan	WTP	Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			c Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Kategori Penilaian dari Kementerian PAN-RB	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
			d Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	Kategori Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
			e Nilai SAKIP Kota Tomohon	Nilai	Kategori Penilaian dari Kementerian PAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIK. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 321 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2025-2029**

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon serta penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025-2029.

KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 321 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah nilai yang diberikan oleh kementerian yang membidangi agama terhadap suatu daerah dimana kondisi antarumat beragama dapat saling menerima, menghormati keyakinan masing-masing, tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$ Keterangan: Variabel 1 : hubungan sosial Variabel 2 : agama dan konflik Variabel 3 : kebijakan pemerintah Variabel 4 : peran organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2	Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan kota yang terpadu	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Indeks Ketahanan Pangan adalah skor komposit yang dihitung berdasarkan berbagai indikator untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah (seperti provinsi, kabupaten, atau kota) telah mencapai pembangunan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan mengukur pencapaian pembangunan tersebut dengan nilai tertinggi menunjukkan wilayah yang paling tahan pangan dan nilai terendah menunjukkan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan	Nilai dari Badan Pangan Nasional	Dinas Pangan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai komposit yang mengukur kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang dihitung dari gabungan berbagai indeks seperti kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, dan kualitas air laut. Tujuan operasionalnya adalah untuk memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi lingkungan, memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan, serta menjadi dasar data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih terarah	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ <p>Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lingkungan</p>	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	3 Indeks Infrastruktur	Indeks	Indeks Infrastruktur adalah istilah yang merujuk pada berbagai cara untuk mengukur kinerja, kualitas, dan kepuasan terhadap infrastruktur di suatu wilayah atau negara. Indeks ini bisa berupa penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar seperti jalan, air, dan drainase (indeks infrastruktur daerah, indeks infrastruktur wilayah)	$\frac{\text{Persentase Jalan dalam Kondisi baik} + \text{Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik} + \text{Persentase Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Indeks Ukuran}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Persentase	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku adalah metode pengukuran untuk mengetahui persentase nilai ekonomi sektor pariwisata terhadap total PDRB suatu wilayah, menggunakan nilai moneter saat itu yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata Daerah
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	<p>Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> umur panjang dan sehat (diukur dari angka harapan hidup saat lahir); pengetahuan (diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah); dan standar hidup layak (diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli). <p>Nilai Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan dalam angka indeks desimal</p>	Data dari Badan Pusat Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah - Dinas Kesehatan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya produktivitas	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase kenaikan produk domestik bruto dari satu periode ke periode lain yang berfungsi sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi melalui peningkatan total produksi barang dan jasa di suatu wilayah dan sering kali dihitung berdasarkan data persentase tahunan dari produk domestik bruto atau PDRB (untuk skala wilayah)	Data dari Badan Pusat Statistik	Seluruh Perangkat Daerah
			3	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	IDSD adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. IDSD mengukur kondisi daerah dalam beberapa aspek termasuk lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, inovasi, dan digunakan sebagai alat untuk memotret kemajuan pembangunan daerah secara luas	<p>Rumus Minimal/Maximal untuk standarisasi data IDSD, sebagai berikut:</p> $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ <p>Sumber Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							<ul style="list-style-type: none">- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah- Dinas Kesehatan Daerah- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah- Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah- Dinas Lingkungan Hidup Daerah- Dinas Pangan Daerah- Dinas Tenaga Kerja Daerah- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel		1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	IRB merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah yang mengukur kemajuan dalam pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. IRB mengukur sejauh mana pemerintah berhasil menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria utama: a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. kecukupan pengungkapan; c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					d. efektivitas sistem pengendalian internal. Opini ini mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK